

(Kajian Fiskal Regional)
Provinsi Bengkulu



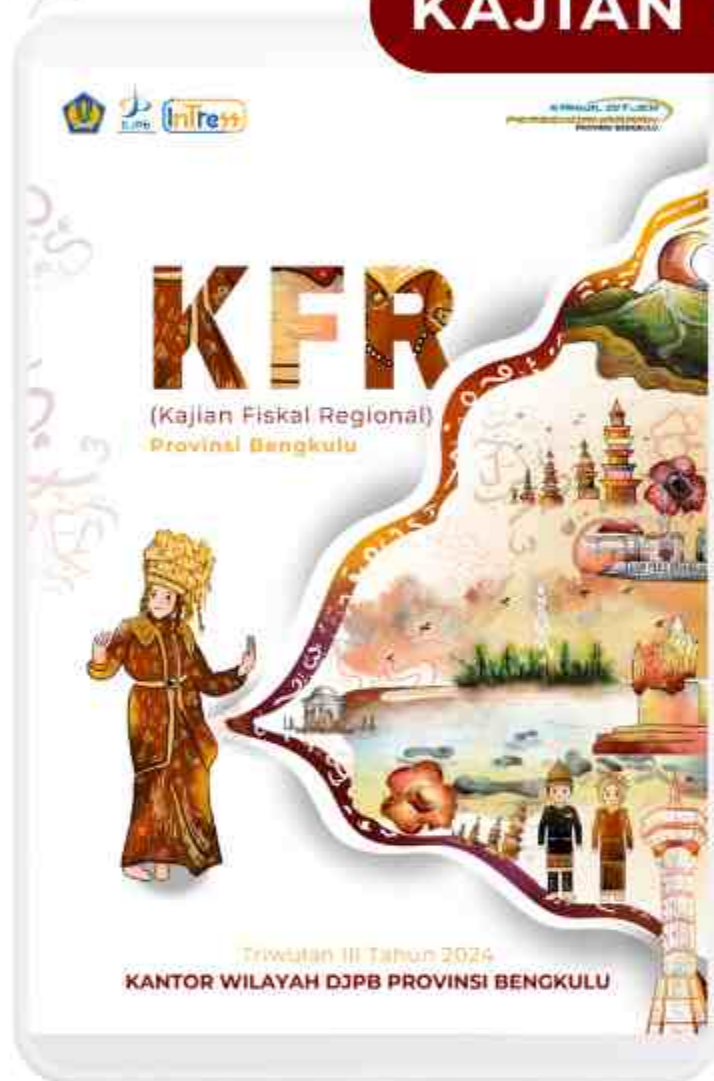
Triwulan III Tahun 2024

KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI BENGKULU



UNDUH

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN III 2024
PROVINSI BENGKULU
SECARA ONLINE

SCAN DI SINI

DOWNLOAD KFR



SURVEI KFR



SITUS WEBSITE

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu/id/ata-publikasi/kajian-fiskal-regional.html>





Tim

Penyusun



Pengarah

Mohamad Irfan Surya Wardana

(Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu)

Penyusun

Sunaryo

Imam Abdurrahman Mursalin

Sabar Sautomo

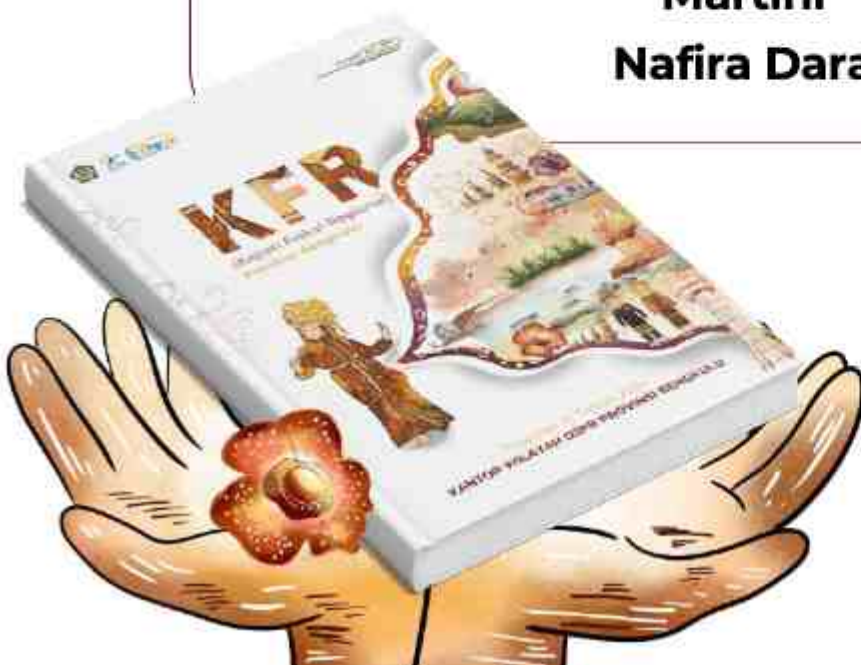
Puji Sigit Rakhmanto

Moh. Rizal Arwan

Khofipa Oktasya

Martini

Nafira Dara





Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-T736/PB.2/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu.

Dengan semakin menguatnya peran Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai *Regional Chief Economist (RCE)* dan *Financial Advisor (FA)*, kajian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dan memberikan gambaran yang komprehensif dan berkualitas kepada pembaca mengenai kondisi ekonomi dan dinamika fiskal di Provinsi Bengkulu untuk periode yang berakhir hingga triwulan III tahun 2024 kepada stakeholders eksternal maupun internal dalam mengambil kebijakan ekonomi dan fiskal yang lebih baik.

Selain memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal dan ekonomi terkini Bengkulu, dalam KFR kali ini juga mengangkat analisis tematik yang merupakan elaborasi analisis tematik yang telah dibahas dalam ALCo Regional sepanjang Triwulan III 2024, yaitu Implementasi Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD.

Iklim yang kolaboratif antara instansi terkait juga merupakan penentu kesuksesan dalam penyusunan KFR Triwulan III Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, *Local Expert* Provinsi Bengkulu, Tenaga Ahli dan semua pihak baik eksternal maupun internal yang telah membantu penyelesaian kajian ini. Semoga hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga hingga masa yang akan datang.

Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pembaca, para pengamat kebijakan publik, dosen dan mahasiswa. Rekomendasi KFR ini kami harapkan juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan publik pimpinan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang. Dan demi meningkatkan kualitas kajian ini kami juga mengharapkan masukan dan sarannya agar kajian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing agar bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi Provinsi Bengkulu, serta bangsa dan negara.

**Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
Mohamad Irfan Surya Wardana**

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
Mohamad Irfan Surya Wardana

Bengkulu, 28 November 2024
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Irfan Surya Wardana





Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Dashboard Makro Fiskal	xv
Daftar Pustaka	

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1

1.1	Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	3
1.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.1.2	Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB	7
1.1.3	Inflasi	8
1.1.4	Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor	11
1.2	Analisis Indikator Kesejahteraan/Pembangunan	12
1.2.1	Tingkat Kemiskinan	13
1.2.2	Tingkat Pengangguran	16
1.2.3	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	19
1.2.4	Nilai Tukar Petani (NTP)	20
1.2.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	21

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

24

2.1	Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi	26
2.1.1	Analisis Perkembangan Pendapatan Negara	27
2.1.2	Analisis Perkembangan Belanja Negara	34
2.1.3	Surplus/Defisit APBN	43
2.1.4	Analisis Neraca Pemerintah Pusat – Tingkat Wilayah	43
2.2	Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)	46
2.2.1	Pendapatan Daerah	46
2.2.2	Belanja Daerah	48
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	49
2.2.4	Pembiayaan Daerah	50
2.2.5	Perkembangan BLU Daerah	51
2.2.6	Isu Strategi Pelaksanaan APBD	52
2.3	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	52
2.3.1	Pendapatan Konsolidasian	53
2.3.2	Belanja Konsolidasian	54
2.3.3	Surplus/Defisit Konsolidasian	54
2.3.4	Pembiayaan Konsolidasian	54
2.3.5	Isu Strategis Pelaksanaan APBD (Tindak Lanjut DAMS)	54





Daftar Isi

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

56

3.1	Gambaran Umum UMKM di Provinsi Bengkulu	58
3.1.1	Sebaran UMKM di Provinsi Bengkulu	59
3.1.2	Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	59
3.2	Ruang Lingkup dan Kendala Pemberdayaan UMKM	60
3.3	Dukungan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM	62
3.3.1	Dukungan berdasarkan Klasterisasi UMKM	62
3.3.2	Strategi Pemberdayaan UMKM	63
3.3.3	Skema Pembiayaan terhadap UMKM	64
3.4	Analisis Kendala dan Kebutuhan Pemberdayaan UMKM dengan Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah	68
3.4.1	Analisis Kendala Pemberdayaan UMKM	68
3.4.2	Dukungan dalam Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu	69
3.4.3	Kegiatan Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu	71

BAB IV ANALISIS TEMATIK: IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DAN PP NO. 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PDRD

73

4.1	Pendahuluan	75
4.2	Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah	77
4.3	Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD beserta Tindak Lanjut Pemerintah Daerah	78
4.4	Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan Local Taxing Power	80
4.5	Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan Local Taxing Power (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024	82
4.5.1	Perkembangan Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota	82
4.5.2	Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota	84
4.5.3	Perkembangan LTR Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota	90
4.6	Analisis Pengaruh Good Governance Practices terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Local Taxing Power) di Provinsi Bengkulu	92
4.6.1	Latar Belakang	92
4.6.2	Landasan Teori	92
4.6.3	Kerangka Berpikir Penelitian	93
4.6.4	Metode Penelitian	93
4.6.5	Hasil Penelitian	93
4.6.6	Kesimpulan Penelitian	94
4.6.7	Rekomendasi Penelitian	95

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

96

5.1	Kesimpulan	98
5.2	Rekomendasi	101





Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi September 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (2022=100)	8
Tabel 1.2	Rincian Andil Inflasi Bulan September 2024 per Komoditas 2024 secara y-o-y (Persen)	8
Tabel 1.3	Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2022 s.d. Maret 2024 (Rupiah)	14
Tabel 1.4	Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya per Maret 2024 (Persen)	14
Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi dan Growth Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)	28
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.4	Pagu dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	30
Tabel 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Sektor di Bengkulu Triwulan III 2024	31
Tabel 2.6	Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai per Sektor di Bengkulu Triwulan III (dalam Miliar Rupiah)	31
Tabel 2.7	Perkembangan <i>Tax Ratio</i> Triwulan III 2023 dan 2024	32
Tabel 2.8	Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Tabel 2.9	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	35
Tabel 2.10	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	35
Tabel 2.11	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	36
Tabel 2.12	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	38
Tabel 2.13	Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Rupiah)	40
Tabel 2.14	Pagu dan Realisasi Program Prioritas Nasional Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	41
Tabel 2.15	Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	41
Tabel 2.16	Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan III 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)	43
Tabel 2.17	Neraca LKPP Regional Bengkulu (dalam Rupiah)	44
Tabel 2.18	Belanja Modal Pemerintah Pusat (dalam Rupiah)	45
Tabel 2.19	Realisasi PNBP 2022-2023 (dalam Rupiah)	45
Tabel 2.20	Realisasi PNBP 2022-2023 (dalam Rupiah)	45
Tabel 2.21	Perkembangan Realisasi PNBP 2022-2023 (dalam Rupiah)	46
Tabel 2.22	Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)	46





Daftar Tabel

Tabel 2.23	Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	47
Tabel 2.24	Analisis <i>Tax Ratio</i> APBD Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan III Tahun 2024	48
Tabel 2.25	Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024	48
Tabel 2.26	Belanja Operasi APBD Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	49
Tabel 2.27	Surplus/Defisit Seluruh Pemda Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024	50
Tabel 2.28	Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	50
Tabel 2.29	Kegiatan Asistensi & Pembinaan BLUD Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2024	52
Tabel 2.30	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	53
Tabel 2.31	Analisis <i>Tax Ratio</i> Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan III Tahun 2024	54
Tabel 2.32	Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan III Tahun 2024	54
Tabel 3.1	Skema Umum Penyaluran KUR	64
Tabel 3.2	Penyaluran KUR Provinsi Bengkulu per Sektor tahun 2023-2024 (dalam Rupiah)	65
Tabel 3.3	Penyaluran UMI Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2023-2024 (dalam Rupiah)	67
Tabel 3.4	Alokasi Belanja K/L untuk Pemberdayaan UMKM (dalam Rupiah)	67
Tabel 3.5	Alokasi Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK (dalam Rupiah)	68
Tabel 3.6	Alokasi Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Sentra IKM (dalam Rupiah)	68
Tabel 3.7	Jumlah UMKM Binaan Lingkup Kanwil DJPb Bengkulu	70
Tabel 4.1	Struktur PDRD dalam UU HKPD	76
Tabel 4.2	Progres Penyelesaian Penyusunan Perda PDRD Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu	77
Tabel 4.3	Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pemda	79
Tabel 4.4	Hasil Reviu Penguatan <i>Local Taxing Power</i> di Provinsi Bengkulu	80
Tabel 4.5	Daftar Penyelesaian Perda terkait Potensi PDRD	84
Tabel 4.6	Penerimaan berdasarkan jenis pajak Pemkab/Pemkot di Bengkulu 2017-Sept 2024 (dalam Miliar Rupiah)	86
Tabel 4.7	Penerimaan berdasarkan jenis retribusi Pemprov Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024 (dalam Miliar Rupiah)	87
Tabel 4.8	Penerimaan berdasarkan jenis retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024 (dalam Miliar Rupiah)	88
Tabel 4.9	Perkembangan LTR Pemerintah Prov. Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu 2017-2024 (dalam Miliar Rupiah)	90
Tabel 4.10	Hasil <i>Summary Interpretasi</i>	93





Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu Triwulan III 2024	3
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021 s.d. Triwulan III 2024 secara y-on-y (Persen)	4
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021 s.d. Triwulan III 2024 secara q-to-q (Persen)	4
Grafik 1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2024 secara y-on-y (Persen)	5
Grafik 1.5	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran secara q-to-q dan y-on-y (Persen)	5
Grafik 1.6	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara q-to-q dan y-on-y (Persen)	6
Grafik 1.7	Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Bengkulu Triwulan III 2024 (Miliar)	7
Grafik 1.8	Perbandingan Distribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Triwulan III Tahun 2024 secara y-on-y (Persen)	7
Grafik 1.9	Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2024 secara y-o-y (Persen)	8
Grafik 1.10	Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2024 secara m-to-m (Persen)	9
Grafik 1.11	Inflasi pada 10 Provinsi di Regional Sumatera per September 2024 secara y-o-y (Persen)	10
Grafik 1.12	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 Menurut Kelompok Pengeluaran secara y-o-y (Persen)	10
Grafik 1.13	Perkembangan Neraca Perdagangan (Hanya Ekspor) Provinsi Bengkulu 2022 s.d. Triwulan III (Juta USD)	11
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2022 s.d. Triwulan III 2024 secara m-to-m (Juta USD)	11
Grafik 1.15	Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)	12
Grafik 1.16	Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Agustus 2024 dan September 2024 (Juta USD)	12
Grafik 1.17	Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan per September 2024 (Juta USD)	12
Grafik 1.18	Tren Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2019 s.d. Maret 2024 (Ribu Jiwa dan Persen)	13
Grafik 1.19	Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan per September 2024 (Juta USD)	13
Grafik 1.20	Tren Kemiskinan Kota dan Desa Maret 2022 s.d. Maret 2024 (Persen dan Ribu Jiwa)	15
Grafik 1.21	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Bengkulu dan Nasional Periode Agustus 2020 - Agustus 2024 (Persen)	16
Grafik 1.22	Persentase TPT di Pulau Sumatera per Agustus 2024 (Persen)	16
Grafik 1.23	Proporsi Pekerja Formal dan Informal Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (Persen)	17





Daftar Grafik

Grafik 1.24	Distribusi dan Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan (Persen dan Ribu Orang)	17
Grafik 1.25	TPT Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah 2020-2024 (Persen)	18
Grafik 1.26	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu (Persen)	18
Grafik 1.27	TPT Menurut Pendidikan per Agustus 2024 (Persen)	18
Grafik 1.28	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Maret 2020-Maret 2024	19
Grafik 1.29	Tren Gini Ratio di Pulau Sumatera per Maret 2024	19
Grafik 1.30	Perbandingan Perkembangan NTP Bengkulu dengan Nasional Januari 2022 – September 2024	20
Grafik 1.31	Perbandingan Perkembangan NTN Bengkulu dengan Nasional Januari 2022 – September 2024	22
Grafik 2.1	Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan III Tahun 2024	28
Grafik 2.2	Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2024	28
Grafik 2.3	Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan III, 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)	34
Grafik 2.4	Perbandingan Belanja Pempus dan TKD Triwulan III, 2023-2024	34
Grafik 2.5	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per K/L, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.6	Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.7	Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)	40
Grafik 2.8	Jumlah BLU Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024	51
Grafik 2.9	Progress BLU/D Puskesmas per Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024	51
Grafik 3.1	Tren Perkembangan Jumlah UKM di Prov. Bengkulu tahun 2012-2024	59
Grafik 3.2	Penyaluran KUR Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2024	65
Grafik 3.3	Penyaluran UMI Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2024 (dalam Rupiah)	66
Grafik 3.4	Persentase sektor usaha UMKM Binaan Kanwil	71
Grafik 4.1	Perkembangan Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kab./Kota Tahun 2017 s.d. September 2024 (dalam Rupiah)	83
Grafik 4.2	Penerimaan berdasarkan jenis pajak Pemprov Bengkulu 2017-Sept 2024	85
Grafik 4.3	Tren Penerimaan berdasarkan jenis retribusi Pemprov Bengkulu 2017-September 2024	88
Grafik 4.4	Tren Penerimaan berdasarkan Jenis Retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024	89
Grafik 4.5	Tren LTR Pemerintah Prov. Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu 2017-2024	91





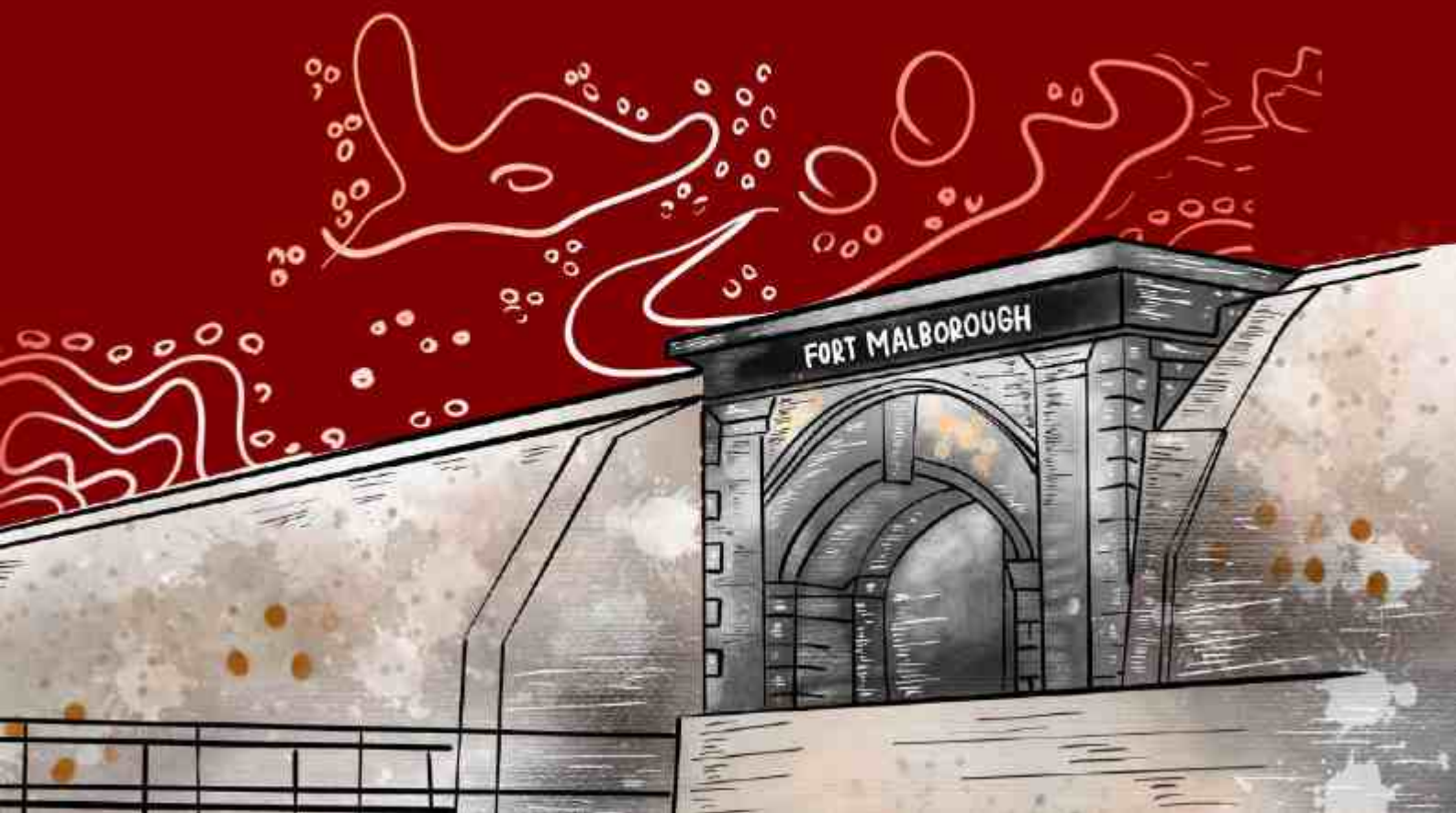
Daftar Gambar

Gambar 3.1	Analisis <i>Fishbone</i> terhadap perkembangan para pelaku UMKM di Bengkulu	69
Gambar 4.1	Kerangka Berpikir Penelitian	93



Visi pembangunan Provinsi Bengkulu adalah

*"Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil
dan demokrasi bertumpu Pada sumber
daya manusia unggul dan bertaqwa
Serta perekonomian kokoh"*





Ringkasan Eksekutif

Analisis Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan III tahun 2024 **tumbuh positif** sebesar 4,57 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mencapai 4,95 persen (yoy) terpaut sebesar 0,38 persen poin dan menempati posisi ke 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Jika dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal, PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2024 telah mencapai Rp25,82 triliun dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai Rp13,55 triliun **meningkat dibandingkan tahun sebelumnya**. Secara spasial PDRB Bengkulu berkontribusi sebesar 2,08 persen terhadap PDRB regional Sumatera (terendah se-Sumatera) dan hanya berkontribusi 0,09 persen terhadap PDB Nasional. Perkembangan ekonomi di Bengkulu dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 29,91 persen** dari total PDRB dan tumbuh 1,64 persen (yoy). Sementara dari sisi pengeluaran, **konsumsi rumah tangga (PK_RT)** menjadi komponen penyumbang terbesar sebesar 59,82 persen dari total PDRB dan tumbuh 5,06 persen (yoy).

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 1,48 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,40 persen, berada dibawah target nasional 2,5 plus minus 1 persen (yoy). Inflasi di Bengkulu dipicu oleh **kenaikan indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,56 persen**, utamanya sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,29 persen dan beras 0,13 persen. Secara bulanan Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,28 persen (mtm) yang dipicu oleh penurunan harga komoditas hortikultura (cabai merah, tomat, cabai rawit), bensin, dan telur ayam ras. Deflasi di Provinsi Bengkulu telah terjadi 4 (empat) bulan berturut-turut sejak bulan Juni 2024. Neraca perdagangan di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 sebesar US\$12,64 Juta yang hanya ditopang oleh nilai ekspor tanpa impor sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Pada indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi yaitu 13,56 persen namun mengalami tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. **Gini ratio** sebesar 0,342 mengalami sedikit kenaikan namun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Tingkat pengangguran yang menurun dari periode sebelumnya hingga mencapai 3,11 persen dibawah angka TPT nasional yang mencapai 4,91 persen. **Nilai Tukar Petani** pada triwulan III tahun 2024 mencapai 190,15 **meningkat 2,68 persen dari bulan sebelumnya** dan **Nilai Tukar Nelayan** mencapai 109,24 **naik 1,43 persen dari bulan sebelumnya**. NTP dan NTN Provinsi Bengkulu lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 120,3 dan 101,98. Berdasarkan indikator kesejahteraan Provinsi Bengkulu terus memunjukkan perbaikan, hal ini ditunjukkan pula oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai 74,30 sedikit dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,39.

Analisis Fiskal Regional

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan III tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan negara telah mencapai Rp2.464,58 miliar atau 73,95 persen dari target yang ditetapkan, tumbuh sebesar 6,80 persen dari capaian pada tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pendapatan perpajakan dalam negeri tumbuh positif ditopang oleh realisasi PPN yang tumbuh 27,8 persen dengan kontribusi 54,14 persen. Di sisi Belanja Negara juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 11,40 persen dengan realisasi sebesar Rp11.692,21 miliar atau 69,74 persen dari pagu. Pertumbuhan Belanja Negara terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat (11,30 persen) maupun Transfer ke Daerah (11,50 persen). Realisasi Belanja Negara yang impresif ini didorong oleh kenaikan gaji ASN, pelaksanaan pemilihan umum, dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak, serta kenaikan pagu baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah.





Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan III tahun 2024 diwarnai oleh pertumbuhan realisasi pendapatan maupun belanja. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9.168,39 miliar atau 68,86 persen dari target serta mengalami kenaikan 13,90 persen dari pencapaian pada tahun sebelumnya. Sedangkan penyerapan belanja daerah terealisasi Rp8.031,3 miliar atau 58,28 persen dari target dan mengalami kenaikan 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer yang mencapai 12,90 persen sedangkan realisasi PAD mengalami kontraksi 5,67 persen dikarenakan sebagian besar kabupaten/kota di Bengkulu **terlambat menyelesaikan Perda tentang PDRD pada awal tahun 2024** sehingga tidak dapat melakukan pemungutan PDRD sampai terbitnya Perda dimaksud. Pemerintah Daerah perlu mengejar pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap APBN melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. Realisasi belanja daerah juga perlu terus di dorong dari sisi penyerapan maupun proporsi yang lebih ideal terkait alokasi belanja pegawai maupun belanja modal sesuai amanat UU HKPD.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Jumlah UMKM di Bengkulu terus meningkat dan pada saat ini tercatat sebanyak 89.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Bengkulu telah terdaftar dalam Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PLKUMKM). Peran UMKM yang besar sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, terus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keseriusan ini tertuang salah satunya dalam amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam mengimplementasikan amanat tersebut kolaborasi antara Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu bersama KPPN dan Kemenkeu Satu Bengkulu, serta seluruh Stakeholder terkait, telah dilakukan beberapa kegiatan agar UMKM naik kelas antara lain sosialisasi dan fasilitasi akses permodalan melalui kredit program pemerintah (KUR dan UMI), peningkatan kapasitas UMKM, pendampingan legalitas usaha, peningkatan kualitas produk dan daya saing, serta digitalisasi dan globalisasi pemasaran produk UMKM. Selama tahun 2024, beberapa kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Keuangan Satu Provinsi Bengkulu yaitu: melakukan profiling UMKM, menyelenggarakan sosialisasi dan penampungan sertifikasi halal, pendaftaran HKI, perpajakan UMKM, dan digital payment, menyelenggarakan bazar UMKM, serta mengikutsertakan UMKM dalam bazar UMKM yang diselenggarakan unit lain.

Analisis Tematik: Implementasi Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) **bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi lokal**. Implementasi strategi penguatan *local taxing power* di Bengkulu tergolong masih rendah, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan dari berbagai sisi. Melalui sinergi antara regulasi, teknologi, SDM, dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi pajak lokal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Local Tax Ratio (LTR) Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan 2023 cenderung berfluktuasi. Setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 di level 0,766 persen akibat pandemi Covid-19, LTR Provinsi Bengkulu kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 tetapi kembali menurun ke level 0,857 persen pada tahun 2023. Untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan II berada di level 0,002 persen sehingga diprediksi tahun 2024 LTR Provinsi Bengkulu akan kembali menurun. Sementara LTR Kabupaten/Kota menunjukkan tren peningkatan tipis selama 4 (empat) tahun terakhir. Namun mempertimbangkan kontraksi PAD sampai dengan triwulan III 2024 yang cukup dalam, LTR Kabupaten/Kota pada tahun 2024 juga diprediksi menurun. Untuk mengejar kinerja PAD yang lebih baik, Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan seluruh regulasi maupun sistem yang diperlukan dalam rangka penerapan secara penuh UU HKPD dan PP tentang Ketentuan Umum PDRD utamanya dalam penguatan *local taxing power*.

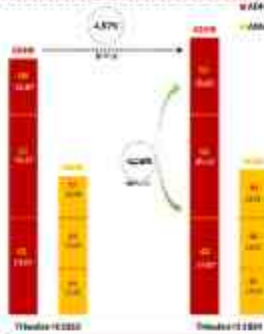


DASHBOARD MAKRO-KESRA

INDIKATOR MAKRO EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2024

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (diolah)

PDRB BENGKULU TW III TAHUN 2024



ATAS DASAR HARGA BERLAKU

24,67 T

ATAS DASAR HARGA KONSTAN

13,02 T

KONTRIBUSI PDRB PROVINSI BENGKULU TERHADAP PULAU SUMATERA PADA TRIWULAN III-2024 (y-o-y)

Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera sebesar **2,08 persen** dan sebesar **0,09 persen** terhadap pertumbuhan Indonesia, dengan pertumbuhan sebesar **4,57 persen**



KONTRIBUSI

2,08%

PERTUMBUHAN

4,57%

PERTUMBUHAN EKONOMI BENGKULU

y-on-y **4,57%** q-to-q **-2,56%**



TINGKAT INFLASI PROVINSI BENGKULU

y-on-y **1,48%** m-to-m **-0,28%**



LAJU DAN DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB (Y-ON-Y)



INFLASI DAN ANDIL BERDASARKAN KELOMPOK (Y-ON-Y)



INDIKATOR KESEJAHTERAAN TRIWULAN III TAHUN 2024

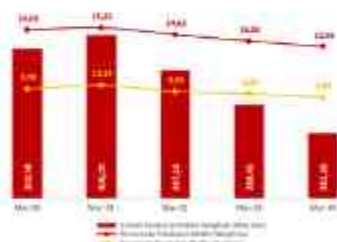
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

TINGKAT KEMISKINAN

*per Maret 2024

13,56%

JUMLAH PENDUDUK MISKIN
281,36 RIBU JIWA
PEDESAAN
186,69 RIBU JIWA
PERKOTAAN
94,67 RIBU JIWA

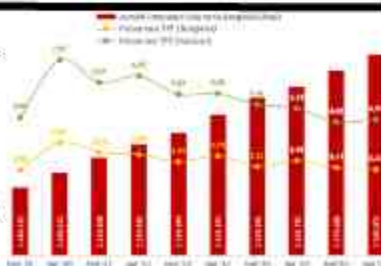


TINGKAT PENGANGGURAN

*per Agustus 2024

3,11%

PENDUDUK USIA KERJA
1.585.001 JIWA
ANGKATAN KERJA
1.136.573 JIWA
BUKAN ANGKATAN KERJA
448.428 JIWA

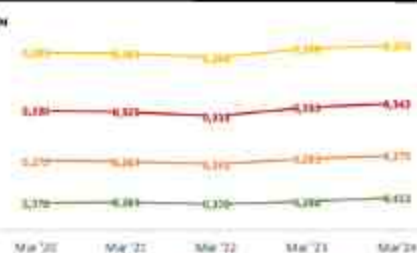


TINGKAT KETIMPANGAN (GINI RASIO)

*per Maret 2024

0,342

ARTINYA KETIMPANGAN PENGELUARAN PER KAPITA PENDUDUK PROVINSI BENGKULU CENDERUNG MENURUT
PEDESAAN
0,275
PERKOTAAN
0,413

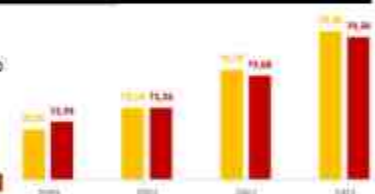


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

*per Maret 2023

74,30

UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR
73,11 TAHUN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
9,03 TAHUN
HARAPAN LAMA SEKOLAH
13,74 TAHUN



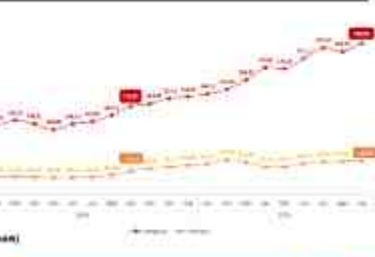
PENGELUARAN RIIL PER KAPITA PER TAHUN YANG DISESUAIKAN
Rp11.172.000,00

*per September 2024

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

190,15

INDEKS YANG DITERIMA PETANI (IT)
236,88
INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (IB)
124,57
NTUP*
188,58

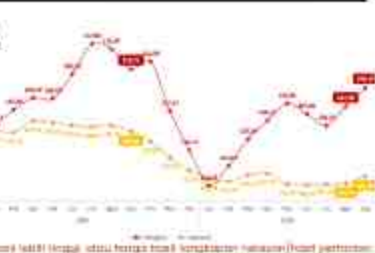


*per September 2024

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

109,24

INDEKS YANG DITERIMA NELAYAN (IT)
109,24
INDEKS YANG DIBAYAR NELAYAN (IB)
109,24





DASHBOARD FISKAL REGIONAL



KINERJA APBN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2024 (MILIAR RUPIAH)

Sumber: OMSPAN (diolah)

**REALISASI
PENDAPATAN**
Rp2.464,58 M
(73,95% dari target)

GROWTH
6,80%
(y-o-y)



**PENDAPATAN
PERPAJAKAN** **Growth**
7,50%
(y-o-y)

Penerimaan Dalam Negeri
Rp2.074,46 M
 Pajak Perdagangan
Internasional
Rp1,59 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp2.076,05 M 69,42%

**PENDAPATAN
NEGARA
BUKAN PAJAK** **Growth**
3,50%
(y-o-y)

PNPB Lainnya
Rp148,48 M
 Pendapatan BLU
Rp240,04 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp388,52 M 113,54%



GROWTH
11,40%
(y-o-y)

**REALISASI
BELANJA**
Rp11.692,21 M
(69,74% dari pagu)

**BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT** **Growth**
11,30%
(y-o-y)

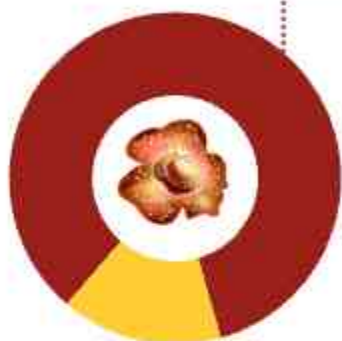
Belanja Pegawai
Rp1.596,00 M
 Belanja Barang
Rp1.455,40 M
 Belanja Modal
Rp498,94 M
 Belanja Sosial
Rp13,75 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp3.584,09 M 61,40%

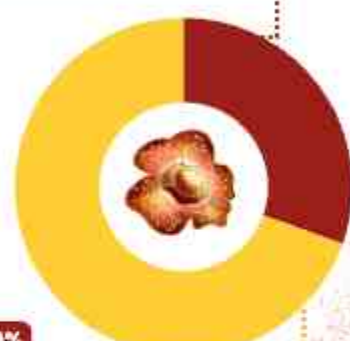
**TRANSFER KE
DAERAH (TKD)** **Growth**
11,50%
(y-o-y)

DTU
Rp5.609,70 M
 Dana Insentif Fiskal
Rp52,81 M
 DTK
Rp1.484,01 M
 Dana Desa
Rp981,61 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp8.128,12 M 74,15%



DEFISIT
Rp9.227,63 M
12,75% (yoy)



KINERJA APBD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2024 (MILIAR RUPIAH)

Sumber: SIKRI (diolah)

**REALISASI
PENDAPATAN**
Rp9.168,39 M
(68,86% dari target)

GROWTH
13,90%
(y-o-y)



**PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)** **Growth**
-5,36%
(y-o-y)

Pajak Daerah
Rp804,55 M
 Retribusi Daerah
Rp25,84 M
 Pengelolaan
PAD
Rp27,43 M
 Lain-Lain PAD
yang SAH
Rp203,98 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp1.061,8 M 56,94%

**LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH** **Growth**
360,53%
(y-o-y)

Terealisasi:
TOTAL: Rp203,98 M 175,77%

**PENDAPATAN
TRANSFER** **Growth**
14,81%
(y-o-y)

Terealisasi:
TOTAL: Rp7.902,61 M 69,73%

GROWTH
6,90%
(y-o-y)

**REALISASI
BELANJA**
Rp8.031,30 M
(58,28% dari pagu)

**BELANJA
OPERASI** **Growth**
8,13%
(y-o-y)

Belanja Pegawai
Rp3.747,81 M
 Belanja Barang dan Jasa
Rp1.695,97 M
 Belanja Hibah
Rp510,07 M
 Belanja Sosial
Rp4,76 M

Terealisasi:
TOTAL: Rp5.958,61 M 60,14%

**BELANJA
MODAL** **Growth**
-0,61%
(y-o-y)

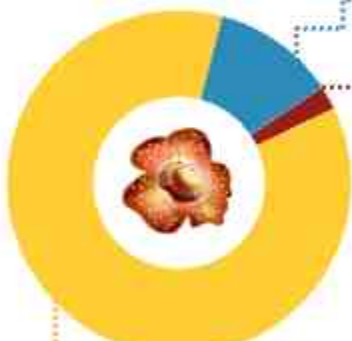
Terealisasi:
TOTAL: Rp802,67 M 41,89%

**BELANJA
TRANSFER** **Growth**
6,30%
(y-o-y)

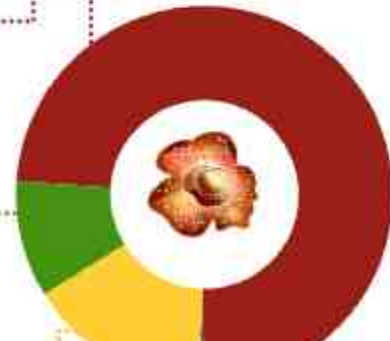
Terealisasi:
TOTAL: Rp1.269,41 M 66,05%

**BELANJA TAK
TERDUGA** **Growth**
-36,99%
(y-o-y)

Terealisasi:
TOTAL: Rp0,62 M 0,69%



SURPLUS
Rp1.137,09 M
111,99% (yoy)



BABI

ANALISIS EKONOMI REGIONAL





digambar oleh Azka M.E

Bunga RAFFLESIA

Padma raksasa (bahasa Latin: *Rafflesia arnoldii*) adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia ke-1. *Rafflesia arnoldii* ditemukan pada 1818 oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, di hutan tropis Sumatra. Bunga ini ditemukan pertama kali di suatu tempat dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dr. Joseph Arnold sendiri saat itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi penamaan bunga *Rafflesia arnoldii* didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.

sumber artikel : id.wikipedia.org



BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Dalam menyusun suatu kebijakan dan arah Pembangunan suatu daerah, Pemerintah membutuhkan informasi terkait perkembangan indikator ekonomi makro sebagai gambaran dinamika perekonomian yang terjadi dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Analisis terhadap Indikator ini setidaknya mampu memberikan gambaran tentang kinerja perekonomian suatu daerah serta memberikan petunjuk tren jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan Masyarakat secara luas sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan produk dan sumber daya.

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dan sasaran utama pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105).

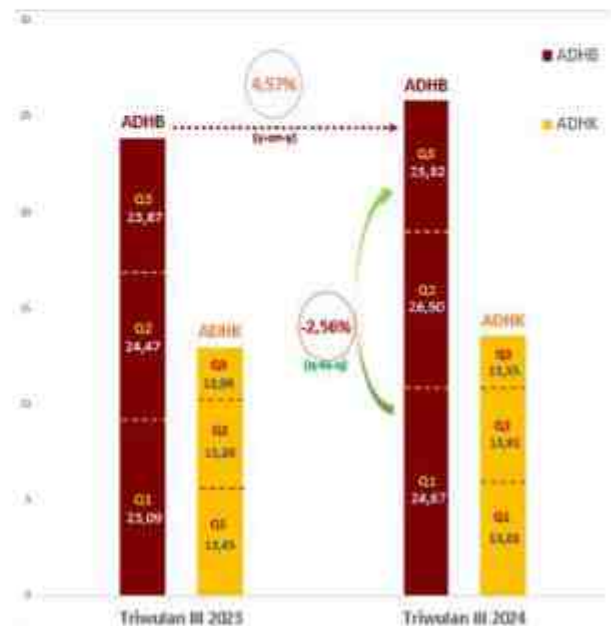
1.1.1.1 Besaran PDRB Bengkulu

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan III 2024 mencapai Rp25,82 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13,55 triliun. Sementara pada periode yang sama di Triwulan III 2023 (y-o-y), PDRB Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp23,87 triliun (ADHB) dan sebesar Rp12,96 triliun (ADHK).

"Uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus menjaga kepercayaan itu."

-Sri Mulyani-

Grafik 1.1 Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu
Triwulan III 2024.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/17/Th. XXII, 5 November 2024 (diolah)

1.1.1.2 Pertumbuhan PDRB Bengkulu

Perekonomian global sampai dengan triwulan III 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen karena suku bunga *The Fed* dan *European Central Bank* (ECB) masih tinggi yang memberikan tekanan pada sektor keuangan global berdampak pada ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus *capital flow* (modal keluar) di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini akibat **belum meredanya tensi geopolitik** di Kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang masih membayangi ekonomi global dan perlu diwaspadai (*World Economic Outlook*, IMF, April 2024). Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, **Perekonomian Provinsi Bengkulu masih Tangguh** dengan pertumbuhan yang stabil dan laju inflasi yang melambat. Hal ini tercermin dari nilai pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang mengalami pertumbuhan secara y-on-y, meskipun menurun secara q-to-q.



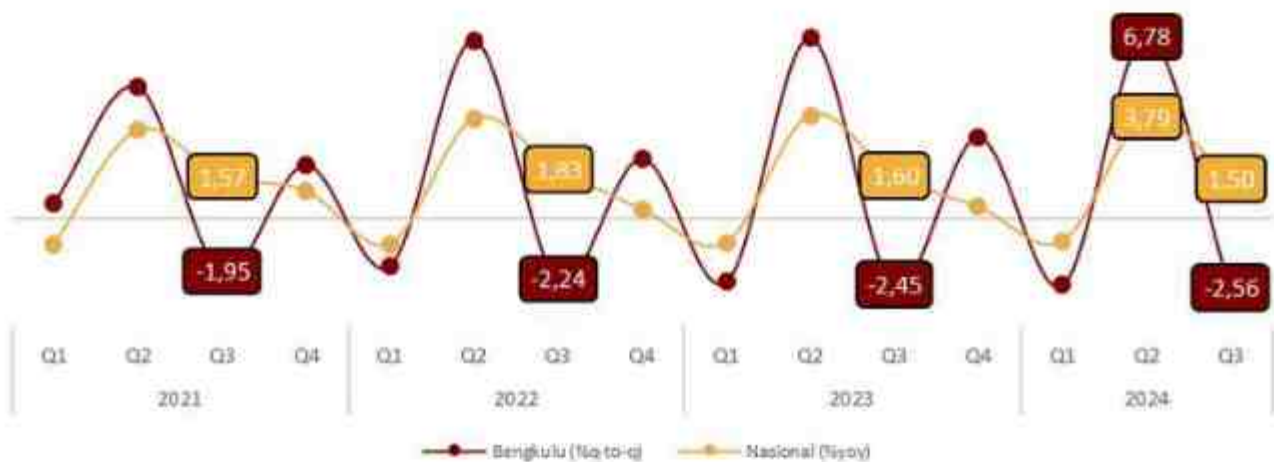


Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021 s.d. Triwulan III 2024 (%y-o-y)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/1/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021 s.d. Triwulan III 2024 (%q-to-q)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/1/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Berdasarkan pendekatan y-on-y, Kinerja Perekonomian Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,64 persen. Namun angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 4,95 persen (yoy) terpaut sebesar 0,38 persen poin di bawah pertumbuhan secara nasional.

Berdasarkan pendekatan q-to-q, Kinerja Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024 terhadap triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen (q-to-q). Kontraksi ini disumbang dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar minus 12,45

persen yang disebabkan oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas Masyarakat setelah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar minus 8,66 persen akibat perlambatan belanja pemerintah pada sejumlah Lembaga, seperti Kementerian PUPR, KPU dan Bawaslu karena tahapan Pilkada yang baru berjalan serta kendala teknis, seperti izin material pada proyek jalan Enggano.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan III 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 59,82 persen. Pertumbuhan di triwulan III 2024 disebabkan oleh Meningkatnya produksi beberapa komoditas hortikultura, seperti cabe dan tomat karena terjadinya panen raya yang didukung oleh cuaca dan minimnya hama.





Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2024 secara y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan III 2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,48 persen. Secara spasial, Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi di Pulau Sumatera, yakni sebesar 5,20 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 4,57 persen. Secara spasial, struktur perekonomian di Pulau Sumatera pada Triwulan III 2024 masih didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,54 persen; diikuti Provinsi Riau sebesar 22,94 persen; dan Sumatera Selatan sebesar 13,82 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu hanya memiliki kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,08 persen (terendah se-Sumatera). Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan III 2024 tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu investasi (pengaruh terbesar), belanja pemerintah, serta ekspor nonmigas. Pada beberapa provinsi di Sumatera, sektor pertanian dan industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan, terutama karena penguatan investasi di sektor-sektor tersebut. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, sektor jasa, terutama akomodasi dan

makanan-minuman, tumbuh cukup kuat berkat meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi lokal dampak digelarnya PON XXI sebagai tuan rumah. Di Provinsi Bengkulu sendiri pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya Peningkatan aktivitas organisasi kebudayaan selama pelaksanaan festival tabut yang mendorong meningkatnya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja pemerintah daerah menjelang Pilkada dan belanja pada infrastruktur publik juga memperkuat sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat.

1.1.1.3 PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Menurut pengeluaran seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif pada triwulan III 2024 (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT sebesar 10,64 persen; diikuti komponen PK-P sebesar 6,13 persen; PK-RT sebesar 5,06 persen; PMTB sebesar 4,61 persen; dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,39 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 3,16 persen.

Grafik 1.5 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran secara q-to-q dan y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan III 2024 mencapai Rp25,82 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13,55 triliun.





Grafik 1.6 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara q-to-q dan y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/77/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan III-2024 dibanding Triwulan III-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha (16 lapangan usaha), kecuali satu lapangan usaha yaitu industri pengolahan yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus (pertumbuhan negatif) sebesar 2,38 persen (yoy). Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,66 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 9,61 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,57 persen. Kemudian, lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar minus 2,38 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,64 persen.



Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor dominan di Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2024 berkontribusi sebesar 29,91 persen dari PDRB dan tumbuh positif sebesar 1,64 persen dipengaruhi oleh; Meningkatnya produksi jagung dan ubi kayu; Meningkatnya produksi beberapa komoditas hortikultura, seperti cabe dan tomat karena terjadinya panen raya yang didukung oleh cuaca dan minimnya hama; Masuknya musim panen kopi; Peningkatan produksi telur dan daging ayam; Panen raya ikan air tawar seperti lele, nila dan emas serta ikan laut seperti tamban (sejenis sarden); Pertumbuhannya produksi padi akibat terkendala serangan hama dan terbatasnya produksi TBS sawit akibat musim kemarau.



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada Triwulan III 2024 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan mengalami pertumbuhan tertinggi diantara 16 lapangan usaha lainnya yaitu tumbuh sebesar 9,66 persen (yoy) meskipun hanya berkontribusi sebesar 1,88 persen terhadap total PDRB. Peningkatan ini didukung oleh; Meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel; Penyelenggaraan berbagai event seperti Festival Tabut dan Festival Budaya Ayiak Manna serta berbagai kegiatan musyawarah wilayah (muswil), musyawarah cabang (muscab) dan rapat konsolidasi mendorong peningkatan aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum; Telah dibukanya beberapa gerai franchise besar makanan dan minuman pada tahun 2024 seperti starbucks, fore, marugame, yoshinoiya, dll.



Jasa Lainnya

Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebagai lapangan usaha kedua yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,61 persen (yoy) dan berkontribusi sebesar 0,96 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan ini sejalan dengan; Pelaksanaan kegiatan seperti festival tabut mendorong peningkatan pada aktivitas organisasi kebudayaan; dan pelaksanaan berbagai kegiatan musyawarah wilayah (muswil), musyawarah cabang (muscab) dan rapat konsolidasi mendorong peningkatan aktivitas organisasi sosial, organisasi profesi maupun parpol.



Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi pada Triwulan III 2024 tumbuh sebesar 9,57 persen (yoy) dan berkontribusi sebesar 3,04 persen terhadap PDRB, pertumbuhan ini didukung oleh; Meningkatnya output perbankan yang meliputi pendapatan utama, pendapatan sekunder dan provisi/komisi; Meningkatnya





jumlah investor pada perusahaan efek dan nilai transaksi saham.



Industri Pengolahan

Berbeda dengan seluruh lapangan usaha lainnya, Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Triwulan III 2024 justru mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,38 persen (yoy) yang disebabkan oleh: Menurunnya kinerja industri makanan dan minuman, khususnya CPO karena terbatasnya pasokan bahan baku TBS sawit akibat musim kemarau; dan Menurunnya kinerja industri karet, barang dari karet dan plastik karena berkurangnya pasokan bahan baku karet. Lapangan usaha industri berkontribusi cukup besar terhadap total PDRB yaitu sebesar 5,27 persen

1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

Kontribusi Fiskal atau pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adalah bagian dari komponen pengeluaran yang menunjukkan peran belanja publik dalam membangun dan mengembangkan perekonomian suatu daerah. Dalam perhitungan PDRB dari sisi pengeluaran, kontribusi fiskal mencakup anggaran yang digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta program kesejahteraan sosial.

Grafik 1.7 Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Bengkulu Triwulan III 2024 (Miliar)



Sumber: Laporan ALCo Realisasi s.d. 30 September 2024, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu (diolah)

Perhitungan PDRB dirumuskan dengan $Y = C+I+G+NX$. Belanja fiskal Pemerintah yang berkontribusi terhadap PDRB setidaknya berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) yang diproyeksikan oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) dan belanja investasi (I) yang diproyeksikan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Peran pemerintah dalam hal ini tercermin melalui APBN dan APBD, yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembentukan PDRB.

1. Hingga 30 September 2024, operasi pemerintah di regional memberikan kontribusi sebesar Rp12.686,38 miliar pada sektor riil, dengan belanja pemerintah sebesar Rp10.825,76 miliar sebagai komponen terbesar, Ekspansi moneter mencapai Rp106,86 miliar, diikuti dengan peningkatan jumlah uang beredar. Pada sektor eksternal, neraca pembayaran mencatat kontribusi sebesar Rp1.595,325 miliar.
2. Pendapatan pemerintah mencapai Rp3.427,6 miliar pada September, terutama dari pajak korporasi sebesar 79,57% dari total penerimaan perpajakan. Sementara itu, belanja pemerintah Rp11.981,83 miliar, dengan defisit yang juga naik menjadi Rp8.555,83 miliar.

Grafik 1.8 Perbandingan Distribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Triwulan III Tahun 2024 secara y-on-y (Persen)



■ Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)
■ Pembentukan Modal Tetap Bruto

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Berdasarkan pendekatan di atas, belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2024 berkontribusi terhadap pembentukan PDRB (ADHB) paling sedikit sebesar Rp14.352,69 miliar yang berasal dari penjumlahan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) sebesar Rp4.192,32 miliar dan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp10.160,37 miliar.

Jika dibandingkan triwulan III 2024 dengan triwulan III 2023 (y-on-y), kontribusi pemerintah pada komponen PK-P mengalami kenaikan 0,08 persen poin. Namun mengalami penurunan pada komponen PMTB sebesar 0,95 persen poin. Dari dua komponen kontribusi pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan PDRB Bengkulu di triwulan III 2024, komponen PMTB memiliki kontribusi lebih besar daripada komponen P-KP. Hal ini didorong oleh Masih berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai proyek konstruksi kontrak tahun





jamak (multiyears) seperti Trans Enggano dan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Benteng Kobema; Proyek pembangunan rumah sakit, pelabuhan perikanan dan jalan/jembatan/irigasi di kabupaten/kota; Meningkatnya realisasi pengadaan semen; Meningkatnya realisasi belanja modal (APBN) untuk Jalan, Jaringan, dan Irigasi, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya; dan Meningkatnya pembelian baru jenis kendaraan usaha seperti microbus, pick up dan blind van.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) di atas meliputi belanja pegawai ditambah belanja penyusutan sebesar 20 persen dari belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja konsumsi rumah tangga berasal dari belanja pemerintah total sampai dengan periode akhir triwulan III 2024 dikurangi belanja P-KP dan belanja modal pemerintah pembentuk PMTB. Sementara PMTB merupakan realisasi belanja pemerintah untuk belanja modal.

1.1.3 Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

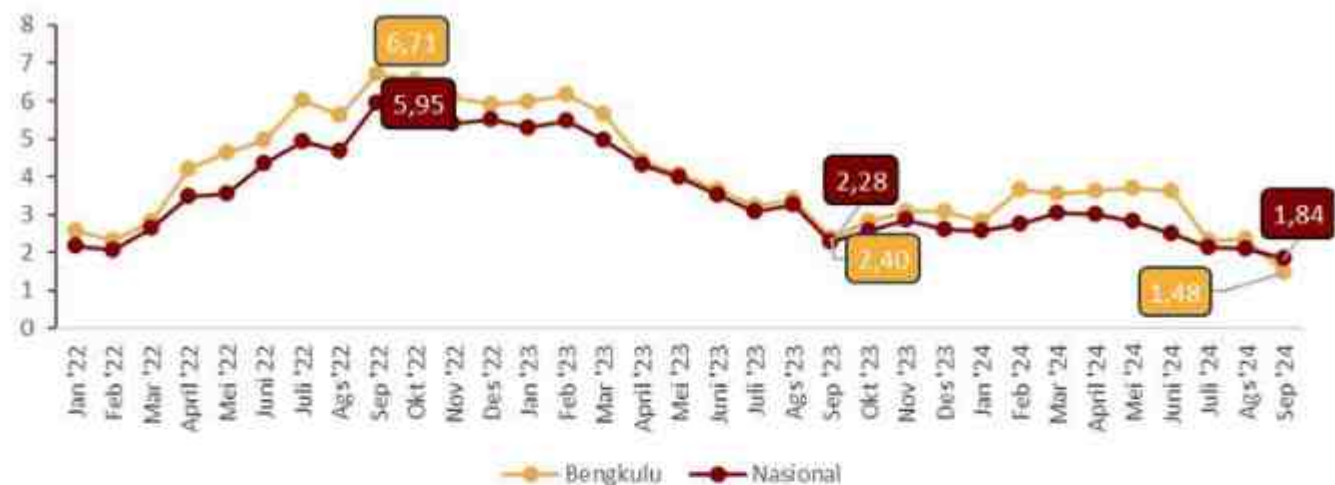
Analisis inflasi dibutuhkan untuk memahami keseimbangan ekonomi dan melihat kemampuan daya beli serta kesejahteraan Masyarakat di suatu regional. Pada tahun 2024, BPS Provinsi Bengkulu menambah daerah yang menjadi wilayah pemantauan inflasi, yang pada awalnya hanya Kota Bengkulu bertambah 1 Kabupaten lain yaitu Kabupaten Mukomuko.

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi September 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (2022=100)

Daerah Perhitungan Inflasi	September 2024			
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi y-to-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Muko Muko	104,19	0,38	-0,73	-0,67
Kota Bengkulu	105,90	1,84	0,74	-0,17
Provinsi	105,48	1,48	0,38	-0,28

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 54/10/17/Th. XXVI, 1 Oktober 2024 (diolah)

Grafik 1.9 Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2024 secara y-o-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No: 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Pada bulan September 2024, tingkat inflasi Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun (y-o-y) sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,48. Diwakili oleh tingkat inflasi y-on-y Kota Bengkulu sebesar

1,84 persen dengan IHK sebesar 105,90 sebagai inflasi tertinggi, dan di Kabupaten Mukomuko sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 104,19.

Tabel 1.2 Rincian Andil Inflasi Bulan September 2024 per Komoditas 2024 secara y-o-y (Persen)

No	Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum		1,48 ▲	1,48
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,77 ▲	0,56





No	Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,77 ▲	0,56
2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,10 ▲	0,32
3	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,60 ▲	0,26
4	Transportasi	0,89 ▲	0,12
5	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,74 ▲	0,11
6	Pendidikan	1,04 ▲	0,06
7	Kesehatan	1,93 ▲	0,04
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,63 ▲	0,03
9	Pakaian dan Alas Kaki	0,24 ▲	0,01
10	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,29 ▲	0,01
11	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,69 ▼	-0,04

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 54/10/17/Th. XXVI, 1 Oktober 2024 (diolah)

Penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara y-on-y adalah:

1. Kelompok Makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,56 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,29 persen dan beras sebesar 0,13 persen.
2. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,32 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan sebesar 0,21 persen.
3. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil 0,26 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk sebesar 0,08 persen dan ayam goreng sebesar 0,05 persen.

Grafik 1.10 Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2024 secara m-to-m (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 54/10/17/Th. XXVI, 1 Oktober 2024 (diolah)

Pada bulan September 2024 Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Bengkulu sebesar 0,28 persen, deflasi terjadi dikarenakan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,78 pada Agustus 2024 menjadi 105,48 pada September 2024, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2024 sebesar 0,38 persen.

Deflasi pada September 2024 didorong oleh

menurunnya harga komoditas makanan, minuman dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,30 persen, adapun komoditas penyumbang deflasi antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam ras dan wortel yang sedang musim panen di sejumlah daerah sehingga mendorong ketersediaan stok, dan menyebabkan penurunan harga.





Grafik 1.11 Inflasi pada 10 Provinsi di Regional Sumatera per September 2024 secara y-o-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 (diolah)

Inflasi di Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 berada pada peringkat ke-enam di Regional Sumatera. Tiga kelompok terbesar yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan September 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 1,77 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya naik sebesar 6,10 persen; serta kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran naik sebesar 2,60 persen.

Grafik 1.12 Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 Menurut Kelompok Pengeluaran secara y-o-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 54/10/17/Th. XXVI, 1 Oktober 2024 (diolah)

Selanjutnya, jika dilihat dari rincian komoditas dengan andil inflasi terbesar bulan September 2024 (yoy) didominasi oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,29 persen), Emas Perhiasan (0,21 persen), Beras (0,13 persen), Sigaret Kretek Tangan (SKT) (0,12 persen), dan Kontrak Rumah (0,09 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh tahun ajaran baru yang berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi di daerah dan musim panen di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu yang turut menjaga stok beberapa komoditas sehingga kondisi sandang pangan tetap bisa terkendali dan stabil.

Salah satu upaya dalam menekan laju inflasi di Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 9 (Sembilan) Langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan monitoring serta antisipasi risiko perubahan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi komoditas pangan strategis;
2. TPID diwajibkan melaksanakan pemantauan stok pangan menjelang momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal 2024 dan kebutuhan pangan menyambut Tahun Baru 2025; Memantau hasil TPID beberapa triwulan terakhir untuk dijadikan acuan dalam menjaga stabilitas inflasi yang sudah baik 3 bulan terakhir (juni s.d. Agustus 2024); Mempersiapkan program unggulan untuk dilaporkan dalam laporan tahunan TPID; Perlunya penyusunan peta jalan TPID 2025-2027 Provinsi Bengkulu dan kabupaten kota; Mendorong setiap kabupaten kota untuk melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD); Mendorong setiap kabupaten kota untuk membentuk kios pangan bekerja sama dengan pedagang yang berlokasi di pasar utama dalam rangka pengendalian inflasi; Mendorong optimalisasi penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi; dan Mendorong identifikasi, pencatatan dan implementasi penggunaan APBD untuk program pengendalian inflasi pada setiap organisasi perangkat daerah.
3. untuk dijadikan acuan dalam menjaga stabilitas inflasi yang sudah baik 3 bulan terakhir (juni s.d. Agustus 2024);
4. Mempersiapkan program unggulan untuk dilaporkan dalam laporan tahunan TPID;
5. Perlunya penyusunan peta jalan TPID 2025-2027 Provinsi Bengkulu dan kabupaten kota;
6. Mendorong setiap kabupaten kota untuk melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD);
7. Mendorong setiap kabupaten kota untuk membentuk kios pangan bekerja sama dengan pedagang yang berlokasi di pasar utama dalam rangka pengendalian inflasi;
8. Mendorong optimalisasi penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi; dan
9. Mendorong identifikasi, pencatatan dan implementasi penggunaan APBD untuk program pengendalian inflasi pada setiap organisasi perangkat daerah.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan inflasi di Provinsi Bengkulu dapat terkendali melalui sinergi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh pihak sehingga dapat memperkuat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Perhatian penuh terus dilakukan guna menjaga angka inflasi yang sudah baik tersebut tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun, khususnya pada beberapa hal yakni dalam hal produksi pangan, faktor cuaca, distribusi dan hal penting lainnya terkait pengawasan pasar agar tidak ada gejolak.





1.1.4 Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor

Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 **surplus** sebesar USD12,64 juta, turun sebesar 10,03 persen (mtm) dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar USD14,05 juta (secara bulanan turun). Sedangkan neraca perdagangan pada bulan September

2023 mengalami **surplus** sebesar USD10,58 juta (yoy), angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 19,43 persen (yoy) bila dibandingkan September 2024 yang sebesar USD12,64 juta (secara tahunan naik). **Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu hanya ditopang oleh nilai ekspor, hal ini dikarenakan sejak September 2021 hingga September 2024, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu.**

Grafik 1.13 Perkembangan Neraca Perdagangan (Hanya Ekspor) Provinsi Bengkulu 2022 s.d. Triwulan III 2024 (Juta USD)



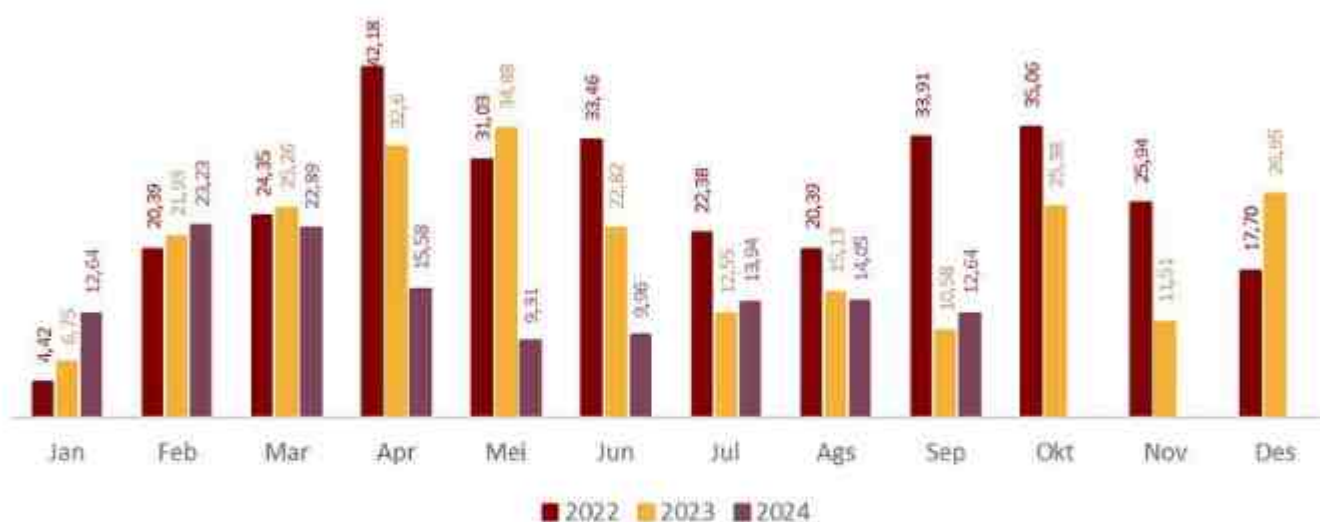
Sumber: Berita Resmi

Statistik Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 (diolah)

Secara kumulatif nilai perdagangan Bengkulu Selama bulan Juni 2022 - Juni 2024, neraca perdagangan tertinggi terjadi pada bulan April 2022 yaitu surplus sebesar USD42,18 juta.

Selanjutnya bulan Oktober 2022 yang tercatat surplus USD35,06 juta dan bulan Mei 2023 yang tercatat surplus USD34,88 juta. Sedangkan neraca perdagangan terendah terjadi pada bulan Januari 2022 yang tercatat mengalami surplus mencapai USD 4,42 juta.

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2022 s.d Triwulan III 2024 secara m-to-m (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 (diolah)

Total nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2024 senilai USD134,24. Pada bulan September 2024, nilai ekspor Bengkulu sebesar USD12,64 juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,43

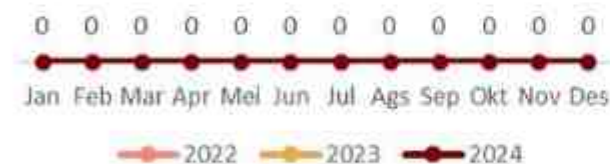
persen (yoy) dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,03 persen (mtm). **Penurunan ekspor pada September 2024 dibandingkan bulan sebelumnya 2024 (mtm) dikarenakan** ekspor komoditas batu bara yang





merupakan komoditas yang mendominasi ekspor di Provinsi Bengkulu turun hingga sebesar 23,60 persen dari USD13,32 juta menjadi USD10,18 juta. Sehingga kontribusi kenaikan pada ekspor karet sebesar 70,49 persen dari USD0,72 juta menjadi USD1,22 juta, lintah naik sebesar 21,85 persen dari USD0,00 juta menjadi USD0,8 juta, dan lainnya naik sebesar 19.045 persen dari USD0,006 juta menjadi USD0,39 juta tidak terlalu mempengaruhi nilai ekspor.

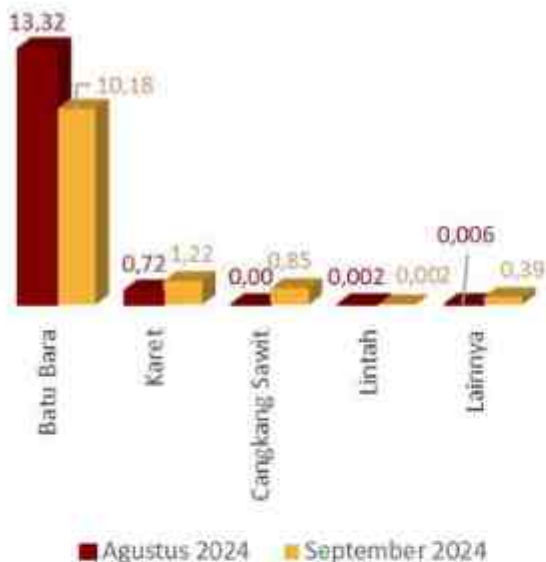
Grafik 1.15 Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 (diolah)

Pada bulan September 2022 hingga September 2024, tercatat tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu.

Grafik 1.16 Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Agustus 2024 dan September 2024 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 (diolah)

Komoditas yang diekspor Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 yaitu batubara sebesar US\$ 10,18 juta (80,55 persen), karet sebesar US\$ 1,22 juta (9,65 persen), cangkang sawit sebesar US\$ 0,85 juta (6,70%), lintah sebesar US\$ 2,21 ribu (0,02 persen), dan komoditas lainnya sebesar US\$ 3,90 ribu (3,08 persen).

Grafik 1.17 Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan per September 2024 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 (diolah)

Nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada Bulan September 2024 menurut asal negara didominasi oleh India sebesar USD6,68 juta (52,85 persen), Tiongkok sebesar USD3,89 juta (30,76 persen), Jepang sebesar USD1,04 juta (8,25 persen), Amerika Serikat sebesar USD0,86 juta (6,82 persen), Afrika Selatan sebesar USD0,16 juta (1,29 persen), dan negara lainnya sebesar USD2,49 ribu (0,02 persen).

1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan Masyarakat, mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Dalam mengukur keberhasilan dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan Pembangunan suatu daerah, diperlukan indikator sebagai parameter seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan **pendapatan (gini ratio)**, **nilai tukar petani (NTP)**, dan **nilai tukar nelayan (NTN)**. Kondisi kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu sepanjang triwulan III tahun 2024 terus mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan program





pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.



1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara atau daerah. Penentuan tingkat kemiskinan melibatkan identifikasi garis kemiskinan, yang merupakan ambang batas pendapatan atau pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Grafik 1.18 Tren Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2019 s.d. Maret 2024 (Ribu Jiwa dan Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diolah)

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 13,56 persen (281,36 ribu jiwa). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen (288,46 ribu jiwa) atau berkurang sekitar 7,1 ribu jiwa (yoy), **meski mengalami penurunan angka ini masih di atas rata-rata nasional 9,03% dan Bengkulu termasuk 18 provinsi di bawah nasional**. Dan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu bulan Maret 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,06 persen atau menurun ±15,87 ribu jiwa dan pertama kalinya selama 5 tahun terakhir menyentuh angka 13 persen yang mana sebelumnya selalu di angka 14-15 persen.

Grafik 1.19 Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan per September 2024 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diolah)

Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 masih menjadi **tertinggi kedua di Pulau Sumatera**. Bila dibandingkan dengan





target RPJMD Provinsi Bengkulu yang menetapkan target sebesar 13,10 - 13,60 persen kemiskinan pada tahun 2024. Angka persentase penduduk miskin di Bengkulu

13,56 persen masih masuk didalam range dari target yang direncanakan.

Tabel 1.3 Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2022 s.d. Maret 2024 (Rupiah)

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Sumbangan Garis Kemiskinana (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2022	435.393	155.362	590.755	73,70	26,30	100,00
Maret 2023	466.693	170.449	637.142	73,25	26,75	100,00
Maret 2024	492.988	178.107	671.095	73,46	26,54	100,00
Perubahan Mar'22-Mar'23	7,19%	9,71%	7,85%			
Perubahan Mar'23-Mar'24	5,63%	4,49%	5,33%			

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diolah)

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Bengkulu pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 671.095,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,33 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022 dan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 7,85 persen. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Beras masih menjadi komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, bensin, Listrik, Pendidikan, perlengkapan mandi dan pakaian jadi Perempuan dewasa. Tingkat kemiskinan pada periode Maret 2024 ini dipicu oleh peranan komoditi makanan dibandingkan komoditi bukan makanan. Pada maret 2024, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,46 persen terhadap garis kemiskinan sedangkan komoditi bukan makanan menyumbang 26,54 persen.

Tabel 1.4 Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya per Maret 2024 (Persen)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	74,22	Makanan:	73,13
Beras	20,24	Beras	25,26
Rokok kretek filter	12,28	Rokok kretek filter	10,68
Cabe merah	5,70	Cabe merah	5,08
Daging ayam ras	4,54	Tongkol/tuna/cakalang	3,10
Tongkol/tuna/cakalang	4,09	Daging ayam ras	3,08
Telur ayam ras	4,03	Telur ayam ras	2,94
Mie instan	2,78	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,41
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,13	Cabe rawit	2,25
Bawang merah	1,60	Gula pasir	1,92
Gula pasir	1,55	Mie instan Bawang merah	1,74
Cabe rawit	1,49	Bawang merah	1,54
Tempe	1,39	Tempe	1,25
lainnya	12,40	lainnya	11,88
Bukan Makanan:	25,78	Bukan Makanan:	26,87
Perumahan	7,56	Perumahan	9,09
Bensin	4,39	Bensin	4,74
Listrik	2,71	Listrik	2,28
Pendidikan	2,51	Pendidikan	1,42
Perlengkapan mandi	1,00	Perlengkapan mandi	1,17
Kesehatan	0,95	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,79
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,81	Sabun cuci	0,76
lainnya	5,85	lainnya	6,62

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diolah)





Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Bengkulu pada Maret 2024 antara lain adalah Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,14 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,78 persen; Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I 2024 mencapai Rp 24,67 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 13,02 triliun; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,17 persen, turun 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2023; Sebanyak 697.181 orang (64,51 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun sebesar 5,47 persen poin dibandingkan Februari 2023; NTP Provinsi Bengkulu Maret 2024 sebesar 168,42 atau naik 3,35 persen dibanding NTP Februari 2024; dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bengkulu Maret 2024 sebesar 167,66 atau naik 4,25 persen dibanding NTUP Februari 2024.

Grafik 1.20 Tren Kemiskinan Kota dan Desa Maret 2022 s.d. Maret 2024 (Persen dan Ribu Jiwa)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diloah)

Angka kemiskinan terbagi atas daerah perkotaan dan pedesaan dengan garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan di Provinsi Bengkulu per Maret 2024 adalah sebesar Rp736.758,-/bulan di daerah Perkotaan dan Rp640.485,-/bulan untuk di daerah Pedesaan. Hanya pada periode Maret 2024, angka kemiskinan di Perkotaan dan di Pedesaan memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 13,56 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan. Pada periode Maret 2024 jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 186,69 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan hanya mencapai 94,67 ribu jiwa. Namun demikian, jumlah kemiskinan di daerah perkotaan dan desa berkurang secara signifikan. Pada Maret 2024, kemiskinan Kota turun menjadi 13,56 persen yang sebelumnya berada diangka 14,21 persen atau menurun ±2,99 ribu jiwa. Sementara itu, kemiskinan Desa juga turun menjadi 13,56 persen yang sebelumnya berada diangka 13,96 persen atau menurun ±4,11 ribu jiwa.

Beberapa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, antara lain:



Program Bantuan Sosial: Pemerintah memperluas dan memperkuat bantuan sosial, termasuk melalui bantuan tunai dan bantuan pangan untuk keluarga miskin, yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran harian mereka;



Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Program ini meliputi beasiswa untuk pelajar dari keluarga tidak mampu dan peningkatan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi. Upaya ini ditujukan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui pendidikan dan kesehatan yang memadai;



Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, pemerintah Bengkulu mendukung masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil dan menengah. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, terutama di daerah pedesaan;



Peningkatan Infrastruktur: Penyediaan fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di wilayah terpencil membantu mengurangi ketimpangan





ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik;



Sinergi Pusat dan Daerah dalam Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Pemerintah Bengkulu bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa program penghapusan kemiskinan tepat sasaran, termasuk melalui koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program tersebut; dan



Validasi dan Perbaikan Data Kemiskinan: Pemerintah telah melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Bengkulu dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, dengan fokus pada kemiskinan ekstrem, sesuai dengan RPJMD mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

1.2.2 Tingkat Pengangguran

Pengangguran ialah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jumlah penduduk usia kerja di Bengkulu pada Agustus 2024 mencapai 1.585.001 orang, terdiri dari angkatan kerja sejumlah 1.136.573 orang dan sisanya sebanyak 448.428 orang merupakan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari 1.101.234 orang yang bekerja dan 35.339 orang (naik 31.619 orang secara yoy)

merupakan pengangguran (turun 2.505 orang secara yoy).

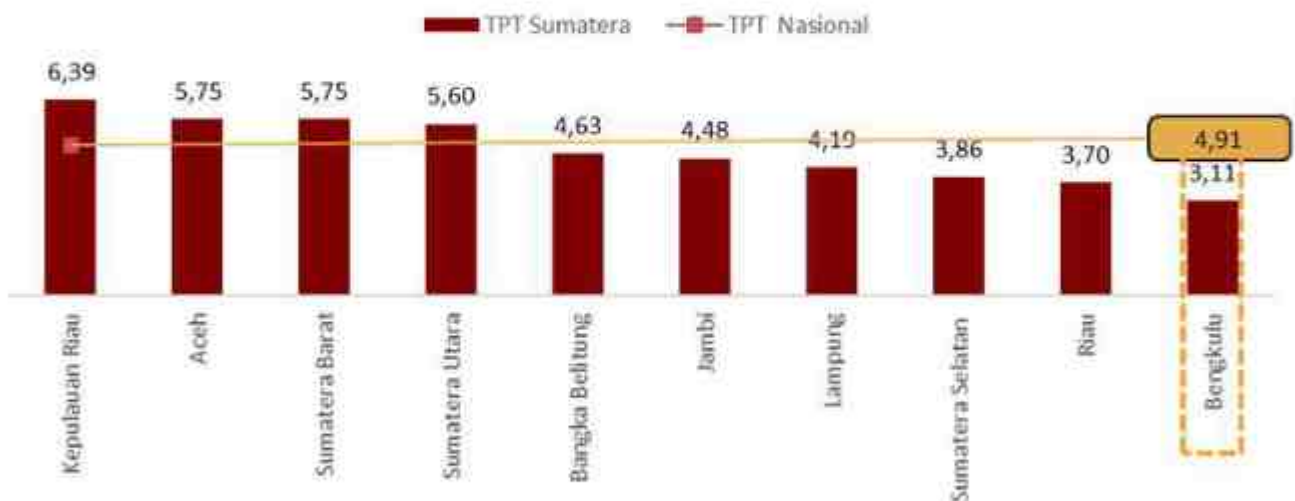
Grafik 1.21 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Bengkulu dan Nasional Periode Agustus 2020 – Agustus 2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu pada Agustus 2024 tercatat sebesar 3,11 persen turun 0,31 persen poin (yoy) dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,42 persen. Penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan Provinsi Bengkulu berkembang dari sektor ketenagakerjaan dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka **nasional yang berada pada angka 4,91 persen**, maka nilai TPT Provinsi Bengkulu berada lebih baik sebesar 1,80 persen poin (Nilai TPT yang kecil menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang baik, di mana sebagian besar angkatan kerja memiliki pekerjaan). Sementara jumlah pengangguran nasional menembus angka 7,47 juta orang pada Agustus 2024. Berdasarkan angka pengangguran tersebut maka Provinsi Bengkulu hanya menyumbang 0,48 persen dari total pengangguran tingkat nasional.

Grafik 1.22 Persentase TPT di Pulau Sumatera per Agustus 2024 (Persen)



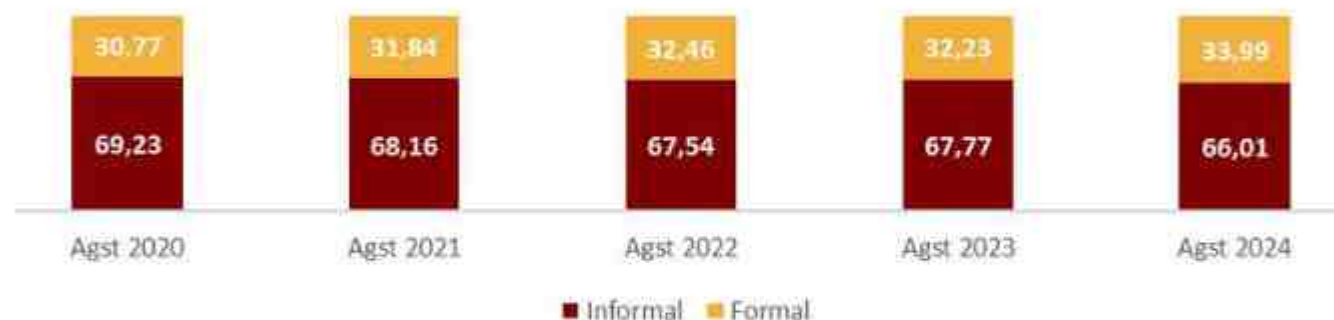
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)





Sampai dengan periode Agustus 2024, TPT di Provinsi Bengkulu berada pada posisi terendah selama lima tahun terakhir di Regional Sumatera yang artinya lapangan kerja yang tersedia sudah mencukupi untuk menampung mereka yang ingin bekerja, atau setidaknya, mendekati keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja.

Grafik 1.23 **Proporsi Pekerja Formal dan Informal Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)

Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama dikelompokkan menjadi kegiatan formal dan informal. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 374.293 orang (33,99 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 726.941 orang (66,01 persen).

Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen poin. Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Grafik 1.24 **Distribusi dan Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan (Persen dan Ribu Orang)**



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)

Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, sektor Pendidikan menyerap tenaga kerja sebesar 10,66 ribu orang, jasa lainnya menyerap tenaga kerja sebesar 5,65 ribu orang, dan pertanian (terutama dari perkebunan kopi dan kelapa sawit) menyerap tenaga kerja sebesar 5,29 ribu orang. Ketiga sektor tersebut masih menjadi

tiga sektor tertinggi dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Sedangkan sektor dengan penyerapan terkecil dipegang oleh sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar dengan pertumbuhan negatif sebesar 3,95 persen (yoy).





Grafik 1.25 TPT Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah 2020-2024 (Persen)

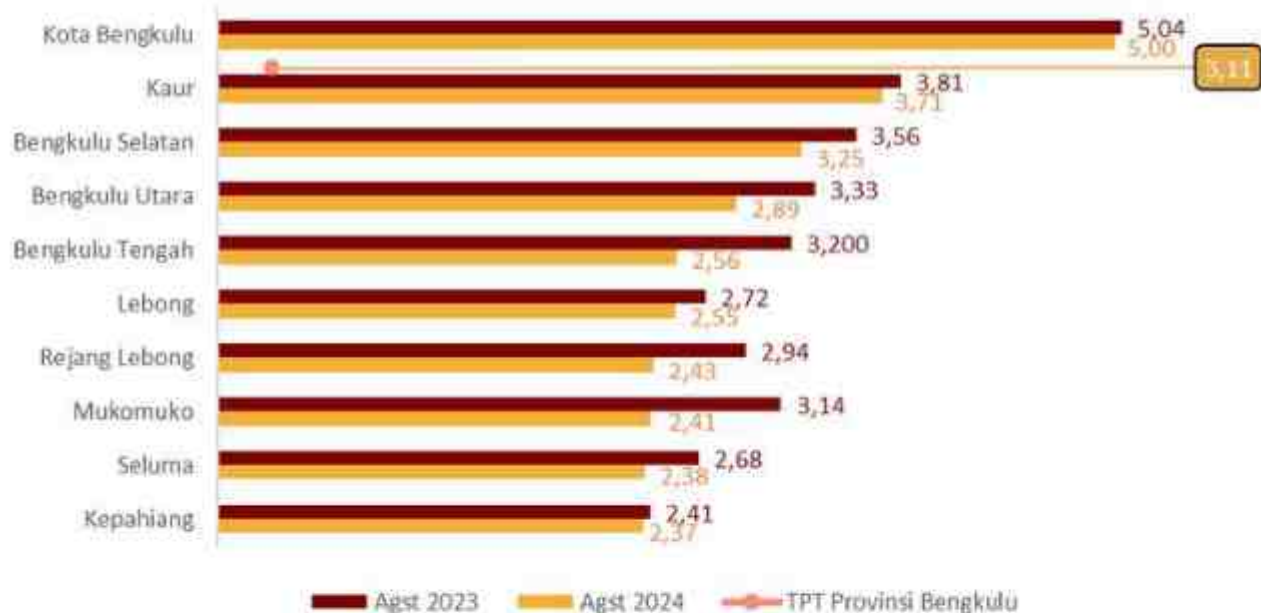


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)

Pada Agustus 2024 TPT perempuan adalah sebesar 3,38 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki dengan jumlah 2,93 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,13 persen poin dan 0,61 persen poin (yoy). Nilai TPT laki-laki yang lebih tinggi tidak hanya diindikasikan bahwa perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan laki-laki dalam populasi angkatan kerja namun bisa dikarenakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih banyak

yaitu 85,10 persen dan Perempuan diangka 57,74 persen. Sementara itu TPT di wilayah perkotaan tercatat sebesar 4,17 persen cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang sebesar 2,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk di kota yang belum mendapatkan pekerjaan meskipun mereka aktif mencari dibandingkan di daerah pedesaan. Namun bila dibandingkan dengan Agustus 2023 (yoy), TPT menurut wilayah keduanya mengalami penurunan baik Perkotaan maupun pedesaan.

Grafik 1.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu (Persen)

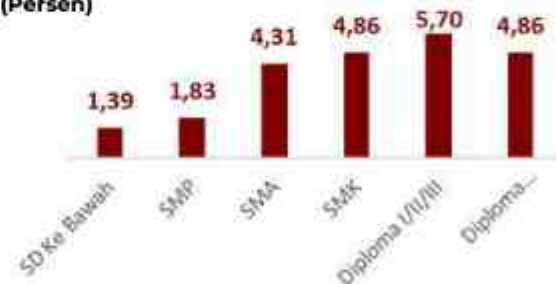


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)

Pada Agustus 2024, TPT seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2023. TPT tertinggi tercatat di Kota Bengkulu sebesar 5,00 persen TPT terendah di Kabupaten Kepahiang sebesar 2,37 persen.

Pada Agustus 2024 TPT perempuan adalah sebesar 3,38 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki dengan jumlah 2,93 persen.

Grafik 1.27 TPT Menurut Pendidikan per Agustus 2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 (diolah)





Dari TPT Agustus 2024, tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 5,70 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD Ke Bawah, yaitu sebesar 1,39 persen. Yang artinya penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,11 persen. Tren ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang mana penduduk berpendidikan SMK memiliki TPT tertinggi yaitu sebesar 5,71 persen dan mengalami penurunan pada Agustus 2024 menjadi 4,86 persen. Menanggapi kondisi ini, perlu dilakukan tindak lanjut mengenai isu tingginya lulusan Diploma I/II/III dalam TPT menurut Pendidikan agar lulusan Diploma I/II/III memiliki peluang kerja yang lebih besar sesuai dengan permintaan industri atau lapangan kerja saat ini. Dapat dengan melalui: **(1)** Pengembangan Program Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Industri; **(2)** Memperbanyak Program Magang dan Kerja Praktik; **(3)** Meningkatkan Akses ke Informasi dan Jaringan Pekerjaan; **(4)** Mendorong Wirausaha dan Kewirausahaan; dan **(5)** Memberikan Pelatihan Ulang (Reskilling) dan Pengembangan Keterampilan Baru (Upskilling).

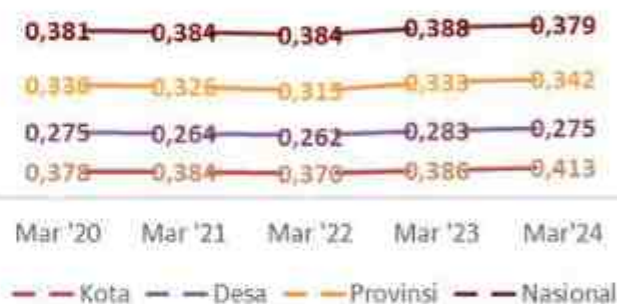
Beberapa upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam menurunkan angka pengangguran, yaitu memperluas kesempatan kerja diantaranya melalui peningkatan konektivitas untuk memperlancar jalur distribusi dan perdagangan, di antaranya lanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau, peningkatan fungsi pelabuhan, dan penguatan akses jalur udara; pemenuhan sarana dan prasarana produksi untuk petani, peternak dan nelayan, serta penguatan UMKM; dan penguatan perekonomian daerah, terutama dengan menjadikan pelabuhan Pulau Baai sebagai kawasan industri yang kedepannya akan dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Gini rasio penduduk Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,342. Angka ini meningkat sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2023 yang sebesar 0,333. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat, namun masih tergolong kedalam ketimpangan rendah atau terjadi pemerataan ekonomi. Nilai gini ratio berada antara 0 s.d. 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi atau terjadi pemerataan ekonomi pada daerah tersebut. Sedangkan nilai 1 menunjukkan adanya nilai kesenjangan ekonomi yang maksimal. Kategori ketimpangan berdasarkan nilai gini ratio terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu ketimpangan rendah (antara 0 –

0,3), ketimpangan sedang (antara 0,3 – 0,5), dan ketimpangan tinggi (lebih dari 0,5).

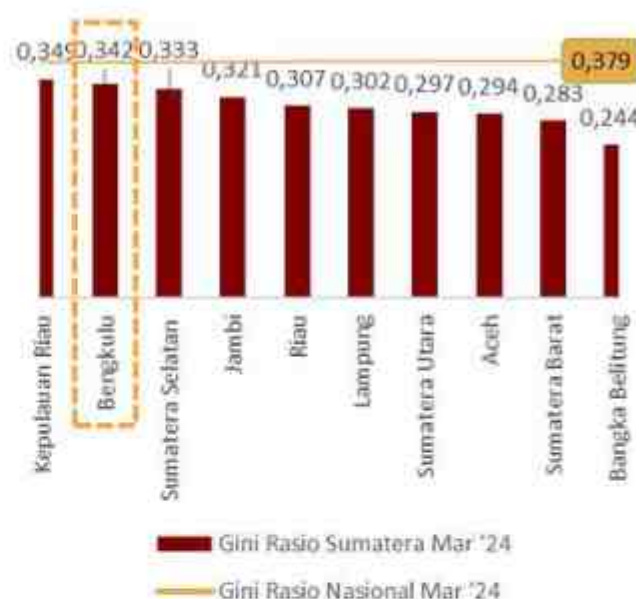
Grafik 128 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Maret 2020-Maret 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,413 lebih tinggi 0,027 poin dibanding Maret 2023 (yoy) yang sebesar 0,386 dan selalu lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Untuk daerah pedesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275 turun sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 (yoy) yang sebesar 0,283.

Grafik 129 Tren Gini Ratio di Pulau Sumatera per Maret 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Angka gini ratio Provinsi Bengkulu per Maret 2024 berada pada peringkat tertinggi kedua di regional Sumatera. Tingginya gini ratio di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan disparitas atau ketimpangan pengeluaran dan pendapatan antar





kelompok masyarakat. Salah satu faktor utama adalah: **(1)** Ketimpangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, konsentrasi sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, seperti perdagangan dan jasa, membuat masyarakat perkotaan cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar dibandingkan masyarakat perdesaan; **(2)** Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi di perdesaan memperburuk ketimpangan daerah perkotaan dan pedesaan; **(3)** Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan. Meskipun terdapat upaya penurunan angka kemiskinan, disparitas dalam pendapatan antara masyarakat dengan pendapatan tertinggi dan terendah tetap tinggi; dan **(4)** Belum meratanya pembangunan di Bengkulu, masih terpusat di bagian Kota sehingga menyebabkan adanya perbedaan kemajuan antar wilayah. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya perbaikan akses ke kesempatan ekonomi yang lebih merata serta program untuk mendukung peningkatan pendapatan di sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan di perdesaan, yang merupakan sektor paling dominan di Provinsi Bengkulu.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya menurunkan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Bengkulu melalui Kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini dan mengurangi gini ratio di masa mendatang. Berikut beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemda

maupun Pempus dalam menurunkan gini ratio yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu: **(1)** Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara melalui APBN dan APBD; **(2)** Secara masif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program-program unggulan seperti kemudahan dalam penyaluran KUR dan UMi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang pada tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp2,43 triliun di tahun 2023. Melalui program-program ini diharapkan dapat berkontribusi terus mempertahankan rasio gini Provinsi Bengkulu di level rendah.

1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kesejahteraan dan daya beli petani di suatu wilayah, NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi guna merumuskan kebijakan pembangunan di sektor pertanian. Nilai ini didapatkan dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai tersebut dipengaruhi oleh produktivitas, permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, harga pupuk, serta biaya operasi/produksi lain seperti upah dan modal kerja.

Grafik 1.30 Perbandingan Perkembangan NTP Bengkulu dengan Nasional Januari 2022 – September 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 55/10/Th. XVIII, 1 Oktober 2024 (diolah)

NTP Provinsi Bengkulu September 2024 berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan sebesar 190,15 atau naik 2,68 persen dibanding NTP Agustus 2024 yang senilai 185,19 persen. Peningkatan NTP pada September 2024 disebabkan oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 2,39 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,28

persen. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan kemampuan tukar komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan dalam proses produksi semakin kuat. Semakin tinggi angka NTP maka semakin kuat kemampuan daya beli yang dimiliki oleh petani.





Jika dibandingkan dengan nilai NTP nasional pada bulan September 2024 yang berada di angka 120,30, maka NTP Provinsi Bengkulu berada di atas nilai NTP nasional sebesar 190,15 persen lebih tinggi sebesar 69,85 persen poin. Kenaikan NTP dikarenakan oleh **kenaikan** pada indeks harga hasil produksi pertanian serta indeks **biaya produksi dan penambahan barang modal**, sementara Indeks harga barang dan jasa **yang dikonsumsi oleh rumah tangga mengalami penurunan**.

Peningkatan NTP September 2024 dipengaruhi oleh peningkatan NTP yang terjadi pada tiga subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,90; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3,38 persen; dan subsektor Perikanan sebesar 0,20 persen. Sementara dua subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Hortikultura sebesar 11,22 persen dan subsektor Peternakan sebesar 0,34 persen.

Peningkatan NTP pada September 2024 ini ditopang oleh meningkatnya harga komoditas kopi, kelapa sawit, karet dan jagung. Kenaikan harga kopi akibat Penurunan Produksi di Berbagai Negara dan sebagai dampak positif dari program Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan konsumsi domestik dan ekspor, terutama melalui kegiatan seperti Festival Kopi dan UMKM yang meningkatkan daya tarik kopi Bengkulu dilihat dari meningkatnya permintaan internasional terhadap kopi lokal. Sementara untuk harga komoditas kelapa sawit yang fluktuatif, bergantung pada perubahan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan tingkat permintaan internasional, serta kendala dalam distribusi dan infrastruktur, yang turut mempengaruhi harga di pasar lokal. Dan untuk kenaikan harga jagung sebagian besar disebabkan tingginya permintaan di pasar lokal dan ketidakseimbangan harga dengan produk sawit, sehingga mendorong petani lebih memilih menanam jagung untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. **Infrastruktur yang kurang memadai kegiatan pertanian** terutama di daerah pedalaman (jalan usaha tani, irigasi, bangunan pengolahan hasil pertanian) yang menyebabkan sulitnya akses ke pasar sehingga menyebabkan tingginya biaya distribusi dan mengurangi keuntungan petani;
2. **Ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti kopi, karet, dan kelapa sawit**, sehingga membuat sektor pertanian rentan terhadap fluktuasi harga global, yang bisa berdampak negatif pada pendapatan petani ketika harga komoditas tersebut turun;
3. **Keterbatasan Teknologi dan Pendampingan**, masih banyak ditemukan petani di Bengkulu

menggunakan metode tradisional dalam bertani. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan minimnya pelatihan meningkatkan produktivitas menghambat kemampuan petani untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan memenuhi permintaan pasar yang berkembang;

4. **Permodalan dan Akses Pembiayaan yang Terbatas**, seperti sulitnya mencari tambahan modal untuk meningkatkan produksi. Keterbatasan ini membatasi investasi pada peralatan, bibit unggul, dan sarana lain yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian.
5. **Dampak Perubahan Iklim**, seperti curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang ekstrem, mengancam hasil panen dan kualitas produk pertanian. Dampak iklim ini semakin dirasakan di Bengkulu, terutama pada tanaman yang sensitif terhadap perubahan cuaca seperti kopi dan karet.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan nelayan dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan (yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikananannya). Data NTN Provinsi Bengkulu diperoleh dari data NTP Subsektor Perikanan Nelayan (NTN).

Letak geografis Bengkulu yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, memberikan Bengkulu akses garis pantai yang panjang dan potensi sumber daya laut yang kaya, terutama di Samudra Hindia. Kondisi ini memberikan beberapa keuntungan terhadap Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bengkulu dalam meningkatkan perekonomian di bidang Kelautan dan Perikanan.

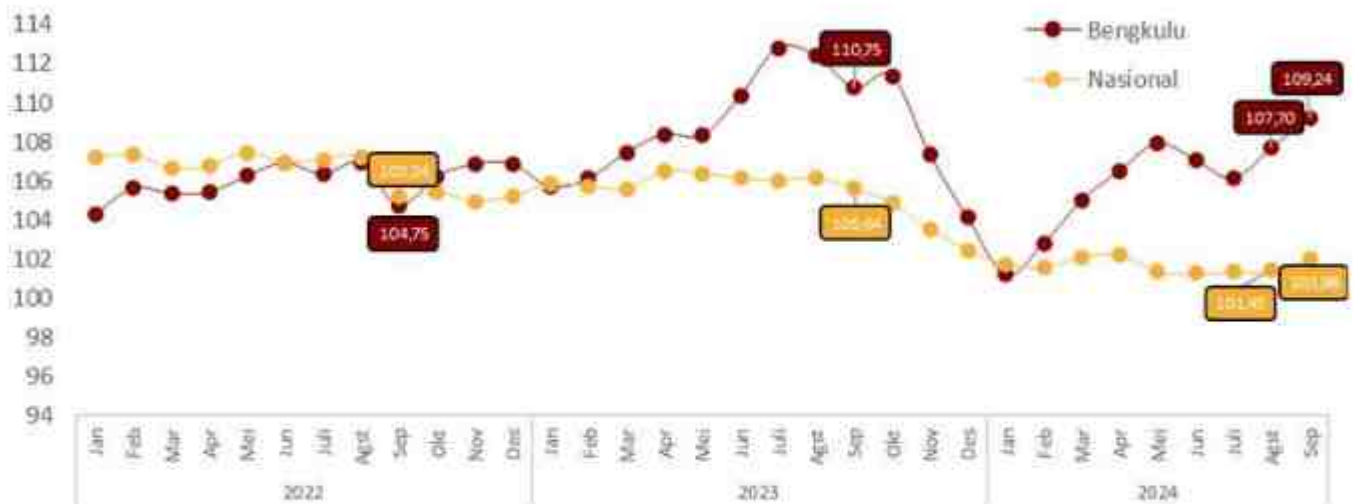
NTN Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 yang tergambar pada Grafik 1.31 berada pada angka 109,24 mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen dari bulan sebelumnya.

Angka gini ratio Provinsi Bengkulu per Maret 2024 berada pada peringkat tertinggi kedua di regional Sumatera. Tingginya gini ratio di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor terkait.





Grafik 1.31 Perbandingan Perkembangan NTN Bengkulu dengan Nasional Januari 2022 – September 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 55/10/Th. XVIII, 1 Oktober 2024 (diolah)

Pada September 2024 NTN Provinsi Bengkulu berada diangka 109,24, mengalami peningkatan sebesar 1,43 persen (mtm) dan tumbuh negatif sebesar 1,36 persen (yoy). Hal ini terjadi karena It (Indeks Harga yang Diterima oleh Petani) meningkat sebesar 0,98 persen, sementara Ib (Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani) mengalami penurunan sebesar 0,44 persen. Peningkatan pada It disebabkan oleh naiknya It pada kelompok penangkapan laut sebesar 1,03 persen, sementara kelompok penangkapan perairan umum turun sebesar 1,82 persen. Penurunan Ib disebabkan oleh turunnya indeks kelompok KRT dan indeks kelompok BPPBM masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,30 persen.

Namun angka NTN ini masih berada diatas NTN nasional yang berada diangka 101,98. Angka NTN Bengkulu yang berada diatas NTN nasional ini didorong oleh letak geografis Bengkulu yang strategis.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan di Bengkulu, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. **Keterbatasan Infrastruktur,** Infrastruktur pendukung sektor perikanan, seperti pelabuhan, dermaga, fasilitas pendingin, dan pasar ikan yang memadai, masih terbatas. Hal ini membuat penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan menjadi kurang efisien, sehingga hasil tangkapan nelayan sering kali tidak maksimal dalam nilai jual;
2. **Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem,** Perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, yang menghambat aktivitas penangkapan ikan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca buruk mengurangi frekuensi melaut, nelayan, terutama bagi mereka yang

menggunakan perahu kecil;

3. **Overfishing dan Degradasi Lingkungan,** Aktivitas penangkapan yang berlebihan serta pencemaran laut mengancam kelestarian sumber daya laut di perairan Bengkulu. Hal ini tidak hanya mengurangi populasi ikan tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor perikanan jangka Panjang;
4. **Peralatan Penangkapan yang Kurang Modern,** Banyak nelayan di Bengkulu yang masih menggunakan peralatan penangkapan tradisional. Minimnya akses terhadap teknologi modern menyebabkan rendahnya produktivitas dan efisiensi penangkapan, yang memengaruhi jumlah dan kualitas hasil tangkapan; dan
5. **Minimnya Program Pelatihan dan Pendampingan,** Nelayan lokal sering kali kurang mendapatkan pelatihan dalam aspek manajemen perikanan dan keterampilan modern, seperti budidaya perikanan atau penggunaan alat-alat teknologi. Kurangnya pendampingan ini membatasi perkembangan mereka dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan.

Maka dari itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Bengkulu yang dilaksanakan melalui beberapa program. Sampai dengan triwulan III 2024, Pagu Belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bengkulu adalah sebesar Rp5,42 miliar. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp3,02 miliar atau mencapai 55,66 persen dari total pagu TA 2024. Beberapa Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) Pemerintah terus memperkuat kegiatan promosi untuk menarik investor ke sektor perikanan dan agribisnis melalui kegiatan seperti *Bencoolen Regional Investment*





and Economic Forum (BRIEF) yang diadakan pada September 2024. Ini bertujuan untuk membuka peluang investasi dalam sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses nelayan ke pasar yang lebih luas; (2) Pemprov Bengkulu bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengadakan berbagai pasar murah terintegrasi di daerah-daerah nelayan. Program ini bertujuan untuk menekan harga kebutuhan pokok yang langsung berhubungan dengan ekonomi layanan, membantu menjaga daya beli, dan

memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan di wilayah tersebut; (3) Memfasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok Masyarakat bekerjasama dengan BMKG; (4) Melakukan pengawasan sumber daya alam secara ketat bekerjasama dengan TNI AL; (5) Melalui dukungan pembinaan UMKM guna memperkuat hasil tangkapan menjadi hasil olahan yang memiliki nilai ekonomis lebih; serta (6) Kegiatan lainnya yang membantu para nelayan dalam meningkatkan kualitas produksinya.

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III-2024 mencapai Rp 25,82 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 13,55 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan III-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,56 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar minus 12,45 persen.



BAB III

ANALISIS EKONOMI REGIONAL





Rumah

PENGASINGAN BUNG KARNO

Rumah ini terletak di tengah Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Sukarno Hatta Kelurahan Anggut Atas kecamatan Gading Cempaka. Awalnya, rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Lion Bwe Seng yang disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Soekarno menempati rumah itu pada 1938-1942. Di rumah ini terdapat barang-barang peninggalan Soekarno. Ada ranjang besi yang pernah dipakai Soekarno dan keluarganya, koleksi buku yang mayoritas berbahasa Belanda serta seragam grup tonil Monte Carlo asuhan Soekarno semasa di Bengkulu. Ada juga foto-foto Soekarno dan keluarganya yang menghiasi hampir seluruh ruangan dan yang tidak kalah menarik adalah sepeda tua yang dipakai Soekarno selama di Bengkulu.

sumber artikel : id.wikipedia.org



BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui APBN, pemerintah dapat menggerakkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. APBN menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi, fungsi alokasi untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta fungsi distribusi untuk mencapai keadilan sosial

bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tingkat regional, seperti di Provinsi Bengkulu, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah pertumbuhan nasional yakni sebesar 4,57 persen dan jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 13,56 persen (BPS Provinsi Bengkulu), APBN tidak hanya berfungsi untuk mendanai program-program nasional tetapi juga disesuaikan agar dapat menjawab kebutuhan spesifik daerah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menanggulangi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh daerah. Dengan melihat perkembangan realisasi APBN hingga Triwulan III 2024, kita dapat memahami bagaimana APBN berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian berbagai target pembangunan di Bengkulu.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

i-Account	2023			2024			Growth
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
PENDAPATAN NEGARA	3.036,54	2.307,23	75,98%	3.332,68	2.464,58	73,95%	6,80%
Pendapatan Perpajakan	2.688,54	1.931,88	71,86%	2.990,49	2.076,05	69,42%	7,50%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	348	375,35	107,86%	342,19	388,52	113,54%	3,50%
Hibah	3,9	1,8	46,08%	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	15.994,79	10491,3	65,59%	16.766,24	11.692,21	69,74%	11,40%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5386,13	3201,6	59,44%	5.804,43	3.564,09	61,40%	11,30%
Belanja Pegawai	1848,73	1350,94	73,07%	1.937,00	1.596,00	82,40%	18,10%
Belanja Barang	2590,07	1339,39	51,71%	2.939,23	1.455,4	49,52%	8,70%
Belanja Modal	928,68	500,21	53,86%	906,16	498,94	55,06%	-0,30%
Belanja Bantuan Sosial	18,64	11,05	59,30%	22,03	13,75	62,42%	24,40%
Belanja Hibah	6,5	7,26	111,79%	-	-	-	-
Belanja Lain-Lain	348	375,35	107,86%	-	-	-	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang	122,03	189,7	155,45%	-	-	-	-
Belanja Subsidi	225,98	185,65	82,15%	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH	10.608,67	7.289,70	68,71%	10.961,81	8.128,12	74,15%	11,50%
Dana Transfer Umum (DTU)	7.105,48	5.010,26	70,51%	7.248,67	5.609,70	77,39%	11,96%
Dana Alokasi Umum (DAU)	6.256,59	4.780,98	76,42%	6.562,71	5.275,12	80,38%	10,30%
Dana Bagi Hasil (DBH)	848,89	229,28	27,01%	685,96	334,58	48,78%	45,90%
Dana Transfer Khusus (DTK)	2.311,51	1.408,97	60,95%	2.527,82	1.484,01	58,71%	5,33%
Dana Alokasi Khusus Fisik	895,85	394,45	44,03%	1.089,24	487,59	44,76%	23,60%





i-Account	2023			2024			Growth
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.415,66	1.014,52	71,66%	1.438,58	996,42	69,26%	-1,80%
Dana Insentif Fiskal	110,70	29,11	26,30%	98,62	52,81	53,54%	81,40%
Dana Desa	1.080,98	841,36	77,83%	1.086,69	981,61	90,33%	16,70%
SURPLUS/DEFISIT	(12.958,25)	(8.184)	63,16%	(13.433,56)	(9.227,63)	68,69%	12,75%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(12.958,25)	(8.184)	63,16%	(13.433,56)	(9.227,63)	68,69%	12,75%

Sumber: D2P, DJBC, Direktorat PNPB SDA-KND dan OMSPAN (diolah)

Berdasarkan data realisasi APBN Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa pencapaian penting dalam komponen Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Transfer ke Daerah yang menjadi acuan utama untuk memahami kondisi fiskal di provinsi ini.

Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.332,68 miliar, meningkat sebesar 9,72% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Hingga akhir Triwulan III 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp2.464,58 miliar, atau sekitar 73,95% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan pendapatan ini sebagian besar didorong oleh Pendapatan Perpajakan yang mencapai Rp2.076,65 miliar atau 69,42% dari target, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,50%. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp388,52 miliar, mencapai 113,54% dari target, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat penerimaan hibah hingga triwulan III 2024 pada regional Bengkulu.

Pada sisi Belanja Negara, alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp16.766,24 triliun. Hingga akhir Triwulan III, realisasi belanja mencapai Rp11.692,21 triliun atau 69,74% dari total pagu. Pertumbuhan realisasi belanja ini tercatat sebesar 11,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar belanja ini disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang mencatat realisasi yang relatif tinggi, mencapai masing-masing 82,46% dan 49,52% dari pagu, menandakan peran Pemerintah Pusat dalam mendorong roda ekonomi lokal melalui peningkatan pengeluaran di sektor tersebut.

Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi

Bengkulu. Alokasi dana untuk TKD sebesar Rp10.961,81 miliar, dengan realisasi sebesar Rp8.128,12 miliar atau 74,15% dari target hingga Triwulan III 2024. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dalam transfer ini, mencapai realisasi sebesar 80,38% dari alokasi pagu, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan fleksibilitas penganggaran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Meskipun terdapat pencapaian yang cukup baik, posisi fiskal Provinsi Bengkulu masih menunjukkan defisit yang cukup besar, yaitu sebesar Rp9.227,63 triliun. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja yang masih jauh melebihi pendapatan yang diterima, yang mengindikasikan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai stabilitas fiskal di provinsi ini. Kesenjangan fiskal ini juga berpotensi mempengaruhi pencapaian target-target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu.

2.1.1 Analisis Perkembangan Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dan Hibah di Bengkulu pada triwulan III 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, dengan realisasi mencapai 73,95 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan perpajakan memberikan kontribusi terbesar, terutama dari Pajak Penghasilan Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu, penerimaan dari PNBP berhasil melampaui target sebesar 113,54 persen, terutama berkat pendapatan BLU yang menunjukkan pengelolaan sumber daya publik yang efektif serta kecenderungan peningkatan pendapatan secara musiman pada triwulan ketiga. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan negara di Bengkulu cukup baik, didorong oleh upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP.





Grafik 2.1 **Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan III Tahun 2024**



Sumber: DJP, DJBC, OMSPAN (diolah)

Pendapatan negara sampai triwulan III 2024 telah terealisasi sebesar Rp2.464,58 miliar tumbuh sebesar 6,80

persen dari periode yang sama tahun 2023, menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan III 2024. Realisasi Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.076,5 miliar, PNB sebesar Rp388,52 miliar. Secara proporsi sebagaimana tersaji dalam grafik 2.1, Penerimaan Perpajakan memiliki kontribusi yang lebih besar yaitu 84,24 persen dibandingkan dengan kontribusi PNB terhadap Pendapatan Negara yang hanya sebesar 15,76 persen.

Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar 69,42% dari Target, sedangkan realisasi PNB mencapai 113,54%. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemenuhan target pendapatan PNB untuk mengejar pemenuhan Maksimum Pencairan (MP) serta pada masa triwulan ketiga biasanya masa penerimaan/pendaftaran mahasiswa baru serta masa pembayaran UKT/SPP mahasiswa pada satker badan layanan umum.

2.1.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Negara

2.1.1.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri

Tabel 2.2 **Pagu dan Realisasi dan Growth Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)**

i-Account	2023			2024			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1. Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri	2.682,03	1.924,56	71,76%	2.963,78	2.074,46	69,99%	7,80%
Pajak Penghasilan Non Migas	1.305,01	953,83	73,09%	1.368,24	849,85	62,11%	-10,90%
Pajak Pertambahan Nilai	1.265,18	880,43	69,59%	1.469,20	1.124,83	76,56%	27,80%
Pajak Bumi dan Bangunan	62,58	60,77	97,10%	73,91	69,9	94,58%	15,00%
Pajak Lainnya	49,26	29,53	59,94%	52,43	29,87	56,98%	1,20%

sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Pada triwulan III 2024, penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang solid dengan realisasi mencapai Rp2.076,46 miliar atau 69,99 persen dari target tahunan sebesar Rp2.963,78 miliar. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan sebesar 7,80 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.076,5 miliar, PNB sebesar Rp388,52 miliar.

Grafik 2.2 **Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan III, 2024**



Sumber: DJP, DJBC, OMSPAN (diolah)





Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencatat kontribusi yang signifikan sebesar 54,22 persen dengan realisasi mencapai Rp1.124,83 miliar, atau 76,56% dari target, mencerminkan kenaikan 27,80 persen (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerapan tarif PPN sebesar 11 persen serta pemulihan dan pertumbuhan konsumsi domestik yang semakin kuat pasca pandemi. Selain itu, peningkatan ini sejalan dengan realisasi dan pertumbuhan Belanja K/L dan TKD secara yoy. Hasil ini mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan yang tepat dan peran aktif ekonomi domestik dalam mendorong penerimaan pajak.

Pada urutan kedua, Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas turut berhasil memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi sebesar Rp849,85 miliar atau 40,97 persen dari total realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebagaimana terlihat pada Grafik 2.2. Penerimaan PPh Non-Migas mengalami kontraksi sebesar 10,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penurunan ini lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama kontribusi salah satu komoditas utama Bengkulu yaitu

CPO (minyak sawit mentah) yang melemah akibat produktivitas perkebunan sawit di Bengkulu yang belum pulih akibat musim trek. Kedua, kontribusi komoditas andalan lainnya penerimaan PPh yaitu batu bara juga turun signifikan akibat tekanan harga dan turunnya permintaan yang dipicu oleh kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor utama seperti China dan India. Selain itu, kontraksi turut dipengaruhi oleh banyaknya pengembalian lebih bayar kepada WP di awal tahun 2024.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan dalam negeri di Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan diprediksi meningkat seiring dengan prediksi meningkatnya harga dan permintaan batu bara negara-negara tujuan ekspor utama seperti China dan India sampai akhir tahun 2024 (investasi.kontan.id; 24 Oktober 2024). Sementara itu gangguan pasokan CPO akibat perubahan iklim (el nino dan la nina) akan mendorong kenaikan harga maupun permintaan CPO (market.bisnis.com; 7 Oktober 2024).

2.1.1.1.2 Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Bea dan Cukai

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	2023			2024			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Penerimaan Bea & Cukai	6,51	7,32	112,53%	26,7094	1,5946	5,97%	-78,20%
Cukai	0	0,049	0,00%	0	0,123	0,00%	151,70%
Bea Masuk	0,01	0,0124	107,58%	0,076	0,0023	3,06%	-81,20%
Bea Keluar	6,5	7,26	111,79%	26,63	1,47	5,52%	-79,80%

sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Pada triwulan III 2024, realisasi penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp1,59 miliar atau 5,97 persen dari target tahunan yang sebesar Rp26,70 miliar. Angka ini mencerminkan kontraksi yang signifikan yaitu sebesar 78,20 persen dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, akibat berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi volume dan nilai perdagangan internasional di wilayah Bengkulu.

Bea Masuk mengalami kontraksi yang signifikan dengan realisasi hanya mencapai Rp0,0023 miliar atau sekitar 3,06 persen dari target dan kontraksi terhadap periode yang sama tahun 2023 sebesar 81,20 persen. Penurunan sebagian besar disebabkan oleh rendahnya registrasi IMEI untuk perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) di wilayah Bengkulu. Selain itu, belum ada realisasi impor barang melalui pelabuhan di Bengkulu hingga triwulan III 2024, sehingga penerimaan dari Bea Masuk masih sangat minim.

Bea Keluar juga mengalami penurunan, dengan realisasi sebesar Rp1,45 miliar atau 5,52 persen dari target serta kontraksi terhadap periode yang sama tahun 2023 sebesar 79,80 persen. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas utama Bengkulu, yaitu cangkang kernel sawit, yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan Bea Keluar. Volume ekspor cangkang kernel sawit hingga September 2024 tercatat hanya sebesar 10.200 MT, mengalami penurunan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 70.480 MT. Perlu dicatat bahwa volume ekspor cangkang kernel sawit tersebut seluruhnya berasal dari satu kegiatan ekspor pada tanggal 18 September 2024, ketika 10.199 MT cangkang kernel sawit diekspor ke Jepang, menghasilkan penerimaan Bea Keluar sebesar Rp944 juta dan Dana Pungutan Sawit sebesar Rp472 juta. Pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai telah membatasi kapasitas kapal





yang dapat mengangkut komoditas ini, berkontribusi terhadap rendahnya volume ekspor di Bengkulu hingga triwulan III 2024. Berdasarkan informasi dari eksportir, nilai ekspor cangkang kernel sawit tidak akan perubahan yang signifikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Cukai menjadi satu-satunya komponen penerimaan Bea dan Cukai yang menunjukkan pertumbuhan positif,

dengan realisasi sebesar Rp0,123 miliar, tumbuh sebesar 151,70 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp0,072 miliar (Rp72 juta), yang merupakan hasil dari penerapan asas ultimum remedium dalam penindakan kasus-kasus terkait cukai. Namun, di sisi lain, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sedang terhenti karena pabrik rokok di Kabupaten Rejang Lebong saat ini tidak beroperasi.

2.1.1.1.3 Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tabel 2.4 **Pagu dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)**

URAIAN	2023			2024			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	348		107,86%	342,19	388,52	113,54%	3,50%
PNBP Lainnya	122,03	189,7	155,45%	112,58	148,48	131,88%	-21,70%
Pendapatan BLU	225,98	185,65	82,15%	229,6	240,04	104,55%	29,30%
							375,35

Sumber: OMSPAN, KPKNL Bengkulu (diolah)

Pada triwulan III 2024, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp388,52 miliar, yang berarti telah melampaui target sebesar 113,54 persen dari target tahunan Rp342,18 miliar dan pertumbuhan dari periode yang sama tahun 2023 mencapai 3,50 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja PNBP yang sangat optimal, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan yang kuat.

Kinerja PNBP di Bengkulu didorong oleh penerimaan dari beberapa komponen utama, kontribusi terbesar berasal dari komponen Pendapatan BLU, yang terealisasi sebesar Rp240,04 miliar atau 104,55 persen dari target. Hal ini menunjukkan optimalisasi pada berbagai layanan publik yang disediakan di Bengkulu serta kecenderungan meningkatnya pendapatan BLU secara musiman pada triwulan III berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru pada BLU Sektor Pendidikan yaitu Universitas Bengkulu, Poltekkes Bengkulu, dan UIN Fatmawati Soekarno. Kinerja ini mencerminkan peningkatan yang stabil pada sektor-sektor PNBP yang beragam. Selain itu, komponen PNBP Lainnya mencatatkan realisasi yang sangat baik, dengan penerimaan mencapai Rp148,48 miliar, atau 131,88 persen dari target, meskipun secara yoy komponen tersebut mengalami kontraksi sebesar -21,70 persen. Salah satu faktornya adalah perubahan status UIN Fatmawati Soekarno dari satker PNBP

pada pertengahan tahun 2023 menjadi satker BLU.

Secara keseluruhan, PNBP di Bengkulu hingga triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh optimalisasi layanan dan pengelolaan aset negara, terutama oleh Satker BLU yang mendorong pertumbuhan pendapatan non-pajak.

2.1.1.2 Analisis Kinerja Penerimaan Perpajakan Negara Sektoral

Analisis Kinerja Pendapatan Negara Sektoral merupakan bagian penting dalam kajian ini yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi dan sosial. Pendapatan negara sektoral mencakup penerimaan dari berbagai sektor ekonomi yang berperan dalam menyediakan sumber daya bagi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi Bengkulu. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan serta mengungkap tantangan yang dihadapi, sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk optimalisasi pendapatan negara di Bengkulu.





2.1.1.2.1 Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Dalam Negeri Sektoral

Tabel 2.5 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Sektor di Bengkulu Triwulan III 2024

Sektor	Kontribusi (%)	Growth (yoy) (%)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	27,91	64,65
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	24,94	14,54
Sektor Lainnya	22,8	11,33
Industri Pengolahan	15,91	-21,47
Pertambangan dan Penggalian	4,92	-50,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	5,98

Sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Pada triwulan III 2024, penerimaan pajak sektoral di Provinsi Bengkulu menunjukkan kontribusi terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 27,91 persen dan pertumbuhan signifikan sebesar 64,65 persen (yoy). Pertumbuhan ini mengindikasikan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi di Bengkulu, didorong oleh perbaikan ekonomi daerah pasca pandemi.

Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang kontribusi sebesar 24,94 persen, dengan pertumbuhan yang kuat sebesar 14,54 persen (yoy). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pendapatan pajak melalui administrasi pemerintahan dan jaminan sosial.

Namun, sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Industri Pengolahan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 50,74 persen (yoy) dan 21,47 persen (yoy) dengan kontribusi masing-masing sebesar 4,92 persen dan 15,91 persen. Penurunan pada sektor ini terutama disebabkan

oleh berkurangnya produksi sawit akibat musim trek serta turunnya permintaan ekspor CPO selama triwulan III 2024. Selain itu, harga sawit yang belum membaik turut memengaruhi penerimaan pajak dari sektor ini. Di sisi lain, ekspor batu bara, yang merupakan komoditas utama di Bengkulu, juga mengalami penurunan baik harga maupun permintaannya karena adanya hambatan yaitu pembatasan impor dari negara-negara seperti China dan India terkait isu lingkungan.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebesar 5,98 persen (yoy) dengan kontribusi 3,52 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan keberlanjutan permintaan layanan keuangan dan asuransi di daerah tersebut, walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor utama lainnya. Secara keseluruhan, kinerja pajak sektoral di Bengkulu masih dipengaruhi oleh fluktuasi pada komoditas utama seperti sawit dan batu bara, yang mengalami kontraksi akibat kondisi pasar global. Namun kondisi ini diprediksi membaik pada akhir tahun 2024.

2.1.1.2.2 Analisis Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai Sektoral

Tabel 2.6 Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai per Sektor di Bengkulu Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Sektor	Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	3,20
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	92,20
Jasa-jasa	4,50

Sumber: KPPBC TMP C Bengkulu (diolah)

Pada triwulan III 2024, penerimaan bea cukai di Provinsi Bengkulu menunjukkan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 92,20 persen. Sektor ini mencatatkan dominasi yang sangat signifikan. Hal ini mencerminkan pentingnya komoditas utama seperti hasil pertanian dan perkebunan bagi perekonomian regional.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi yang lebih kecil, yakni 3,20 persen. Meskipun sektor ini berperan dalam penerimaan bea cukai, kontribusinya masih relatif rendah dibandingkan dengan

sektor pertanian dan kehutanan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun sektor industri memiliki peran dalam ekonomi daerah, pengaruhnya terhadap penerimaan bea cukai belum sebesar sektor primer.

Di sisi lain, sektor Jasa-jasa menyumbang kontribusi sebesar 4,50 persen. Meskipun kontribusinya lebih besar dibandingkan sektor industri pengolahan, sektor jasa ini masih berada di bawah sektor pertanian.

Hal ini bisa mencerminkan pentingnya sektor jasa dalam perekonomian, tetapi dengan skala yang lebih terbatas dalam hal penerimaan bea cukai.





Secara keseluruhan, penerimaan bea cukai di Bengkulu sangat dipengaruhi oleh sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, yang menjadi pendorong utama, sedangkan sektor Industri Pengolahan dan Jasa-

jasa memberikan kontribusi yang lebih kecil. Fluktuasi penerimaan bea cukai kemungkinan besar masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan harga komoditas utama seperti sawit dan produk hutan.

2.1.1.3 Analisis Perkembangan Tax Ratio

Tabel 2.7 Perkembangan Tax Ratio. Triwulan III 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi s.d Tw III 2023	Realisasi s.d Tw III 2024
Pendapatan Perpajakan Pusat	1931,88 M	2076,05 M
Pendapatan Perpajakan Daerah	775,98 M	514,67 M
PDRB	71,14 T	76,99 T
Tax Ratio Pempus	2,72%	2,69%
Tax Ratio Pemda	1,09%	0,67%
Tax Ratio Seluruh Pajak	3,81%	3,37%

Sumber: KPP Bengkulu Dua, KPPBC Bengkulu, BPS Prov. Bengkulu, Dit. APK (diolah)

Data menunjukkan penurunan tax ratio seluruh pajak di Bengkulu, dari 3,81% di triwulan III 2023 menjadi 3,37% di triwulan III 2024. Penurunan ini menunjukkan kontribusi pajak terhadap PDRB di Bengkulu yang sedikit menurun, yang dapat mengindikasikan adanya perlambatan dalam pemungutan pajak, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

Penurunan tax ratio Pemerintah Pusat (Pempus), dari 2,72% menjadi 2,69%, dipengaruhi oleh hambatan pada penerimaan PPh Non-Migas. Di Bengkulu, penerimaan PPh Non-Migas sangat bergantung pada fluktuasi ekspor komoditas utama seperti CPO dan batu bara. Permintaan ekspor yang menurun serta harga yang belum pulih menyebabkan kontraksi pada sektor ini, yang berimbas pada rendahnya pertumbuhan tax ratio Pempus hingga triwulan III 2024.

Tax ratio Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami penurunan yang lebih signifikan, dari 1,09% di triwulan III

2023 menjadi 0,67% di triwulan III 2024. Penurunan ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pembaruan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023. Hingga triwulan III 2024, sebanyak 9 Pemerintah Daerah di Bengkulu belum menyampaikan Perda PDRD terbaru ke DJPK. Meskipun penyusunan Perda PDRD telah selesai, aturan turunannya masih dalam tahap pembuatan. Hal ini menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah dan berdampak pada penurunan tax ratio Pemda secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan tax ratio di Bengkulu pada 2024, dengan adanya penataan kembali regulasi pajak daerah sesuai UU HKPD dan perbaikan kinerja ekspor melalui revitalisasi Pelabuhan Pulau Baal, adanya momentum pilkada serentak, dan perayaan Nataru yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi berpotensi untuk meningkat penerimaan negara maupun daerah di triwulan IV.

2.1.1.4 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2024

Tabel 2.8 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pajak		Bea Cukai		PNBP	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Hingga Triwulan III	2.007,56	2.074,48	0,369	1,1785	241,62	388,52
Oktober	294,15		0,0002		9,82	
November	298,45		0,0402		11,09	
Desember	417,83		0,0002		37,31	

Sumber: KPP Bengkulu Dua, KPPBC Bengkulu, BPS Prov. Bengkulu, Sintesa (diolah)

Proyeksi penerimaan pajak hingga triwulan III 2024 sebesar Rp2.007,56 miliar. Berdasarkan data realisasi, penerimaan pajak telah mencapai Rp2.074,48 miliar, menghasilkan deviasi positif (realisasi lebih besar dari proyeksi) sebesar 3,33 persen. Capaian ini mencerminkan

peningkatan dalam pemungutan pajak, didukung oleh berbagai upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dijalankan oleh otoritas pajak di tingkat wilayah. Penerapan kebijakan perpajakan baru, seperti penyesuaian tarif PPN dan tarif efektif PPh Pasal 21 yang





telah diberlakukan sejak tahun sebelumnya, juga turut mendorong pencapaian ini.

Proyeksi penerimaan bea cukai hingga triwulan III 2024 sebesar Rp0,369 miliar. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp1,1785 miliar, dengan deviasi positif yang signifikan sebesar 219,48 persen. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh ekspor cangkang sawit pada 18 September 2024 sebesar Rp1,516 miliar terhadap bea keluar, serta hasil dari penegakan kepatuhan terkait cukai. Meski demikian, penerimaan bea keluar masih menghadapi tantangan terkait pendangkalan alur pada Pelabuhan Pulau Baai. Penerimaan bea cukai yang melebihi target hingga triwulan III ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung target penerimaan secara keseluruhan.

Proyeksi penerimaan PNPB tahun 2024 hingga triwulan III sebesar Rp241,62 miliar. Realisasi PNPB telah mencapai Rp388,52 miliar, menciptakan deviasi positif sebesar 60,75 persen. Pencapaian ini menandakan kinerja yang sangat optimal, didorong oleh pendapatan dari berbagai sektor PNPB, termasuk penerimaan denda administrasi dan aset negara. Penerimaan PNPB yang jauh melebihi target ini menjadi kontribusi penting dalam mendukung keseluruhan pendapatan negara hingga triwulan III.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak, bea cukai, dan PNPB pada triwulan III 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan deviasi penerimaan yang melampaui target. Upaya optimalisasi pendapatan melalui kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan oleh instansi terkait telah memberikan dampak nyata pada pencapaian pendapatan negara. Dengan menjaga konsistensi kinerja ini, realisasi pendapatan diharapkan dapat mencapai kondisi optimal hingga akhir tahun anggaran.

2.1.1.5 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara

Berdasarkan progres kinerja pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan III tahun 2024, dapat diberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Industri Pengolahan

Selama ini perekonomian Bengkulu masih sangat mengandalkan sektor primer yaitu pertanian, pekebunan, dan kehutanan dan sektor pertambangan yang nilai tambahnya rendah dan sangat rentan dengan isu global. Bengkulu perlu melakukan transformasi ekonomi menuju industri pengolahan agar dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah dan ketahanan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui

kegiatan hilirisasi industri pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

2. Sosialisasi Pentingnya dan Mudahnya Registrasi IMEI HKT

Mengingat penurunan pada penerimaan bea masuk di Bengkulu hanya mengandalkan registrasi IMEI perangkat HKT karena tidak ada aktivitas impor, KPPBC Pratama Bengkulu perlu melakukan sosialisasi pentingnya registrasi IMEI termasuk memudahkan prosesnya kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk media sosial.

3. Optimalisasi Bea Keluar Melalui Penyelesaian Hambatan Ekspor

Untuk mengatasi penurunan penerimaan bea keluar akibat terhambatnya ekspor cangkang kernel sawit, diperlukan sinergi yang kuat antara Bea Cukai Bengkulu dan Kemenkeu Satu Bengkulu, Pemda Bengkulu serta pihak terkait untuk mengatasi pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, serta segera mengkaji revitalisasi pelabuhan-pelabuhan potensial lainnya, seperti Pelabuhan di Bengkulu Utara dan Seluma. Revitalisasi ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekspor dan mendukung peningkatan penerimaan daerah.

4. Peningkatan Penerimaan Cukai Melalui Penegakan Hukum (Ultimum Remedium)

Bea Cukai Bengkulu diharapkan untuk terus mengoptimalkan penerimaan cukai, khususnya dengan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, inspeksi dan edukasi dapat lebih efektif dilakukan untuk meminimalisir kerugian negara akibat produk tanpa cukai. Selain itu, penerimaan cukai juga dapat dioptimalkan dengan terus memonitor penerimaan dari denda administrasi cukai yang berkontribusi signifikan. Hal ini penting karena potensi pendapatan Cukai dari pabrik rokok di Rejang Lebong sudah tidak ada lagi karena berhentinya operasi pabrik tersebut.

5. Pemanfaatan dan Optimalisasi PNPB Melalui Pengelolaan Aset Negara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu diharapkan untuk meningkatkan penerimaan PNPB dengan melakukan identifikasi terhadap aset-aset negara yang idle dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Optimalisasi pemanfaatan aset negara, termasuk properti yang belum terpakai, dapat berkontribusi signifikan terhadap penerimaan PNPB. Selain itu, KPKNL perlu menjaga koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemanfaatan bersama terhadap





aset yang dapat dimonetisasi.

6. Meningkatkan Literasi Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan penguatan literasi perpajakan kepada seluruh masyarakat bahkan sejak dini untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan literasi perpajakan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat.

7. Meningkatkan Kerja Sama Pertukaran Data

Pertukaran data antarara DJP dengan unit eselon I lainnya di Internal Kementerian Keuangan penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, misalnya data penyaluran dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh DJPb untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari realisasi penggunaan TKD yang di Bengkulu mencapai lebih dari Rp10 triliun setiap tahunnya. Kerja sama pertukaran data antara DJP dengan Pemda juga penting dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah.

8. Optimalisasi Local Tax Ratio melalui Implementasi Penuh UU HKPD

Pemerintah Daerah di Bengkulu diharapkan dapat segera menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023. Dengan regulasi yang lengkap, pemda memiliki kepastian kepastian hukum untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penyesuaian sistem baru terkait penerapan opsen pajak serta sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak terhadap regulasi baru perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menerapkan monitoring yang ketat dan memberikan konsekuensi yang jelas agar pelaksanaan Perda sesuai jadwal.

Realisasi Belanja Negara di Bengkulu pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp11.692,21 miliar, yang setara dengan 69,74 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.1.2 Analisis Perkembangan Belanja Negara

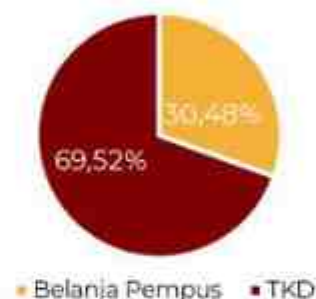
Grafik 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan III, 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi Belanja Negara di Bengkulu pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp11.692,21 miliar, yang setara dengan 69,74 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.3. Secara persentase, terdapat peningkatan signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 65,59 persen. Peningkatan ini menghasilkan growth sebesar 11,40 persen (yoy), yang menunjukkan kinerja belanja negara yang positif, terutama didorong oleh belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan optimal pada triwulan ketiga tahun 2024.

Grafik 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan III, 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Apabila dirinci lebih lanjut sebagaimana terlihat pada grafik 2.4, Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp3.564,09 miliar, yang setara dengan 30,48 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp8.128,12 miliar, yang setara dengan 74,15 persen





dari pagu anggaran. Menariknya, realisasi belanja TKD lebih tinggi dibandingkan belanja Pemerintah Pusat, yang mencerminkan alokasi yang lebih besar untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan prioritas yang lebih besar dalam penggunaan anggaran, yang bisa dilihat sebagai upaya untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Peningkatan belanja TKD yang signifikan juga mencerminkan penguatan program transfer untuk daerah dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan sosial, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa.

2.1.2.1 Analisis Realisasi dan Growth Belanja Pemerintah Pusat

Tabel 2.9 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)

URAIAN	2023			2024			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
I. Belanja Pemerintah Pusat	5.386,13	3.201,60	59,44%	5.804,43	3.564,09	61,40%	11,30%
Belanja Pegawai	1.848,73	1.350,94	73,07%	1.937,00	1.596,00	82,40%	18,10%
Belanja Barang	2.590,07	1.339,39	51,71%	2.939,23	1.455,40	49,52%	8,70%
Belanja Modal	928,68	500,21	53,86%	906,16	498,94	55,06%	-0,30%
Bantuan Sosial	18,64	11,05	59,30%	22,03	13,75	62,42%	24,40%

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada triwulan III 2024, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp3.564,09 miliar, atau 61,40 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, mengalami peningkatan 11,30 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan kinerja positif dalam belanja Pemerintah Pusat, dengan alokasi anggaran yang lebih terealisasi pada sektor-sektor prioritas. Namun, terdapat sedikit kontraksi pada Belanja Modal, yang tercatat sebesar Rp498,94 miliar atau 55,06 persen dari pagu yang

ditetapkan, yang menunjukkan penurunan minor sebesar 0,30 persen (yoy). Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Bengkulu yang dikelola oleh Kemendikbud, yang hingga triwulan III 2024 belum sepenuhnya terealisasi. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit kontraksi pada Belanja Modal, Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu pada triwulan III 2024 menunjukkan hasil yang baik, dengan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Analisis Realisasi dan Growth Belanja Transfer ke Daerah

Tabel 2.10 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan III 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	2023			2024			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
II. Transfer Ke Daerah	10.608,67	7.289,70	68,71%	10.961,8	8.128,12	74,15%	11,50%
1. Transfer Ke Daerah	9.527,68	6.448,34	67,68%	9.875,12	7.146,51	72,37%	10,80%
a. Dana Perimbangan	9.416,99	6.419,23	68,17%	9.776,49	7.093,71	72,56%	10,50%
DAU	6.256,59	4.780,98	76,42%	6.562,71	5.275,12	80,38%	10,30%
DAK Fisik	895,85	394,45	44,03%	1.089,24	487,59	44,76%	23,60%
DAK Non Fisik	1.415,66	1.014,52	71,66%	1.438,58	996,42	69,26%	-1,80%
DBH	848,89	229,28	27,01%	685,96	334,58	48,78%	45,90%
b. Dana Insentif Fiskal	110,7	29,11	26,30%	98,62	52,81	53,54%	81,40%
2. Dana Desa	1.080,98	841,36	77,83%	1.086,69	981,61	90,33%	16,70%

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada triwulan III 2024, realisasi Belanja Transfer ke Daerah di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp8.128,12 miliar, yang setara dengan 74,15 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10.961,81 miliar. Meskipun ada peningkatan dalam realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat naik sebesar 11,50 persen (yoy). Mayoritas komponen pada Belanja TKDD mengalami pertumbuhan, namun terdapat kontraksi pada salah satu

komponen Belanja TKDD yaitu pada Belanja DAK Non Fisik sebesar 1,80 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan kontraksi dalam realisasi BOK Puskesmas pada triwulan III 2024 adalah penolakan dari oknum puskesmas untuk menerima BOK Puskesmas. Namun, permasalahan ini telah ditangani oleh Pemerintah Daerah.





terkait dan kini telah mencapai penyelesaian, sehingga puskesmas tersebut akan segera menerima penyaluran BOK Puskesmas.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan hingga triwulan III 2024 pada komponen lain yaitu Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih menghadapi hambatan signifikan. Salah satu masalah utama yang terjadi adalah terhambatnya penyaluran insentif Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh belum diterbitkannya juknis penyaluran hingga triwulan III 2024. Akibatnya, banyak desa di Bengkulu yang belum bisa memanfaatkan insentif tersebut, yang berimbas pada tertundanya pelaksanaan program-program pembangunan yang mengandalkan dana tersebut. Sementara itu, permasalahan di Desa Sebelat di Kabupaten Lebong menambah kerumitan dalam penyaluran Dana Desa. Desa ini tengah menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan Dana Desa tahap 1 oleh pejabat sementara kepala desa, yang menyebabkan kemungkinan besar Dana Desa tahap 2 untuk desa tersebut tidak dapat dicairkan. Penyalahgunaan dana ini menjadi contoh penting bahwa pengawasan penggunaan Dana Desa perlu lebih diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, permasalahan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kelurahan. Pemda Mukomuko

mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk penyaluran DAU tahap II. Berdasarkan keterangan yang diterima pada 26 September 2024, realisasi DAU tahap I baru mencapai 66 persen, sementara syarat minimal untuk penyaluran tahap II adalah 75 persen. Penyebab utama keterlambatan ini adalah keterbatasan izin warga untuk melanjutkan pembangunan bahu jalan di Kelurahan Pasar Mukomuko dan Bandar Ratu. Hal ini tentu menghambat kelancaran penyaluran anggaran yang sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur penting di daerah tersebut.

Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran Dana Desa dan DAU, namun secara keseluruhan realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada triwulan III 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk itu, penting agar masalah administratif dan teknis, seperti penerbitan juknis yang lebih cepat dan percepatan proses administrasi, dapat segera diselesaikan. Penguatan pengawasan, baik pada tingkat daerah maupun pusat, akan menjadi langkah krusial untuk memastikan penyaluran anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Jika langkah-langkah ini diambil dengan serius, maka di tahun mendatang, Belanja Transfer ke Daerah di Provinsi Bengkulu dapat mencapai hasil yang lebih optimal, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.2.3 Analisis Belanja Negara Berdasarkan Fungsi Pemerintahan

Tabel 2.11 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Fungsi	Triwulan III 2023			Triwulan III 2024			Growth (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pelayanan Umum	10.734,74	7.708,33	71,81%	12.005,24	8.595,27	71,60%	11,51%
Pertahanan	221,39	163,86	74,02%	215,46	165,71	76,91%	1,12%
Ketertiban dan Keamanan	1.284,31	891,11	69,38%	1.267,97	933,65	73,63%	4,77%
Ekonomi	1.355,46	648,61	47,85%	952,57	607,06	63,73%	-6,41%
Perlindungan Lingkungan Hidup	136,53	86,85	63,61%	137,87	97,02	70,37%	11,70%
Perumahan dan Fasilitas Umum	128,91	85,51	66,33%	521,01	274,23	52,63%	220,70%
Kesehatan	174,72	105,52	60,39%	156,37	117,32	75,03%	11,19%
Pariwisata	1,09	0,9	82,59%	1,52	1,03	67,66%	14,77%
Agama	162,03	125,07	77,19%	169,69	143,09	84,32%	14,41%
Pendidikan	1.110,39	663,12	59,72%	1.260,75	743,11	58,94%	12,06%
Perlindungan Sosial	16,95	12,42	73,27%	19,7	14,83	75,31%	19,40%

Sumber: Sintesa (dialah)

Pada Triwulan III 2024, belanja daerah Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk berbagai fungsi pemerintahan yang mencakup sektor-sektor penting dalam pembangunan daerah. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai bidang yang krusial, seperti pelayanan publik, ekonomi, agama, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Setiap fungsi belanja ini memiliki tujuan yang spesifik, dengan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan daerah.





Belanja daerah dibagi dalam beberapa fungsi utama, yang antara lain mencakup:

1. **Fungsi Pelayanan Umum**, yang berfokus pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan, dan ketertiban.
2. **Fungsi Ekonomi**, yang berfokus pada pengembangan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
3. **Fungsi Agama**, yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, pembinaan umat, dan pengelolaan sarana ibadah.
4. **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**, yang meliputi pembangunan infrastruktur perumahan, fasilitas umum, dan sarana prasarana kota.
5. **Fungsi Kesehatan**, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki fasilitas kesehatan, serta mendukung program-program kesehatan masyarakat.
6. **Fungsi Pendidikan**, yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Dengan alokasi yang bervariasi di setiap sektor, serapan anggaran di masing-masing fungsi belanja menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mampu menggunakan dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan. Berikut adalah interpretasi terhadap realisasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi tersebut.

Fungsi Pelayanan Umum



Fungsi Pelayanan Umum mendapat alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp12.005,24 miliar. Hingga Triwulan III 2024, realisasi anggaran untuk sektor ini tercatat mencapai Rp8.595,27 miliar, atau sekitar 71,60% dari total pagu. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar anggaran sudah digunakan, masih ada ruang untuk meningkatkan serapan anggaran pada triwulan IV. Fungsi ini sangat penting karena mencakup kegiatan administratif pemerintahan, pengelolaan layanan publik, serta penguatan sektor keamanan dan ketertiban umum. Dengan alokasi yang besar, sektor ini memiliki peran sentral dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas.

Fungsi Ekonomi



Di sektor Ekonomi, alokasi anggaran sebesar Rp952,57 miliar tercatat hanya terealisasi sebesar Rp607,06 miliar, dengan persentase realisasi 63,73%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perhatian besar terhadap pemulihan ekonomi daerah, serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat terhambat. Kendala administratif dan teknis,

seperti keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa serta masalah pelaksanaan proyek-proyek fisik, dapat menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran pada sektor ini. Pemulihan ekonomi memerlukan perhatian khusus untuk mempercepat proyek-proyek yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal, karena akan memberi dampak memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Fungsi Agama



Fungsi Agama mendapat anggaran sebesar Rp169,69 miliar, dan hingga Triwulan III, telah terealisasi sebesar Rp143,09 miliar, atau 84,32%. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan keagamaan, pembinaan umat, serta pemeliharaan sarana ibadah. Meskipun sebagian besar dana telah terserap, anggaran ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan administratif dan pengelolaan internal, yang mungkin tidak langsung berpengaruh pada pembangunan fisik atau kegiatan berbasis masyarakat.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum



Untuk sektor Perumahan dan Fasilitas Umum, alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp521,01 miliar tercatat hanya terealisasi sebesar Rp274,23 miliar, atau 52,63%. Sektor ini bergantung pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum yang sering mengalami kendala, seperti masalah pengadaan tanah, keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, atau kesulitan koordinasi antar pihak terkait terutama terkait perizinan dengan Pemerintah Daerah.

Fungsi Kesehatan



Fungsi Kesehatan mencatatkan realisasi anggaran yang cukup baik, yaitu sebesar 75,03% dari alokasi anggaran Rp156,37 miliar. Realisasi ini mencerminkan upaya yang baik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik dalam hal fasilitas kesehatan maupun program kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa proyek besar, seperti pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu, masih memerlukan perhatian lebih agar realisasi anggaran dapat tercapai secara maksimal pada triwulan IV.

Fungsi Pendidikan



Pada sektor Pendidikan, yang mendapat anggaran terbesar ketiga di antara fungsi-fungsi lainnya, yaitu Rp1.260,75 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp743,11 miliar, atau 58,94%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran di sektor pendidikan, yang sangat penting untuk jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu. Kendala yang muncul mungkin terkait dengan





pengadaan barang dan jasa untuk sekolah, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pendidikan (gedung sekolah), serta masalah manajerial di tingkat satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang belum mencapai tingkat penyerapan di atas 60 persen, yaitu sektor pendidikan serta perumahan dan fasilitas umum. Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Satuan

Kerja lingkup Provinsi Bengkulu serta seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan fokus pada penyelesaian kendala administratif, teknis, dan koordinasi antar-pihak untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya peningkatan serapan anggaran ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan daerah di akhir tahun 2024.

2.1.2.4 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Unit Organisasi

Tabel 2.12 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU	REALISASI	%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.276,78	752,86	58,97%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	888,19	653,4	73,57%
Kementerian Agama	757,83	606,23	80,00%
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	621,94	252,33	40,57%
Komisi Pemilihan Umum	602,42	255,71	42,45%
Badan Pengawas Pemilihan Umum	259,87	83,66	32,19%
Kementerian Pertahanan	215,46	165,71	76,91%
Mahkamah Agung	130,8	95,05	72,67%
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	122,76	88,95	72,46%
Kajaksaaan Republik Indonesia	113,14	86,74	76,66%

Sumber: Sintesa (diolah)

Berdasarkan data 10 K/L dengan realisasi belanja terbesar di Provinsi Bengkulu, realisasi belanja tertinggi masih dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebesar Rp752,86 miliar. Persentase realisasi tertinggi tercatat pada Kementerian Agama dengan 80,00 persen, diikuti oleh Kementerian Pertahanan dengan 76,91 persen.

Namun, serapan anggaran pada beberapa K/L besar, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), masih rendah sebagaimana terlihat pada grafik 2.9. Hal ini disebabkan oleh tahapan Pilkada yang baru memasuki proses pendaftaran calon, dan serapan diperkirakan akan meningkat pada bulan November 2024 saat pelaksanaan pencoblosan. Penambahan pagu hibah dan tahapan

Pilkada juga turut memengaruhi rendahnya realisasi belanja pada kedua lembaga ini.

Selain itu, Kementerian PUPR menghadapi kendala pada proyek infrastruktur jalan di Enggano, yang tertunda akibat izin penggunaan material batu krokos yang belum diperoleh. Rendahnya realisasi belanja pada K/L dengan pagu besar juga dipengaruhi oleh penambahan pagu serta kegiatan yang tertunda.

Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagian besar pelaksanaan kegiatan terjadwal pada akhir tahun anggaran, dan belanja modal yang belum terealisasi termasuk proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit di Universitas Bengkulu.

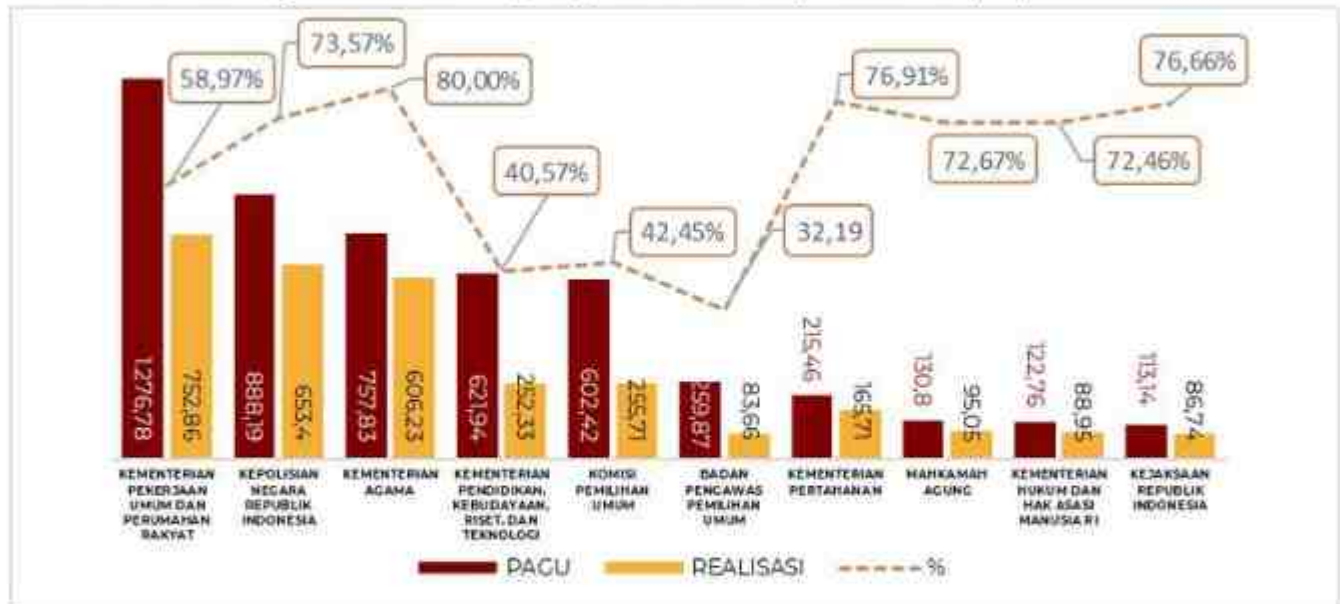
"Efisiensi adalah kunci. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat."

-B.J. Habibie (Presiden Ketiga RI)-





Grafik 2.5 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per K/L, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa (diolah)

Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L di Provinsi Bengkulu menunjukkan kemajuan yang beragam. Beberapa K/L berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan. Namun, sejumlah lembaga, seperti Kemendikbud, KPU dan Bawaslu, masih memiliki serapan rendah akibat tahapan Pilkada yang baru berjalan. Selain itu, kendala teknis, seperti izin material pada proyek

jalan Engganó dan penambahan pagu belanja, turut memengaruhi realisasi anggaran di beberapa K/L. Diharapkan, dengan penyelesaian hambatan dan percepatan program menjelang akhir tahun, realisasi anggaran akan meningkat guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.

2.1.2.5 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Unit Organisasi

Grafik 2.6 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN-TKD (diolah)

Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terbesar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data penyaluran TKD hingga 30 September 2024, pagu anggaran Provinsi Bengkulu mencapai Rp2,02 triliun dengan realisasi Rp1,47 triliun. Ini menunjukkan adanya sisa anggaran sebesar Rp557,87 miliar yang perlu disalurkan hingga akhir tahun anggaran 2024.

Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tingkat penyerapan tertinggi, dengan realisasi 85,29% atau Rp537,56 miliar dari pagu Rp630,25 miliar. Sebaliknya, Kabupaten Lebong mencatat penyerapan terendah dengan realisasi hanya 73,97% dari total pagu Rp606,16 miliar, atau Rp448,38 miliar.





Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemda, Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN-TKD (diolah)

Pada penyaluran Dana Desa sebagaimana terlihat pada grafik 2.7, Kabupaten Seluma mencatat persentase penyerapan tertinggi, mencapai 95,48% dengan realisasi Rp146,77 miliar dari pagu Rp151,23 miliar. Sebaliknya, Kabupaten Lepong mencatat penyerapan terendah di Dana Desa dengan realisasi 55,16%, atau Rp41,15 miliar dari pagu Rp74,56 miliar.

Penundaan penyaluran TKD ini diperkirakan akibat berbagai faktor, termasuk lambatnya proses perencanaan dan eksekusi anggaran, kendala administratif, dan koordinasi yang kurang optimal antara Pemerintah Daerah dan pusat dalam mempercepat realisasi belanja. Beberapa daerah mengalami hambatan dalam pengadaan barang dan jasa atau persiapan

infrastruktur yang membutuhkan waktu lebih lama serta kendala hukum di beberapa desa.

Misalnya, Desa Suro Bali di Kabupaten Kepahang yang menghadapi masalah hukum, mengakibatkan tertundanya penyaluran Dana Desa. Selain itu, dua desa di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lepong berpotensi tidak menerima penyaluran Dana Desa tahap II akibat permasalahan hukum terkait penggunaan Dana Desa sebelumnya. Pada dua kabupaten lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kelurahan tahap II tertunda karena realisasi tahap I tidak mencapai 75%, disebabkan beberapa kelurahan yang belum melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

2.1.2.6 Analisis Belanja Negara per Kapita

Tabel 2.13 Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan III, 2023 – 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d Tw III 2023	Realisasi s.d Tw III 2024	Growth (%)
PDRB	23.870.615.380.000	25.824.031.000.000	8,18%
Belanja Pemerintah Pusat	3.201.599.834.365	3.564.090.460.527	11,32%
Belanja TKDD	7.289.704.138.357	8.128.123.918.169	11,50%
Penduduk (jiwa)	2.086.006	2.112.235	1,26%
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	11.443.215	12.225.927	6,84%
Belanja Per Kapita (Rp/jiwa)	5.029.374	5.535.470	10,06%

Sumber: BPS, OMSPAN (diolah)

Secara keseluruhan, PDRB per kapita di Provinsi Bengkulu hingga triwulan III tahun 2024 tercatat sebesar Rp12,23 juta, mencerminkan kenaikan sebesar 6,84 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi belanja per kapita hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp5,54 juta, menunjukkan peningkatan sebesar 10,06 persen secara tahunan. Kenaikan ini mengindikasikan besarnya alokasi Belanja Negara yang

diberikan untuk setiap penduduk di Bengkulu, di mana pemerintah secara rata-rata menyalurkan sebesar Rp5,54 juta untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan yang cukup signifikan pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,32 persen secara tahunan dan juga peningkatan pada Belanja TKDD yang tumbuh sebesar 11,50 persen secara tahunan. Di sisi lain, laju pertumbuhan





penduduk di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 1,26 persen, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja per kapita yang melampaui pertambahan jumlah penduduk memberikan sinyal positif akan adanya peningkatan dukungan pemerintah yang lebih besar dan intensif bagi setiap individu. Secara keseluruhan, tingginya belanja per kapita ini

mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya alokasi belanja yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, dampak positif terhadap kesejahteraan di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

2.1.2.7 Analisis Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Tabel 2.14 Pagu dan Realisasi Program Prioritas Nasional Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Program Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	17,065	10,807	63,32%
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	615,486	324,245	52,68%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	137,914	69,109	50,11%
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	331,497	277,706	83,77%
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	15,869	9,953	62,72%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	203,978	114,3	56,04%
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	59,732	28,623	47,92%
Total	1.381,541	834,741	60,42%

Sumber: BPS, OMSPAN (diolah)

Berdasarkan tabel 2.11, alokasi belanja pada Program Prioritas Nasional (PN) menunjukkan bahwa sektor dengan pagu terbesar adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan alokasi pagu sebesar Rp615,486 miliar dan realisasi mencapai Rp324,245 miliar atau 52,68% dari total pagu. Prioritas Nasional ini mencakup pengembangan infrastruktur ekonomi, pelayanan dasar, dan transformasi digital.

Di urutan berikutnya adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan pagu sebesar Rp331,497 miliar dan realisasi Rp277,706 miliar, yang menunjukkan capaian sebesar 83,77% dari pagu. Realisasi tinggi dalam sektor ini menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional serta peningkatan layanan publik.

Program prioritas lainnya dengan alokasi pagu besar adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan total pagu sebesar Rp203,978 miliar dan realisasi mencapai Rp114,3 miliar atau sekitar 56,04% dari pagu. Program ini mencakup peningkatan akses pendidikan berkualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja nasional.

Dari segi persentase, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar 83,77% dari pagu. Selanjutnya adalah sektor Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan persentase realisasi sebesar 63,32%, menunjukkan komitmen terhadap ketahanan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar juga mencatat persentase realisasi signifikan sebesar 52,68%.

2.1.2.8 Prognosis Belanja Negara s.d. Triwulan IV 2024

Tabel 2.15 Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Prog. Hingga Triwulan III 2024	Real Hingga Triwulan III 2024	Prog. Triwulan IV 2024
Belanja Pemerintah Pusat	5.848,25	3.783,2	3.564,09	2.065,08
Belanja Pegawai	1.960,26	1.542,18	1.596,	418,08





Jenis Belanja	Pagu	Prog. Hingga Triwulan III 2024	Real Hingga Triwulan III 2024	Prog. Triwulan IV 2024
Belanja Barang	2.935,65	1.701,25	1.455,4	1.234,44
Belanja Modal	930,3	524,69	498,94	405,61
Belanja Bantuan Sosial	22,03	15,07	13,75	6,96
Belanja Transfer Ke Daerah	10.961,81	8.279,98	8.128,12	2.681,83
Transfer Dana Bagi Hasil	685,96	504,14	334,58	181,83
Transfer Dana Alokasi Umum	6.562,71	5.317,85	5.275,12	1.244,86
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.089,24	277,94	487,59	811,29
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dana Insentif Daerah	98,62	57,29	52,81	41,34
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.438,58	1.301,76	996,42	136,82
Dana Desa	1.086,69	821,01	981,61	265,68

Sumber: Sintesa (diolah)

Hingga Triwulan III 2024, Belanja Pemerintah Pusat terhitung sebesar Rp3.564,09 miliar, dengan deviasi positif terhadap proyeksi Triwulan III yang sebesar Rp3.783,2 miliar, mencapai Rp219,11 miliar atau sekitar 5,8 persen. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencerminkan kinerja yang cukup baik, dengan belanja yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan yang tercatat pada sektor-sektor tertentu. Pada Belanja Pegawai, meskipun ada deviasi, pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal menunjukkan pengendalian anggaran yang efisien. Sementara itu, belanja barang, modal, dan bantuan sosial masih perlu perhatian untuk memastikan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sasaran yang optimal.

Pada sisi Transfer ke Daerah, yang berjumlah Rp8.128,12 miliar sampai dengan Triwulan III 2024, terdapat deviasi positif sebesar Rp480,51 miliar dibandingkan dengan proyeksi Triwulan III sebesar Rp8.279,98 miliar. Ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk optimasi pada beberapa sektor tertentu, terutama yang terkait dengan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Melihat ke depan, proyeksi hingga Triwulan IV 2024 memberikan optimisme lebih lanjut. Dengan adanya dorongan terkait Pilkada Bengkulu pada 26 November 2024, terdapat potensi peningkatan realisasi belanja, khususnya untuk satker yang terlibat langsung dalam pemilihan, seperti Bawaslu dan KPU, yang memiliki pagu anggaran yang cukup tinggi. Hal ini diperkirakan akan mendorong pencapaian anggaran secara keseluruhan pada Triwulan IV, mengingat pentingnya pemilu dalam mendukung stabilitas dan perkembangan daerah.

Dengan proyeksi yang masih mengarah pada pencapaian yang baik, baik dalam Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah, diharapkan bahwa realisasi anggaran hingga akhir Triwulan IV 2024 akan menunjukkan hasil yang lebih optimal, dengan fokus pada sektor-sektor yang mendukung agenda

pembangunan dan pemilu yang mendesak.

2.1.1.9 Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara

1. Akselerasi Belanja oleh Satuan Kerja

- Himbauan dari Kanwil dan KPPN: Kanwil dan KPPN perlu mendorong seluruh satuan kerja (satker) untuk segera melakukan akselerasi belanja. Langkah ini tidak hanya untuk mencegah penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, tetapi juga untuk memastikan bahwa belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial mencapai target realisasi pada triwulan III 2024.
- Instruksi Eselon I untuk KPU dan Bawaslu: Eselon I KPU dan Bawaslu diharapkan dapat mengarahkan satker di daerah agar mengeksekusi anggaran sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu memastikan hibah dari Pemda untuk KPU dan Bawaslu dapat digunakan secara tepat guna dan bertanggung jawab, mengingat pentingnya anggaran ini dalam mendukung persiapan Pilkada.

2. Optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD)

- Persiapan penyaluran TKD lebih awal: pemda agar segera mempersiapkan penyaluran TKD terutama yang proses penyiapannya harus dilakukan mulai tahun sebelumnya seperti penetapan dokumen anggaran (Perda APBD dan Perdes APBDes), koordinasi dengan K/L teknis, koordinasi penetapan rencana kegiatan dengan K/L teknis, penetapan pejabat pengelola keuangan, percepatan pelaksanaan kontrak PBJ, dan lain-lain.
- Perhatian pada Batas Waktu dan Persyaratan Dokumen: Pemda perlu memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan,





serta mempersiapkan proses penyusunan laporan dan perekaman data realisasi capaian output sesegera mungkin. SP2D BUD dan dokumen lainnya harus segera dilengkapi untuk memperlancar proses penyaluran anggaran.

- c. Bimbingan kepada Perangkat Desa: Pemda juga perlu menyediakan bimbingan bagi pejabat desa dan kecamatan terkait proses verifikasi pengajuan penyaluran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Ini akan memudahkan desa dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa secara tepat waktu.

3. Optimalisasi Penggunaan Sistem OMSPAN TKD

Pemantauan Melalui OMSPAN: Dalam penyaluran TKD tahun 2024, monitoring realisasi dan capaian output dilakukan melalui sistem OMSPAN. Pemda diharapkan terus berkoordinasi secara aktif untuk memenuhi persyaratan penyaluran tepat waktu dan memantau perkembangan baru di OMSPAN TKD. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan dalam penyaluran anggaran serta memastikan anggaran terserap secara optimal dan mendukung target pembangunan di daerah.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pencapaian realisasi anggaran di Provinsi Bengkulu dapat lebih baik, mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata.

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Tabel 2.16 Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan III 2023-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2023	2024	Growth
Pendapatan Negara	2.307,23	2.464,58	6,80%
Belanja Negara	10.491,30	11.692,21	11,40%
Surplus/Defisit	(8.184,07)	(9.227,63)	12,75%

Sumber: OMSPAN (diolah)

Defisit APBN Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp8.184,07 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp9.227,63 miliar di tahun 2024. Peningkatan defisit ini terutama disebabkan oleh kenaikan belanja negara yang mencapai 11,40 persen, sementara pertumbuhan pendapatan hanya sebesar 6,80 persen.

Defisit yang meningkat ini menunjukkan bahwa laju peningkatan belanja di Provinsi Bengkulu masih lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan. Hal ini menandakan adanya ketergantungan yang tinggi pada pendanaan untuk mendorong pembangunan daerah, namun pada saat yang sama, kapasitas untuk menghasilkan pendapatan yang seimbang belum tercapai. Untuk ke depannya, diperlukan strategi peningkatan pendapatan atau efisiensi belanja guna menjaga keseimbangan fiskal dan mengelola defisit secara berkelanjutan.

2.1.4 Analisis Neraca Pemerintah Pusat – Tingkat Wilayah

Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah merupakan perluasan narasi analisis atas posisi kekayaan

pemerintah yang berada dalam lingkup daerah. Analisis posisi neraca Pemerintah Pusat pada Triwulan III-2024 didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) tahun 2023 dan 2022 (growth yoy).

2.1.4.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Regional Bengkulu, merupakan salah satu output dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Neraca LKPP Regional Bengkulu menyajikan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu di Regional Bengkulu. Neraca LKPP Regional Bengkulu disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Neraca Kementerian/Lembaga dengan Neraca Bendahara Umum Negara (BUN) di Bengkulu.

Neraca LKPP Regional Bengkulu per 31 Desember 2023 menunjukkan posisi-posisi kekayaan Pemerintah Pusat di Bengkulu sebesar Rp18,97 triliun, naik sebesar 4,24% atau sebesar Rp771,19 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022 (y-on-y). Kenaikan tersebut dikarenakan oleh Kenaikan Aset lancar yang mencapai 119,02% (y-on-y) atau naik sebesar Rp952,29 miliar.





Tabel 2.17 Neraca LKPP Regional Bengkulu (dalam Rupiah)

Uraian	2022 (Audited)	2023 (Audited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Aset	18.231.034.326.568	19.100.970.370.716	4,77%	869.936.044.148
Aset lancar	800.109.569.333	1.752.403.028.945	119,02%	952.293.459.612
Kas dan setara kas	239.754.006.097	327.464.233.169	36,58%	87.710.227.072
Investasi jangka pendek	10.000.000.000	42.180.831.724	321,81%	32.180.831.724
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.185.509.401	2.943.998.637	-29,66%	- 1.241.510.764
Uang Muka Belanja (prepayment)	4.744.360	2.341.650	-50,64%	- 2.402.710
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.215.893.967	2.965.853.745	-29,65%	- 1.250.040.222
Piutang (Bruto)	287.144.783.980	404.910.253.548	41,01%	117.765.469.568
Piutang (Neto)	107.162.566.973	266.427.659.190	148,62%	159.265.092.217
Persediaan	434.786.848.535	1.110.418.110.830	155,39%	675.631.262.295
Investasi jangka panjang	-	-	-	-
Aset tetap	17.265.429.498.947	17.052.630.610.990	-1,23%	- 212.798.887.957
Tanah	8.459.724.573.611	8.487.827.132.196	0,33%	28.102.558.585
Peralatan dan mesin	3.811.915.542.692	4.175.866.320.459	9,55%	363.950.777.767
Gedung dan bangunan	2.962.544.090.596	3.308.234.825.382	11,67%	345.690.734.786
Jalan, irigasi, dan jaringan	9.927.355.602.932	10.420.826.998.488	4,97%	493.471.395.556
Aset tetap lainnya	170.733.132.272	167.707.605.709	-1,77%	- 3.025.526.563
Konstruksi dalam pengerjaan	426.862.819.952	394.679.488.223	-7,54%	- 32.183.331.729
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	25.759.135.762.055	26.955.142.370.457	4,64%	1.196.006.608.402
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 8.493.706.263.108	- 9.902.511.759.467	16,59%	- 1.408.805.496.359
Properti Investasi	-	261.856.389	100,00%	261.856.389
Dana cadangan	-	-	-	-
Piutang jangka panjang	244.045.103	233.805.105	-4,20%	10.239.998
Aset lainnya	165.251.213.185	295.441.069.287	78,78%	130.189.856.102
Kewajiban / Utang	28.559.367.268	127.298.685.832	345,73%	98.739.318.564
Kewajiban jangka pendek	28.559.367.268	127.298.685.832	345,73%	98.739.318.564
Kewajiban jangka panjang	-	0	-	-
Ekuitas	18.202.474.959.300	18.973.671.684.884	4,24%	771.196.725.584

Sumber: LKPP dan LSKP Kanwil DJPb Bengkulu 2022 – 2023 audited (diolah)

Posisi Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp19,10 triliun, meningkat sebesar 4,77% (y-on-y) atau sebesar Rp869,93 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022. Pada aset lancar per 31 Desember 2023 tumbuh 119,02% (y-on-y) atau naik sebesar Rp952,29 miliar. Begitu pula dengan aset lainnya yang meningkat sebesar 78,78% atau sebesar 130,18 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022. Sedangkan aset tetap mengalami kontraksi mencapai 1,23% (y-on-y) atau menurun Rp212,79 miliar. Penurunan Aset tetap didominasi oleh naiknya penyusutan Aset Tetap sebesar 16,59% (y-on-y) atau Rp1,40 triliun.

Untuk Kewajiban Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp127,29 miliar yang seluruhnya bersumber

dari Kewajiban jangka Pendek, kewajiban tumbuh sebesar 345,73% (y-on-y) atau naik sebesar Rp98,73 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022.

2.1.4.2 Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp1,99 Triliun yang terdiri Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Lainnya.





Proporsi terbesar Belanja Modal Pemerintah Pusat tahun 2023 yaitu pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mencapai 62,45%, sementara yang terkecil adalah untuk

Belanja Modal Tanah sebesar 0,17% dari total Realisasi Belanja Modal Pemerintah Pusat.

Tabel 2.18 **Belanja Modal Pemerintah Pusat (dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	Proporsi Realisasi
Bel. Modal Tanah	8.707.130.000	1.520.180.000	0,17%
Bel. Peralatan dan Mesin	483.046.782.815	71.923.955.107	8,01%
Bel. Gedung dan Bangunan	573.775.866.732	226.508.517.973	25,21%
Bel Jalan, Irigasi dan Jaringan	880.199.728.676	561.069.889.366	62,45%
Bel Aset Tetap Lainnya	48.753.749.121	4.015.207.740	0,45%
Bel. Lainnya	1.710.000.000	33.398.184.575	3,72%
Jumlah	1.996.193.257.344	898.435.934.761	100,00%

Sumber: LKPP dan LSKP Kanwil DJPb Bengkulu 2023 audited (diolah)

Namun demikian jika ditinjau dari Neraca Pemerintah LKPP, terdapat kontraksi pada Aset tetap sebesar 1,23% atau turun sebesar Rp212,79 miliar. Pada Neraca LKPP tahun 2023 paling besar penurunan pada nilai Aset berupa Konstruksi dalam pengerjaan sebesar 7,54% atau turun sebesar Rp32,18 miliar.

2.1.4.3 Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Objek PNBPN meliputi : Pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dan dan hak negara lainnya.

Realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp536,64 miliar atau tumbuh 32,05 persen dari penerimaan PNBPN tahun sebelumnya sebesar Rp406,41 miliar. Penerimaan PNBPN terbesar berasal dari kontribusi PNBPN Bukan pajak Lainnya yang mencapai Rp264,50 miliar.

Tabel 2.19 **Realisasi PNBPN 2022-2023 (dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	183.806.444.430	264.506.371.853	43,90%	80.699.927.423
Pendapatan Badan Layanan Umum	222.604.440.618	272.139.795.968	22,25%	49.535.355.350
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	406.410.885.048	536.646.167.821	32,05%	130.235.282.773

Sumber: LKPP LRA Kanwil DJPb Bengkulu 2022-2023 (diolah)

Peningkatan capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditopang oleh kenaikan Pendapatan Penerimaan Negara

Bukan Pajak Lainnya sebesar 43,90% atau Rp80,69 miliar dan pendapatan BLU sebesar 22,25 persen atau Rp49,53 miliar.

Tabel 2.20 **Realisasi PNBPN 2022-2023 (dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	183.806.444.430	264.506.371.853	43,90%	80.699.927.423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	4.485.115.492	4.806.239.610	7,16%	321.124.118





Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Jasa	109.313.581.929	119.582.362.404	9,39%	10.268.780.475
Pendapatan Pendidikan	47.871.631.000	40.087.176.409	-16,26%	-7.784.454.591
Pendapatan Lain-lain	22.136.116.009	100.030.593.430	351,89%	77.894.477.421
Pendapatan Badan Layanan Umum	222.604.440.618	272.139.795.968	22,25%	49.535.355.350
Pendapatan Jasa Layanan Umum	214.952.828.169	258.246.357.725	20,14%	43.293.529.556
Pendapatan Hibah BLU		10.000.000		10.000.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.287.129.630	4.752.001.024	269,39%	3.464.871.394
Pendapatan dari Alokasi APBN		39.050.000		39.050.000
Pendapatan BLU Lainnya	6.364.482.819	9.092.387.219	42,86%	2.727.904.400

Sumber: LKPK LRA Kanwil DJPb Bengkulu 2022 – 2023 (diolah)

Salah satu obyek penerimaan dari PNPB adalah penerimaan yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Upaya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara adalah dengan mendayagunakan BMN yang idle (BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) melalui sistem sewa BMN maupun penjualan BMN. Kontribusi BMN untuk

menghasilkan penerimaan PNPB masih relatif kecil. Tahun 2022, realisasi penerimaan PNPB yang bersumber dari pemanfaatan BMN sebesar Rp4,48 miliar atau hanya berkontribusi sebesar 1,10 persen dari total penerimaan PNPB 2022. Tahun 2023, kontribusi BMN terhadap penerimaan PNPB tumbuh menjadi Rp4,80 miliar atau berkontribusi sebesar 0,90 persen dari total penerimaan PNPB tahun 2023.

Tabel 2.21 Perkembangan Realisasi PNPB 2022-2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	36.900.000	6.000.000
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.036.560.000	1.457.157.270
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	755.140.000	943.704.410
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	62.500.000	69.510.000
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	302.725.680	445.364.501
424939- Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	76.997.499	-
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.950.525.740	1.587.966.237
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	767.735.663	739.100.891
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.214.574.462	1.445.213.218

Sumber: Buku Besar Kas LKPP TW 2022 – 2023 (diolah)

2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Tabel dibawah ini menyajikan data profil berupa realisasi APBD secara konsolidasi seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2023 sampai dengan 2024.

Tabel 2.22 Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	12.321,01	8.049,64	65%	13.314,22	9.168,39	68,86%	13,90%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.725,27	1.121,97	65,03%	1.864,79	1.061,8	56,94%	-5,35%





Uraian	2023			2024			Growth (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Transfer	10.417,85	6.883,38	66,07%	11.333,38	7.902,61	69,73%	14,81%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	177,89	44,29		116,05	203,98	175,77%	360,53%
Belanja Daerah	12.695,96	7.513,26	59,18%	13.780,47	8.031,3	58,28%	6,90%
Belanja Operasi	8.695,77	5.510,54	13,32%	9.907,64	5.958,61	60,14%	8,13%
- Belanja Pegawai	5.295,15	3.691,81	16,54%	5.673,37	3.747,81	66,06%	1,52%
- Belanja Barang dan Jasa	3.120,4	1.669,12	8,58%	3.560,1	1.695,97	47,64%	1,61%
- Belanja Bunga	1,1	1,1	71,11%				
- Belanja Subsidi				0,14		0,00%	
- Belanja Hibah	268,36	143,13	5,16%	663,41	510,07	76,89%	256,37%
- Belanja Sosial	10,16	5,38	2,03%	10,62	4,76	44,82%	-11,62%
Belanja Modal	1.996,19	807,59	4,07%	1.915,99	802,67	41,89%	-0,67%
Belanja Tidak Terduga	45,71	,98	1,06%	35,04	0,62	0,69%	-36,99%
Belanja Transfer Pemerintah Daerah	1.958,88	1.194,15	6,25%	1.921,8	1.269,41	66,05%	6,30%
- Belanja Bagi Hasil	383,67		3,74%	340,95	0,36	0,10%	N/A
- Belanja Bantuan Keuangan	1.575,22	1.194,15	6,86%	1.580,85	1.269,05	80,28%	6,27%
Surplus/Defisit	-374,95	536,38	-156,16%	-466,25	1.137,09	-243,88%	111,99%
Pembiayaan Daerah	476,72	190,91	71,96%	497,65	280,69	56,40%	47,03%
Penerimaan Pembiayaan	425,83	235,79	67,75%	481,95	283,69	58,86%	20,31%
- SILPA	425,83	235,79	39,77%	481,95	283,69	58,86%	20,31%
- Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-		
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-		
Pengeluaran Pembiayaan	50,88	44,88	36,73%	15,7	3,0	19,11%	-93,32%
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37,38	37,38	100,00%	-			-100,00%
- Pembentukan Dana Cadangan		-		-	-		
- Penyertaan Modal Daerah	13,5	7,5	55,56%	15,7	3,	19,11%	-60,00%
- Pemberian Pinjaman Daerah					-		
SILPA/SIKPA		727,29			1.477,78		

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan III Bengkulu 2023 – 2024 (diolah)

Komponen PAD. Pajak daerah masih menjadi sumber utama PAD yang terealisasi sebesar Rp804,54 miliar atau 75,77 persen dari total PAD diikuti oleh retribusi daerah sebesar Rp25,84 miliar atau 2,43 persen lalu lain – lain

PAD yang sah sebesar Rp203,98 miliar atau 19,21% dan yang terakhir Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 27,42 miliar atau 2,58% dari total PAD.

Tabel 2.23 Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.725,27	1.121,97	65,03%	1.864,79	1.061,8	56,94%	-5,36%
- Pajak Daerah	1.111,32	779,34	70,13%	1.191,16	804,55	67,54%	3,23%
- Retribusi Daerah	67,07	18,01	26,85%	103,86	25,84	24,88%	43,49%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	39,81	33,92	85,19%	36,03	27,43	76,12%	-19,12%
- Lain-Lain PAD yang Sah	507,08	290,7	57,33%	533,74	203,98	38,22%	-29,83%

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan III Bengkulu 2023 – 2024 (diolah)

Analisis Pertumbuhan (Growth) Pendapatan PAD dan Dana Transfer. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Provinsi Bengkulu dalam periode yang sama pada tahun 2023, maka realisasi pendapatan

daerah untuk periode triwulan III tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 5,36 persen dari Rp1.121,97 miliar tahun 2023 menjadi Rp1.061,8 miliar tahun 2024.





Analisis Tax Ratio PAD Terhadap PDRB. Tax ratio menggambarkan besaran penerimaan pajak daerah yang dapat dipungut dari setiap rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan data sebagaimana pada tabel 2.20, nilai tax ratio Provinsi Bengkulu pada triwulan III tahun 2024 tercatat sebesar 0,67 persen. Ini menunjukkan bahwa dari

setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1 juta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bertambah sebesar Rp670. Penurunan nilai tax ratio sebesar 1,28 persen poin dibandingkan triwulan III tahun 2023 yang mencapai 3,85 persen ini salah satunya disebabkan oleh terlambatnya sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dalam membuat peraturan turunan terhadap Perda PDRD.

Tabel 2.24 **Analisis Tax Ratio APBD Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan III Tahun 2024**

Uraian	Realisasi s.d Tw III 2023	Realisasi s.d Tw III 2024
Pendapatan Perpajakan Daerah	775,98 M	514,67 M
PDRB	71,14 T	76,99 T
Tax Ratio Pemda	1,09%	0,67%

Sumber: LKPDK Triwulan III 2023 dan BPS Provinsi Bengkulu (diolah)

Analisis Kemandirian Fiskal Pemda. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda berkenaan. Sampai dengan Triwulan III TA 2024, rasio kemandirian Pemda di Bengkulu mencapai angka **11,81%** atau memiliki kemampuan keuangan

"rendah sekali". Dalam hal ini, hampir seluruh Pemda di Bengkulu memiliki kemampuan kemandirian dengan kategori "rendah sekali", kecuali Pemprov Bengkulu yang memiliki kemandirian "Rendah". Pemprov Bengkulu memiliki kemandirian lebih tinggi daripada yang lainnya karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang provinsi Bengkulu dan merupakan pusat aktivitas perekonomian.

Tabel 2.25 **Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024**

Nama Pemda	Rasio Kemandirian Fiskal
Bengkulu	35,15%
Bengkulu Utara	2,83%
Bengkulu Selatan	2,80%
Rejang Lebong	4,55%
Seluma	1,88%
Kaur	1,76%
Muko-Muko	2,44%
Lebong	2,58%
Kepahiang	2,64%
Bengkulu Tengah	4,30%
Kota Bengkulu	17,10%

Sumber: Dit. APK (diolah)

Rumus Rasio Kemandirian Fiskal

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right) \times 100\%$$

2.2.2 Belanja Daerah

Analisis Komposisi Belanja Daerah dan Perbandingannya. Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2024 mencapai Rp8,03 triliun mengalami peningkatan sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,51 triliun. Kenaikan kinerja penyerapan belanja daerah didorong oleh belanja operasi.

Berdasarkan Jenis Belanja Secara agregat, dari pada Triwulan III-2024, rasio belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan proporsi 74,19 persen, diikuti Belanja Transfer Pemerintah Daerah sebesar 15,81 persen sementara belanja modal hanya mencapai 9,99 persen dari total belanja.





2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja untuk memenuhi kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah dan memberi manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi pada Triwulan III-2024 sebesar Rp5.958,61 miliar mengalami peningkatan dari Triwulan III-2023 yang mencapai Rp5.510,54 miliar, secara persentase realisasi belanja operasi tahun 2024 juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan pertumbuhan 8,13 persen (yoy). Secara proporsi, belanja pegawai masih mendominasi dari keseluruhan belanja operasi dengan porsi 62,90 persen.

Tabel 2.26 Belanja Operasi APBD Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Belanja Daerah	12.695,96	7.511,26	59%	13.780,47	8.031,3	58%	6,90%
Belanja Operasi	8.695,17	5.510,54	63%	9.907,64	5.958,61	60%	8,13%
- Belanja Pegawai	5.295,35	3.691,81	70%	5.673,37	3.747,81	66%	1,52%
- Belanja Barang dan Jasa	3.120,4	1.669,12	53%	3.560,1	1.695,97	48%	1,61%
- Belanja Bunga	1,1	1,1	100%				-100,00%
- Belanja Subsidi				0,14		0%	
- Belanja Hibah	268,36	143,13	53%	663,41	510,07	77%	256,37%
- Belanja Sosial	10,16	5,38	53%	10,62	4,76	45%	-11,62%

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan III Bengkulu 2023 – 2024 (diolah)

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Realisasi belanja modal pada Triwulan III- 2024 mencapai Rp802,67 miliar lebih kecil dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp807,59 miliar. Kontraksi sebesar 0,61% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal memiliki proporsi sebesar 9,99% dari total Belanja Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentunya alokasi Belanja Modal dalam 3 tahun ke depan dapat ditingkatkan minimal 40 persen dari alokasi belanja daerah.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sampai dengan Triwulan III-2024, realisasi belanja tidak terduga baru mencapai Rp619,2 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp982,73 juta.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Realisasi Belanja Transfer sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp1.269,41 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen (yoy). Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memperhatikan target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah yang ada.

2.2.3 Surplus/Defisit APBD

Secara konsolidasian, pelaksanaan APBD Bengkulu sampai dengan Triwulan III TA 2023-2024 menunjukkan selalu terjadi Surplus-defisit, besaran surplus dari tahun 2023 sampai dengan 2024 semakin mengecil mengindikasikan terjadi sedikit perbaikan dalam perencanaan kas antara Penerimaan Kas dan Pengeluaran (Tahun 2024) meskipun masih belum pada tahap optimal.

Jika dirinci per Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Triwulan III 2024, berikut data surplus/defisit dari masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu:





Tabel 2.27 Surplus/Defisit Seluruh Pemda Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 (dalam Rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Ket
1.	Provinsi Bengkulu	2.093.917.692.655	2.021.412.112.767	72.505.579.888	SURPLUS ▲
2.	Bengkulu Utara	793.159.017.141	841.558.229.414	- 48.399.212.273	DEFISIT ▼
3.	Bengkulu Selatan	714.448.319.393	731.803.610.247	- 17.355.290.854	DEFISIT ▼
4.	Rejang Lebong	786.129.831.195	661.339.293.162	124.790.538.033	SURPLUS ▲
5.	Seluma	646.937.541.866	593.082.212.988	53.855.328.878	SURPLUS ▲
6.	Kaur	727.701.335.942	416.161.826.606	311.539.509.336	SURPLUS ▲
7.	Muko-Muko	673.087.962.283	625.556.895.447	47.531.066.836	SURPLUS ▲
8.	Lebong	526.988.454.845	442.179.375.946	84.809.078.899	SURPLUS ▲
9.	Kepahiang	544.852.573.881	382.759.290.982	162.093.282.899	SURPLUS ▲
10.	Bengkulu Tengah	585.192.257.498	575.198.372.774	9.993.884.724	SURPLUS ▲
11.	Kota Bengkulu	894.933.591.071	740.252.910.182	154.680.680.889	SURPLUS ▲

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan III Bengkulu 2023 – 2024 (diolah)

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan pada triwulan III

tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar Rp47,89 miliar atau 16,88 persen (y0y), sementara pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari Rp44,88 miliar menjadi Rp3,0 miliar.

Tabel 2.28 Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pembiayaan Daerah	476,72	190,91	71,96%	497,65	280,69	56,40%	47,03%
Penerimaan Pembiayaan	425,83	235,79	67,75%	481,95	283,69	58,86%	16,88%
- SILPA	425,83	235,79	39,77%	481,95	283,69	58,86%	20,31%
- Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-		
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-		
Pengeluaran Pembiayaan	50,88	44,88	36,73%	15,7	3,0	19,11%	-1396,09%
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37,38	37,38	100,00%	-	-		-100,00%
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-		
- Penyertaan Modal Daerah	13,5	7,5	55,56%	15,7	3,	19,11%	-60,00%
- Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-		

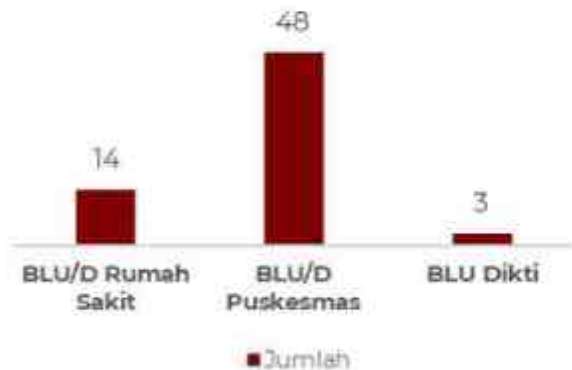
Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan III Bengkulu 2023 – 2024 (diolah)





2.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Grafik 2.8 Jumlah BLU Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024



Sumber: BPKP (diolah)

Monitoring dan asistensi BLU sebagai salah satu tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan agar BLU memiliki kinerja pengelolaan keuangan dan proses bisnis yang baik sehingga mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil monitoring dan asistensi BLU yang dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024, di lingkup wilayah provinsi Bengkulu terdapat total 65 BLU di Provinsi Bengkulu dengan rincian 48 BLUD Puskesmas dan 14 BLUD Rumah Sakit yang tersebar di 11 Pemerintah Daerah, dan 3 BLU Dikti.

Grafik 2.9 Progress BLU/D Puskesmas per Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan III 2024



• Jumlah BLUD • Dalam Proses Menjadi BLUD

Sumber: BPKP (diolah)

Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan target Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadikan seluruh Puskesmas yang jumlahnya mencapai 179 unit menjadi BLUD. Hingga triwulan III sebagaimana terlihat pada tabel 2.26 terdapat 64 Puskesmas sedang dalam proses untuk menjadi BLU Daerah. Mekanisme penyaluran BOK

Puskesmas dan klaim BPJS Kesehatan juga turut mendorong percepatan BLUD Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD karena dianggap lebih sesuai. Pada akhir tahun 2023, telah selesai dibangun RSUD Pratama Ippuh di Mukomuko yang bersumber dari anggaran DAK Fisik TA 2023 dan diharapkan mulai beroperasi pada November tahun 2024.

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kanwil DJPb Bengkulu dalam pembinaan pengelolaan keuangan BLUD, pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan asistensi dan pembinaan sebagaimana terlihat pada tabel 2.27. Kegiatan tersebut mencakup penandatanganan MoU dengan Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan BLUD. Selain itu, dilakukan *profiling* keuangan dan layanan RSUD se-Provinsi Bengkulu serta asistensi peningkatan kapasitas pengelola keuangan di RSUD Hasanuddin Damrah, Manna. Kanwil DJPb juga mengadakan koordinasi asistensi terkait tata kelola dan remunerasi dewas untuk RSUD Kepahiang, yang diakhiri dengan monitoring oleh Pemerintah Daerah BPKP guna memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan BLUD belum sepenuhnya melaksanakan praktik proses bisnis pengelolaan keuangan BLU sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu dampaknya adalah adanya kasus hukum yang timbul dari praktik pengelolaan keuangan BLUD yang tidak sehat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BLUD di Provinsi Bengkulu, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD di Provinsi Bengkulu di antaranya:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami operasional BLUD terbatas.
2. Pejabat di lingkungan daerah yang belum memahami esensi, makna, dan operasional BLUD.
3. Pergantian pejabat yang sering terjadi, sehingga pejabat yang baru perlu belajar lagi mengenai BLU.

Realisasi Belanja Negara di Bengkulu pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp11.692,21 miliar, yang setara dengan 69,74 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.





Tabel 2.29 Kegiatan Asistensi & Pembinaan BLUD Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1	Penandatanganan MoU Pengelolaan Keuangan Negara dengan Kabupaten Kepahiang	24/07/2024	Pemkot Bengkulu	Bupati Kepahiang, Sekretaris Daerah Kepahiang, Kemenkeu Satu Bengkulu, Seluruh OPD Kepahiang	Membangun sinergi dan kolaborasi peningkatan kinerja BLUD
2	Koordinasi Asistensi BLUD RSUD Kepahiang	26/07/2024	RSUD Kepahiang	Direktur dan Bidang Keuangan RSUD Kepahiang, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu	Konsultasi terkait pembentukan, tata kelola, kinerja, dan remunerasi dewas pada BLUD
3	Penandatanganan MoU Pengelolaan Keuangan Negara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah	15/08/2024	Pemkab Bengkulu Tengah	Pj. Bupati Bengkulu Tengah, Asisten II Bengkulu Tengah, Kepala BPKAD Bengkulu Tengah, Kemenkeu Satu Bengkulu, Seluruh OPD Bengkulu Tengah	Membangun sinergi dan kolaborasi peningkatan kinerja BLUD
4	Profiling Keuangan & Layanan	29/08/2024	BLUD Pemerintah Daerah	Seluruh RSUD Se-Propinsi Bengkulu	Permintaan data sebagai pemanfaatan data/informasi keuangan BLUD
5	Asistensi Pembinaan BLUD di RSUD Hasanuddin Damrah, Manna	24/09/2024	RSUD Hasanuddin Damrah, Manna	Direktur dan Bidang Keuangan RSUD Manna, KPPN Manna	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan BLUD

Sumber: Lap. Pelaksanaan Asistensi Pembinaan BLUD Kanwil DJPb Prov. Bengkulu Triwulan III 2024 (diolah)

2.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Penyerapan Anggaran yang lambat merupakan permasalahan yang terjadi di setiap tahun, lambatnnya serapan belanja APBD membuat perekonomian daerah tidak maksimal karena kurangnya stimulus untuk menggerakkan ekonomi sehingga berdampak berdampak juga pada perekonomian nasional. Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama yang mengakibatkan keterlambatan pada pengesahannya, sehingga target realisasi anggaran tidak tercapai.
2. Masih terbatasnya jaringan internet pada OPD dan sub unit kerja (misalnya: kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan puskesmas) menjadi permasalahan dalam kelancaran penyampaian laporan pertanggungjawaban dan penatausahaan keuangan.
3. Perubahan sistem pengelolaan keuangan pada tahun 2024, sehingga OPD membutuhkan penyesuaian kembali untuk mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah.

4. Proses administrasi, perijinan, pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan pada awal-awal tahun yang selalu setiap tahunnya bertumpu di akhir tahun dan menunggu perubahan APBD.
5. Transfer dana DBH antar daerah (DBH Provinsi) belum ditransferkan oleh provinsi untuk Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024 dan sampai saat ini.
6. Serapan DAK Fisik kurang terealisasi menyebabkan kurangnya penyerapan realisasi. Hal ini dikarenakan OPD teknis belum melaporkan/disampaikan laporan DAK Fisik tersebut ke aplikasi OM SPAN.

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan III 2024 terealisasi sebesar Rp3,82 triliun belanja konsolidasian terealisasi sebesar Rp12,17 triliun, sehingga dari struktur tersebut menyisakan defisit anggaran sebesar Rp8,35 triliun. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto yang terealisasi di triwulan III 2024 sebesar Rp280,69 miliar sehingga nilai Sisa Kurang Pembiayaan anggaran di Provinsi Bengkulu sebesar Rp-8,06 triliun.





Tabel 2.30 LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Trw. III 2023	Triwulan III 2024				
	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Growth%
Pendapatan	3.344,06	2.407,81	8.987,35	-7.570,68	3.824,47	14,37%
Penerimaan perpajakan	2.596,36	2.019,28	804,55	0	2.823,83	8,76%
PNBP	747,71	388,52	8.182,8	-7.570,68	1.000,64	33,83%
- Pendapatan SDA, Bagian Laba BUMN/D, PNBP lainnya, BLU/D	663,53	388,52	1.279,92	-777,8	890,65	34,23%
- Bantuan Keuangan	68,83	0	.	0	.	-100,00%
- Penerimaan Hibah	15,35	0	0	0	0	-100,00%
- Pendapatan Transfer	-	0	6.902,88	-6.792,89	109,99	N/A
Belanja	11.106,63	11.709,54	8.031,3	7.570,68	12.170,16	9,58%
Belanja Pegawai	5.042,75	1.596,	3.747,81		5.343,81	5,97%
Belanja Barang dan Jasa	3.008,51	1.455,4	1.695,97		3.151,37	4,75%
Belanja Modal	1.307,8	516,27	802,67		1.318,93	0,85%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	1,1	0	0		0	-100,00%
Belanja Subsidi		0	0		0	
Belanja Hibah	143,13	0	510,07		510,07	256,37%
Belanja Bantuan Sosial	16,44	13,75	4,76		18,51	12,59%
Belanja Lain-lain	0,98	.	,62		,62	-36,99%
Belanja Transfer	1.585,91	8.128,12	1.269,41	7.570,68	1.826,84	15,19%
Surplus/Defisit Anggaran	-7.762,56	-9.301,73	956,04		-8.345,68	7,51%
Pembiayaan	190,91	0	280,69		280,69	47,03%
Penerimaan Pembiayaan Drh	235,79	0	283,69		283,69	20,31%
Pengeluaran Pembiayaan Drh	44,88	0	3,0		2,0	-95,54%
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-7.571,65	-9.301,73	1.236,73		-8.064,99	6,52%

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan III tahun 2023 – 2024

2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Analisis kontribusi pendapatan konsolidasian terhadap pendapatan total konsolidasian. Pada triwulan III 2024 realisasi pendapatan konsolidasian mencapai Rp3,82 triliun. Dimana penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama pendapatan konsolidasian dengan realisasi mencapai Rp2,82 triliun menyumbangkan 73,84 persen dari total pendapatan konsolidasian. Selanjutnya diikuti oleh penerimaan PNBP dengan realisasi mencapai Rp1,0 triliun atau 26,16 persen dari total pendapatan konsolidasian.

Analisis Pertumbuhan (Growth) Komponen pendapatan konsolidasian. Pada Triwulan III 2024 realisasi pendapatan konsolidasian tumbuh positif jika dibandingkan triwulan III 2023 yaitu sebesar 14,37

persen, dimana pada triwulan III 2023 terealisasi sebesar Rp3,34 triliun menjadi Rp3,82 triliun pada triwulan III 2024. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kenaikan penerimaan PNBP sebesar 33,83 persen atau Rp252,93 miliar dan penerimaan perpajakan sebesar 8,76% atau Rp227,47 miliar.

Analisis Tax Ratio konsolidasian. Dengan realisasi penerimaan pajak konsolidasian sebesar Rp2,82 triliun maka tax ratio pajak konsolidasian triwulan III 2024 menjadi 3,66 persen atau naik sebesar 0,61 persen poin dari triwulan III tahun sebelumnya.





Tabel 2.31 Analisis *Tax Ratio* Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan III Tahun 2024

Tahun	Real Pener. Pajak (triliun)	PDRB (ADHB) (triliun)	Tax Ratio
2023	2,59	71,14	3,64%
2024	2,82	76,99	3,66%

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan III tahun 2023 – 2024 (diolah)

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Analisis komposisi komponen Belanja Pemerintah terhadap total Belanja konsolidasian. Setelah dilakukan konsolidasi belanja antara Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah, diketahui bahwa belanja Pemerintah Pusat triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp11,70 triliun memberi andil terbesar dengan porsi sebesar 59,32 persen dari total belanja konsolidasian, sisanya belanja Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp8,03 triliun atau 40,68 persen dari total belanja konsolidasian. Pada belanja konsolidasi dilakukan eliminasi terhadap akun yang bersifat resiprokal pada LRA Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp7,57 triliun yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya Pemerintah Daerah.

Analisis pertumbuhan (growth) Belanja Pemerintah dan TKDD. Pada triwulan III 2024 realisasi belanja konsolidasian tumbuh sebesar 9,58persen dibandingkan triwulan III tahun 2023. Kenaikan ini dikontribusi oleh naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bansos, belanja transfer, dan belanja hibah.

Analisis rasio Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB. Pada triwulan III 2024 rasio belanja konsolidasian meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan rasio belanja ini disebabkan pertumbuhan realisasi belanja konsolidasian yang cukup signifikan walaupun PDRB s.d triwulan III 2024 juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar secara yoy. Ini menunjukkan kinerja perekonomian di Provinsi Bengkulu sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah. Rasio belanja ini juga memberikan gambaran mengenai besaran kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Bengkulu yang cukup signifikan. Belanja pemerintah juga memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Tabel 2.32 Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan III Tahun 2024

Tahun	Realisasi Belanja Konsolidasi (triliun)	PDRB (ADHB) (triliun)	Rasio Belanja
2023	11,1	71,14	15,60%
2024	12,7	76,99	15,81%

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan III tahun 2023 – 2024 (diolah)

2.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian

Kinerja konsolidasian APBN - APBD triwulan III 2024 memperlihatkan nyatanya *deficit spending* di Provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar Rp8,34 triliun yang mengalami kenaikan secara yoy dibanding triwulan yang sama tahun 2023 sebesar Rp583,12 miliar atau 7,51 persen. Hal ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah di Provinsi Bengkulu terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Analisis pertumbuhan pembiayaan konsolidasian. Pada triwulan III 2024 pembiayaan konsolidasian mengalami pertumbuhan sebesar Rp89,77 miliar atau 47,03 persen jika dibandingkan tahun 2023.

2.3.5 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

2.3.5.1 Permasalahan Pelaksanaan APBD Triwulan III Tahun 2024

Penyerapan Anggaran yang lambat merupakan permasalahan yang terjadi di setiap tahun, lambatnya serapan belanja APBD membuat perekonomian daerah tidak maksimal karena kurangnya stimulus untuk menggerakkan ekonomi sehingga berdampak juga pada perekonomian nasional.

Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pos pendapatan khususnya pendapatan transfer (TKD) yang belum salur sehingga penyerapan belanja barang maupun belanja modal tidak terealisasi secara optimal.
2. Beberapa kegiatan/ sub kegiatan baru dalam tahap perikatan (kontrak dengan pihak ketiga/ rekanan), belum dapat diselesaikan sampai tahap pencairan dana.
3. Perubahan sistem pengelolaan keuangan pada tahun 2024, sehingga OPD membutuhkan penyesuaian kembali untuk mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah.
4. Proses administrasi, perijinan, pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan pada awal-awal tahun yang selalu setiap tahunnya bertumpu di akhir tahun dan menunggu perubahan APBD.
5. Banyak kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan karena ketidaksesuaian dengan perencanaan anggarannya.





2.3.5.2 Optimalisasi atas Kas di RKUD

Secara umum perkembangan saldo kas di RKUD sejak Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Saldo RKUD per tanggal 31 Desember 2023 keseluruhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu sebesar Rp434,8 Miliar, mayoritas sisa dana RKUD berasal dari sumber dana sisa TKD, dengan rincian saldo RKUD terdiri dari sisa dana TKD sebesar Rp432,6 Miliar (99,51%), dana cadangan sebesar Rp571 Juta (0,13%), dana pihak ketiga sebesar Rp1,5 Miliar (0,36%). Dana sisa di RKUD tersebut merupakan salah satu sumber dana investasi daerah, yang digunakan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan jasa giro. Selama tahun 2023 konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu, pendapatan jasa giro dan/atau pendapatan bunga yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah lain-lain yang sah terkumpul sebesar Rp24,7 Miliar, apabila dibandingkan dengan total PAD maka pendapatan jasa giro tersebut sebesar 1,39%. Apabila pendapatan jasa giro dan/atau bunga pada tahun 2023 dan tahun 2022 dibandingkan, secara umum penerimaan jasa giro mengalami penurunan, pada tingkat konsolidasi seluruh pemda mengalami kontraksi sebesar 23,31%.

Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d Tahun 2023, terdapat dana bagi hasil PKB dan BBNKB pemkot/pemkab yang belum disalurkan, hal tersebut terlihat pada saldo utang dana bagi hasil. Sejak tahun 2021 s.d. tahun 2023 utang dana bagi hasil mengalami tren penurunan. Keterlambatan penyaluran dana bagi hasil tersebut menyebabkan penundaan/optimalisasi belanja daerah Pemda Kab./Kota ke tahun selanjutnya.

Berdasarkan data pada LKPD 2023 (audited) diketahui masih terdapat sisa dana TKD lebih dari 2 tahun, misalnya pada Pemerintah Daerah Kab. Seluma yakni DAK Afiriasi Bidang Kesehatan TA 2020 senilai Rp53 Miliar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah teknis penyelesaian dana TKD yang masih mengendap di RKUD Pemerintah Daerah, misalnya dengan melakukan rekonsiliasi sisa DAK antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut diatas, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengingat saldo kas di RKUD pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh dana TKD, maka untuk menjamin efektifitas penyaluran dan penggunaan dana TKD serta mengendalikan saldo kas menganggur pada Pemerintah Daerah, pemerintah pusat perlu memonitor pergerakan saldo kas di RKUD dan menyalurkan dana TKD sesuai kebutuhan. Implementasi mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) masih relevan untuk dilanjutkan bahkan diperluas untuk jenis TKD yang lain.
2. Pemerintah Daerah perlu didorong untuk mengimplementasikan manajemen kas yang baik melalui penerapan perencanaan penerimaan dan penarikan dana SKPD secara disiplin sehingga diperoleh data perkiraan kas menganggur yang lebih akurat dalam rangka menentukan strategi optimalisasi saldo kas yang aman dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah provinsi diharapkan dapat segera merealisasikan hak bagi hasil kabupaten/kota supaya dapat segera digunakan untuk belanja daerah dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Secara umum perkembangan saldo kas di RKUD sejak Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Saldo RKUD per tanggal 31 Desember 2023 keseluruhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu sebesar Rp434,8 Miliar, mayoritas sisa dana RKUD berasal dari sumber dana sisa TKD, dengan rincian saldo RKUD terdiri dari sisa dana TKD sebesar Rp432,6 Miliar (99,51%), dana cadangan sebesar Rp571 Juta (0,13%), dan pihak ketiga sebesar Rp1,5 Miliar (0,36%).



BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH





Benteng

FORT MARLBOROUGH

Benteng Marlborough (Inggris: Fort Marlborough) adalah benteng peninggalan Inggris di Kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company (EIC) tahun 1714-1719 di bawah pimpinan gubernur Joseph Callet sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah Kota Bengkulu dan memungungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu; sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini seorang opsir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian pada tahun 1807, residen Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di Kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris.

sumber artikel : id.wikipedia.org



BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

3.1 Gambaran Umum UMKM di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu memiliki sumber daya ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional. Sumber daya ekonomi tersebut terdiri dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan energi. Pembangunan ekonomi Bengkulu sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada kondisi stabilitas ekonomi global.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Bengkulu lebih banyak pada tingkatan barang mentah dan barang setengah jadi. Proses hilirisasi SDA, terutama yang menjadi komoditas unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga, ekonomi Bengkulu relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Provinsi Bengkulu memainkan peran penting dalam perekonomian daerah. Mereka berkontribusi dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Berikut adalah gambaran umum UMKM yang dominan di Provinsi Bengkulu:

1. Dominasi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sebagian besar UMKM di Bengkulu bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, terutama pengolahan hasil perkebunan seperti kopi, karet, dan kelapa sawit. Banyak UMKM kecil yang mengolah produk turunan dari komoditas ini, misalnya kopi bubuk, minyak kelapa, dan produk-produk berbasis karet. Komoditas unggulan seperti kopi Bengkulu, yang terkenal dengan cita rasa robusta, telah berhasil menembus pasar nasional dan mulai merambah pasar internasional.

2. Usaha Perikanan dan Olahan Hasil Laut

Di daerah pesisir, banyak UMKM yang bergerak di sektor perikanan, baik dalam bentuk usaha penangkapan ikan, pengolahan ikan, hingga produksi hasil laut lainnya seperti ikan asin dan

kerupuk ikan. Produk olahan hasil laut Bengkulu, seperti ikan asap, sambal ikan, dan abon ikan, banyak diminati oleh masyarakat lokal dan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

3. Kerajinan Tangan dan Kriya Lokal

UMKM di Bengkulu juga berkembang dalam sektor kerajinan, seperti anyaman bambu, kerajinan dari rotan, tenun khas Bengkulu (Kain Besurek), dan perhiasan emas atau perak. Kain Besurek, yang bermotif khas kaligrafi Arab, merupakan salah satu produk kriya unggulan yang telah mendapatkan tempat di pasar nasional dan internasional.

4. Sektor Makanan dan Minuman Olahan

UMKM yang bergerak dalam makanan olahan dan kuliner cukup banyak ditemui di Bengkulu, terutama produksi makanan tradisional seperti kue tat, dodol jeruk kalamansi, manisan, dan sambal Bengkulu. Sektor ini terus tumbuh dengan adanya dukungan dari masyarakat yang mulai memperkenalkan produk makanan lokal di media sosial, sehingga menambah popularitas dan permintaan pasar.

5. Tantangan yang Dihadapi

Akses Modal dan Pembiayaan: Banyak UMKM menghadapi kendala dalam mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Ini disebabkan oleh kurangnya akses ke layanan keuangan formal dan persyaratan pinjaman yang sulit. **Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan SDM:** Keterbatasan kemampuan dalam manajemen, pemasaran, dan produksi sering menjadi penghambat pertumbuhan. Banyak pelaku UMKM yang masih membutuhkan pelatihan dalam hal manajemen keuangan, pemasaran digital, dan teknik produksi yang lebih efisien. **Pemasaran dan Branding:** Meskipun produk-produk UMKM Bengkulu memiliki kualitas yang baik, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam hal branding dan pemasaran, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

6. Dukungan Pemerintah dan Program Pengembangan

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan berbagai dukungan bagi UMKM melalui pelatihan, bantuan permodalan melalui skema penyaluran Kredit Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)



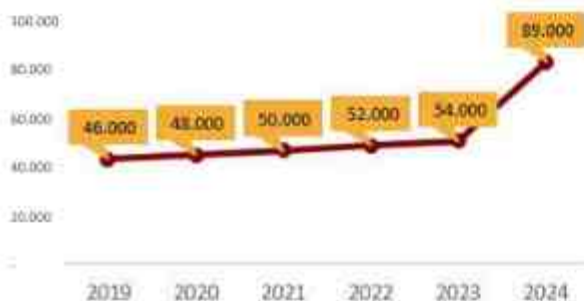


dan Utra Mikro (UMi), serta fasilitasi akses pasar. Program-program ini mencakup pendampingan untuk membantu UMKM dalam hal digitalisasi, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM serta memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, terdapat beberapa program untuk mengembangkan wisata berbasis UMKM, seperti pengembangan sentra oleh-oleh dan promosi produk-produk lokal melalui event pariwisata.

3.1.1 Sebaran UMKM di Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 89.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Bengkulu telah terdaftar dalam Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PLKUMKM). Jumlah UMKM tersebut paling banyak berasal dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma.

Grafik 3.1 Tren Perkembangan Jumlah UKM di Prov. Bengkulu tahun 2012-2024



Sumber: BPS Prov. Bengkulu (diolah)

Tren jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah UMKM tercatat sebanyak 46.000 unit dan terus meningkat hingga 89.000 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai inisiatif pemerintah untuk mendukung sektor UMKM melalui pelatihan, bantuan permodalan, dan akses pasar.

Dukungan ini tidak hanya membantu dalam peningkatan jumlah UMKM, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas dan daya saing usaha kecil dan menengah di Bengkulu, menjadikannya salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal.

Jumlah dan sebaran UMKM di Provinsi Bengkulu tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan konsentrasi yang bervariasi berdasarkan potensi dan karakteristik ekonomi tiap wilayah. Berikut adalah gambaran umum mengenai jumlah dan sebaran UMKM di Bengkulu:

- 1. Kota Bengkulu:** Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bengkulu memiliki konsentrasi UMKM tertinggi. UMKM di kota ini banyak bergerak di bidang perdagangan, kuliner, dan kerajinan, seperti Kain Besurek dan oleh-oleh khas Bengkulu.
- 2. Kabupaten Rejang Lebong:** Dikenal sebagai sentra perkebunan kopi dan hortikultura, Rejang Lebong memiliki banyak UMKM yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan. UMKM kopi cukup mendominasi di wilayah ini, dengan produk seperti kopi robusta dan produk olahannya.
- 3. Kabupaten Kepahiang:** Kabupaten ini juga terkenal dengan komoditas kopi, dengan banyak UMKM yang bergerak di sektor pengolahan kopi serta produk pertanian lainnya.
- 4. Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah:** Kedua wilayah ini memiliki potensi perkebunan dan hasil laut yang signifikan. Banyak UMKM yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut, seperti ikan dan rumput laut, serta produk perkebunan lainnya. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak tidak jauh dari Kota Bengkulu, membuat daerah ini juga bergerak pada potensi wisata buatan dan wisata alam yang mendukung dengan akses yang cukup mudah ditempuh.
- 5. Kabupaten Mukomuko:** Mukomuko dikenal sebagai salah satu sentra perikanan dan kelapa sawit, dengan UMKM yang berfokus pada pengolahan hasil laut dan produk turunan kelapa sawit.
- 6. Kabupaten Kaur dan Bengkulu Selatan:** Wilayah ini juga memiliki banyak UMKM di sektor perikanan dan perkebunan, dengan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan berbagai produk olahan dari hasil tangkapan laut.
- 7. Kabupaten Bengkulu Utara:** Kabupaten yang berlokasi strategis berada tidak jauh dari Kota Bengkulu yang memiliki keasrian alam yang indah seperti air terjun, bukit barisan, dan keindahan alam lainnya, sehingga membuat UMKM disekitaran wisata alam di Kabupaten Bengkulu Utara semakin berkembang dan menjadi salah satu destinasi wisata yang menjanjikan.

3.1.2 Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

UMKM di Bengkulu menjadi tulang punggung bagi penyerapan tenaga kerja lokal, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan pinggiran kota. Banyak UMKM di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan yang beroperasi dengan skala kecil namun membutuhkan tenaga kerja lokal dalam jumlah cukup besar. Dalam beberapa sektor, seperti pengolahan hasil





UMKM di Bengkulu menjadi tulang punggung bagi penyerapan tenaga kerja lokal, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan pinggiran kota. Banyak UMKM di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan yang beroperasi dengan skala kecil namun membutuhkan tenaga kerja lokal dalam jumlah cukup besar. Dalam beberapa sektor, seperti pengolahan hasil pertanian (kopi, kelapa sawit) dan perikanan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari keluarga pemilik usaha, masyarakat setempat, dan tenaga paruh waktu, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal.

1. Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap

Meskipun data spesifik mengenai jumlah tenaga kerja UMKM di Bengkulu bisa bervariasi, secara keseluruhan UMKM menyerap ribuan tenaga kerja di provinsi ini. Diperkirakan bahwa lebih dari 60% lapangan kerja di sektor informal di Bengkulu disediakan oleh UMKM, terutama di kabupaten-kabupaten dengan potensi pertanian dan kelautan yang besar. Sebagian besar tenaga kerja ini bekerja di bidang pertanian, pengolahan makanan, perdagangan, dan kerajinan tangan. Banyaknya usaha mikro dan kecil di daerah pedesaan menjadikan UMKM sebagai pilihan utama pekerjaan bagi penduduk yang tidak bekerja di sektor formal.

2. Sebaran Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan:

UMKM di bidang ini, seperti usaha pengolahan kopi dan produk kelapa sawit, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Seluma.

b. Sektor Perikanan:

Di daerah pesisir seperti Mukomuko, Seluma, dan Kaur, UMKM di bidang perikanan dan pengolahan hasil laut menjadi sumber pekerjaan utama bagi masyarakat pesisir.

c. Sektor Kerajinan dan Industri Kreatif:

Usaha kerajinan seperti Kain Besurek, anyaman, dan pembuatan oleh-oleh khas Bengkulu menyerap tenaga kerja lokal, terutama di Kota Bengkulu dan beberapa kabupaten lain.

d. Makanan dan Minuman Olahan:

UMKM di sektor makanan dan minuman olahan menyerap tenaga kerja di seluruh kabupaten, terutama untuk produk lokal seperti dodol, abon ikan, rendang lokan dan kue tat yang membutuhkan tenaga kerja untuk produksi manual.

3. Tantangan dalam Penyerapan Tenaga Kerja

a. Keterbatasan Keterampilan dan Pendidikan:

Banyak tenaga kerja di UMKM masih memiliki keterbatasan keterampilan, terutama dalam pengolahan produk dan pemasaran. Hal ini menyebabkan produktivitas dan efisiensi kerja menjadi terbatas.

b. Keterbatasan Akses ke Modal:

Beberapa UMKM sulit mengembangkan usaha karena keterbatasan modal, yang berdampak pada terbatasnya peluang untuk memperluas usaha dan menambah jumlah tenaga kerja.

c. Digitalisasi yang Rendah:

Sebagian besar UMKM masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk memasarkan produk dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga penyerapan tenaga kerja cenderung tidak berkembang pesat.

4. Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya memperkuat kapasitas UMKM dengan menyediakan pelatihan keterampilan, akses modal, serta dukungan digitalisasi. Dengan peningkatan kapasitas UMKM ini, diharapkan jumlah tenaga kerja yang diserap dapat bertambah. Program kerja sama dengan pihak swasta, koperasi, dan lembaga keuangan juga terus dilakukan untuk membantu UMKM berkembang, sehingga potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini semakin tinggi.

3.2 Ruang Lingkup dan Kendala Pemberdayaan UMKM

Kegiatan pemberdayaan UMKM mencakup berbagai ruang lingkup untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Beberapa ruang lingkup utama dari kegiatan ini meliputi:

1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

- Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan: Memberikan pelatihan mengenai manajemen usaha, strategi bisnis, dan kewirausahaan kepada para pelaku UMKM.
- Pengembangan Keterampilan Teknis: Pelatihan teknis sesuai dengan jenis usaha, seperti produksi, pemasaran digital, dan inovasi produk.

2. Akses Pembiayaan:

- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program kredit





dengan bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah untuk meningkatkan akses modal bagi UMKM (DJPB).

- b. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Pembiayaan dengan nilai kecil yang menyasar usaha mikro yang belum bankable atau belum bisa mengakses pembiayaan perbankan (DJPB).

3. Pemasaran dan Promosi:

- a. Pendampingan Pemasaran: Bantuan dalam strategi pemasaran, baik offline maupun online, termasuk penggunaan media sosial dan e-commerce.
- b. Pameran dan Expo: Partisipasi dalam pameran dagang, expo, dan bazaar untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan visibilitas produk UMKM.

4. Teknologi dan Inovasi:

- a. Digitalisasi UMKM: Program untuk membantu UMKM dalam adopsi teknologi digital, seperti e-commerce, pembayaran digital, dan sistem manajemen berbasis IT.
- b. Inovasi Produk: Dukungan dalam pengembangan produk baru dan peningkatan kualitas produk yang sudah ada.

5. Pendampingan dan Konsultasi Bisnis:

- a. Mentorship dan Inkubasi: Program pendampingan oleh mentor bisnis berpengalaman serta inkubator bisnis untuk membantu start-up dan UMKM yang baru berkembang.
- b. Konsultasi Bisnis: Layanan konsultasi terkait dengan berbagai aspek bisnis seperti keuangan, hukum, dan operasional.

6. Regulasi dan Kebijakan:

- a. Perlindungan Hukum dan Izin Usaha: Bantuan dalam mengurus izin usaha dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM, seperti pengurangan birokrasi dan insentif pajak.

7. Jaringan dan Kemitraan:

- a. Kerjasama dengan Perusahaan Besar: Membantu UMKM menjalin kerjasama dengan perusahaan besar sebagai mitra dalam rantai pasokan.
- b. Jaringan Usaha: Membentuk asosiasi atau kelompok usaha untuk saling mendukung dan berbagi informasi.

Kegiatan pemberdayaan UMKM ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di pasar lokal maupun global, dan diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pemberdayaan UMKM di Bengkulu menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di Bengkulu antara lain:

1. Keterbatasan Akses Modal dan Keuangan

Banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh modal usaha karena persyaratan pinjaman yang ketat atau keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Hal ini menghambat UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi.

2. Kurangnya Akses ke Teknologi dan Digitalisasi

Masih banyak UMKM di Bengkulu yang belum mengadopsi teknologi modern dan digitalisasi, sehingga mereka kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. Transformasi digital sangat penting, terutama di era pemasaran online dan e-commerce, namun banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut.

3. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

Kurangnya pelatihan dan bimbingan bagi pelaku UMKM dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk mengakibatkan keterbatasan kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Pengetahuan tentang branding, pemasaran digital, serta analisis pasar juga masih terbatas.

4. Permasalahan dalam Rantai Pasokan dan Distribusi

Infrastruktur transportasi dan logistik di beberapa wilayah Bengkulu masih terbatas. Hal ini berdampak pada akses terhadap bahan baku, waktu pengiriman yang lebih lama, serta biaya distribusi yang tinggi. Semua faktor ini berpengaruh terhadap daya saing harga dan efisiensi operasional UMKM.

5. Keterbatasan Akses Pasar

UMKM di Bengkulu sering kali kesulitan menembus pasar yang lebih luas, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki jaringan bisnis atau mitra usaha yang dapat membantu mereka memasarkan produk secara lebih efektif.

6. Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Mendukung

Beberapa pelaku UMKM mengalami kendala dalam





mengikuti regulasi atau prosedur administratif untuk mengembangkan usaha, seperti izin usaha, legalitas produk, atau sertifikasi. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam mendukung UMKM di daerah juga berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor ini.

7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penggerak UMKM yang di geluti oleh penduduk usia kurang produktif, menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi Bengkulu, dikarenakan para pemuda usia produktif di Bengkulu lebih senang dengan pekerjaan formal dan berpikiran membuka bisnis seperti UMKM membutuhkan modal dan pengalaman yang mumpuni. Sehingga Banyak pelaku UMKM di Bengkulu yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang memadai untuk mengelola usaha mereka dengan baik, salah satu alasannya yaitu dikarenakan faktor usia. Selain itu jumlah penduduk Bengkulu yang juga tergolong sedikit bila dibandingkan Provinsi lain juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam menggerakkan UMKM karena jumlah produsen dan konsumen yang terbatas.

8. Kendala Ekonomi dan Pandemi

Dampak ekonomi akibat pandemi juga memperparah kondisi UMKM di Bengkulu, terutama dalam hal menurunnya daya beli masyarakat. Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan untuk bertahan di masa-masa sulit ini.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan berbagai pihak terkait agar pemberdayaan UMKM di Bengkulu dapat lebih optimal. Dukungan dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan pengembangan teknologi serta digitalisasi sangat penting untuk membantu UMKM di Bengkulu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

3.3 Dukungan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

UMKM dianggap sebagai jenis usaha yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. Mulai dari krisis moneter tahun 1998 hingga krisis global saat kondisi perekonomian dunia dilanda guncangan hebat, di mana di negara maju seperti Amerika kehilangan lebih dari 7,3 juta lapangan kerja. Yang teranyar adalah kondisi runtuhnya berbagai sektor kehidupan akibat pandemi Covid-19 serta perang antara Rusia dan Ukraina. Berbagai macam kondisi badai ekonomi yang menerjang menjadikan UMKM teruji sebagai usaha yang tahan banting dalam situasi berat sekalipun,

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, UMKM mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1%. Selain itu UMKM telah mendukung sebanyak 14,7% nilai ekspor. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri festival UMKM 2022 mengungkapkan bahwa UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia.

Hal di atas menunjukkan bahwa UMKM merupakan penopang utama perekonomian di Indonesia. Sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi UMKM dengan pemberian kebijakan khususnya dalam hal pembiayaan. Pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam rangka mendukung pembiayaan UMKM serta relaksasi pelaksanaannya akibat adanya pandemi Covid-19. Di antaranya melalui kemudahan akses kredit program antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). KUR disalurkan melalui lembaga perbankan, sedangkan UMi menyasar pelaku usaha dari kalangan yang *unbankable* atau yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan. UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura (BAV), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pada tahun 2024, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu diperkirakan terus meningkat seiring dengan berbagai upaya pemberdayaan dan dukungan dari pemerintah. Data terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu menunjukan bahwa di Bengkulu terdapat sekitar 2.796 UMKM aktif dan tidak aktif.

3.3.1 Dukungan berdasarkan Klasterisasi UMKM

Klaster UMKM Naik Kelas dalam konteks pemberdayaan UMKM sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 dan KEP-112/PB/2023 meliputi tiga kategori utama: UMKM Rintisan, UMKM Siap Mandiri, dan UMKM Siap Ekspor. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing klaster:

1. UMKM Rintisan (*Start-Up* UMKM):

UMKM yang baru memulai usahanya. Biasanya usaha ini berada dalam tahap awal pengembangan produk atau jasa dan membutuhkan dukungan dasar dalam manajemen dan operasional.

Dukungan yang Diberikan:

- Pelatihan dasar kewirausahaan dan manajemen bisnis.
- Pendampingan dalam pembuatan rencana bisnis.
- Akses kepada pembiayaan awal dan bimbingan untuk mendapatkan izin usaha.





2. UMKM Siap Mandiri (*Growing* UMKM):

UMKM yang sudah beroperasi dan menunjukkan kestabilan dalam usahanya, namun masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian.

Dukungan yang Diberikan:

- Pengembangan keterampilan teknis dan manajerial.
- Akses ke modal tambahan melalui program pembiayaan yang lebih besar seperti KUR.
- Strategi pemasaran dan ekspansi pasar domestik.
- Dukungan dalam sertifikasi produk dan peningkatan kualitas produksi.

3. UMKM Siap Ekspor (*Scaling-Up* UMKM):

UMKM yang sudah mapan dan memiliki potensi untuk memasuki pasar internasional. UMKM ini membutuhkan dukungan untuk memenuhi standar global dan mengembangkan jaringan ekspor.

Dukungan yang Diberikan:

- Pengembangan keterampilan teknis dan manajerial.
- Akses ke modal tambahan melalui program pembiayaan yang lebih besar seperti KUR.
- Strategi pemasaran dan ekspansi pasar domestik.
- Dukungan dalam sertifikasi produk dan peningkatan kualitas produksi.
- Akses ke pasar internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang global dan misi dagang. Bantuan dalam branding dan pemasaran internasional.
- Kolaborasi dengan instansi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun jaringan distribusi global.

3.3.2 Strategi Pemberdayaan UMKM

Strategi pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui pendekatan yang holistik, mencakup dukungan dalam hal keuangan, keterampilan, teknologi, dan akses pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memberdayakan UMKM:

1. Peningkatan Akses terhadap Modal

Pembiayaan yang Mudah dan Fleksibel: Meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan dengan skema yang fleksibel dan suku bunga rendah, seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program pembiayaan berbasis pemerintah. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan: Menjalinkan kerjasama dengan lembaga perbankan atau koperasi agar pelaku UMKM dapat memperoleh

pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah seperti kredit Ultra Mikro (UMi).

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku UMKM

Pengembangan Keterampilan Manajemen: Menyelenggarakan pelatihan manajemen bisnis yang mencakup pengelolaan keuangan, operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Digital dan *E-Commerce*: Melatih UMKM dalam penggunaan teknologi digital dan *e-commerce* untuk meningkatkan pemasaran dan distribusi produk mereka. Pelatihan ini bisa mencakup cara menggunakan platform media sosial, *marketplace*, hingga analisis data.

3. Digitalisasi dan Adopsi Teknologi

Mendorong Transformasi Digital: Memfasilitasi penggunaan teknologi seperti *e-commerce*, aplikasi kasir digital, dan sistem manajemen inventaris yang dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Platform Digital untuk UMKM: Mengembangkan atau memfasilitasi akses ke platform digital khusus UMKM yang mempermudah proses pemasaran, transaksi, serta komunikasi dengan pelanggan.

4. Akses Pasar yang Lebih Luas

Pameran dan Bazaar UMKM: Memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran lokal dan nasional untuk mempromosikan produk mereka. Kemitraan dengan *E-commerce* dan Ritel Besar: Membantu UMKM bermitra dengan platform *e-commerce* dan jaringan ritel besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar.

5. Penguatan Jaringan dan Kolaborasi

Pengembangan Klaster UMKM: Membangun klaster-klaster UMKM berdasarkan jenis produk atau sektor untuk memudahkan akses ke bahan baku, distribusi, dan pemasaran. Kemitraan dengan Swasta dan Akademisi: Menjalinkan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi dalam hal riset dan pengembangan, branding, hingga pemasaran, sehingga UMKM memiliki dukungan strategis untuk inovasi.

6. Optimalisasi Regulasi dan Dukungan Pemerintah

Kemudahan Perizinan dan Sertifikasi: Mempermudah proses perizinan usaha dan sertifikasi produk bagi UMKM, sehingga mereka bisa lebih cepat masuk ke pasar dengan produk yang lebih terpercaya. Kebijakan Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak atau keringanan pajak bagi UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mereka memiliki ruang untuk berkembang.





7. Pengembangan Kualitas Produk dan Inovasi

Standarisasi Produk: Memberikan bimbingan kepada UMKM terkait standarisasi produk, kemasan, serta pengendalian kualitas agar produk lebih kompetitif dan memiliki nilai tambah.

Pengembangan Produk Baru: Memfasilitasi riset dan pengembangan produk baru atau diversifikasi produk agar UMKM bisa menghadirkan variasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

8. Pendampingan Bisnis dan Mentorship

Mentorship dari Praktisi Bisnis: Mengadakan program *mentorship* dengan pengusaha berpengalaman atau ahli di berbagai bidang untuk membantu UMKM meningkatkan strategi bisnis mereka.

Peningkatan Kesadaran tentang Branding: Mendidik UMKM tentang pentingnya branding dan cara menciptakan merek yang kuat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya tarik produk.

Strategi-strategi ini jika diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan, akan membantu UMKM tumbuh lebih cepat, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting agar strategi pemberdayaan ini dapat berjalan optimal.

3.3.3 Skema Pembiayaan terhadap UMKM

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Dana KUR seluruhnya berasal dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR.

KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertamendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Sejak tahun 2020 hingga 2024 suku Bunga KUR relatif rendah sebesar 6% efektif pertahun, syarat agunan tambahan KUR juga mudah. KUR kecil dan KUR khusus di atas Rp100 juta sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR. Agunan tambahan tidak diperlukan bagi KUR supermikro, KUR mikro, KUR khusus s.d. Rp100 juta, dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 3.1 Skema Umum Penyaluran KUR

Uraian	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus	KUR PMI
Suku bunga Ke Debitur	3%	6% s.d. 9% sesuai frekuensi akad		6%	
Besaran Subsidi	15%	10% - 7%	5,5% - 2,5%	Sesuai akad kredit	13,5%
Plafon Akad Kredit (Rp)	s.d. 10 jt / penerima	> 10 jt s.d. 100 jt / penerima	> 100 jt s.d. 500 jt / penerima	s.d. 500 jt / penerima	s.d. 100 jt / penerima
Total Akumulasi Plafon / Frekuensi Revolving	Plafon tidak dibatasi	- Sektor produksi 4P : 4 kali akad - Sektor Non 4P : 2 kali akad	Rp500 jt / penerima		Rp100 juta / penerima
Jangka Waktu Kredit	✓ Kredit Modal Kerja = maks 3 th, perpanjang 4 th ✓ Kredit Investasi = 5 th, perpanjang 7 th ✓ Grace period sesuai penilaian penyalur		✓ Kredit Modal Kerja = maks 4 th, perpanjang 5 th ✓ Kredit Investasi = 5 th, perpanjang 7 th ✓ Grace period sesuai penilaian penyalur		Paling lama sama dengan kontrak kerja, atau maksimal 3 tahun
Agunan Pokok	Usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR				
Agunan Tambahan	Tidak dipersyaratkan		- Tidak dipersyaratkan untuk kredit s.d. 100 jt - Kredit > 100 jt sesuai penilaian penyalur KUR		Tidak dipersyaratkan
Ketentuan lainnya	Belum pernah menerima KUR	-	-	Berkelompok dan ada mitra usaha	Pencairan bertahap

Sumber: Dit. SMI, DJPb (diolah)

Progress penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu

Data penyaluran Kredit Program pada fasilitas KUR yang ada di Provinsi Bengkulu sampai dengan 30

September 2024 mengalami pertumbuhan yang positif hampir disebagian sektor, dengan rata-rata pertumbuhan 30,87% dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama.





Tabel 3.2 Penyaluran KUR Provinsi Bengkulu per Sektor tahun 2023-2024 (dalam Rupiah)

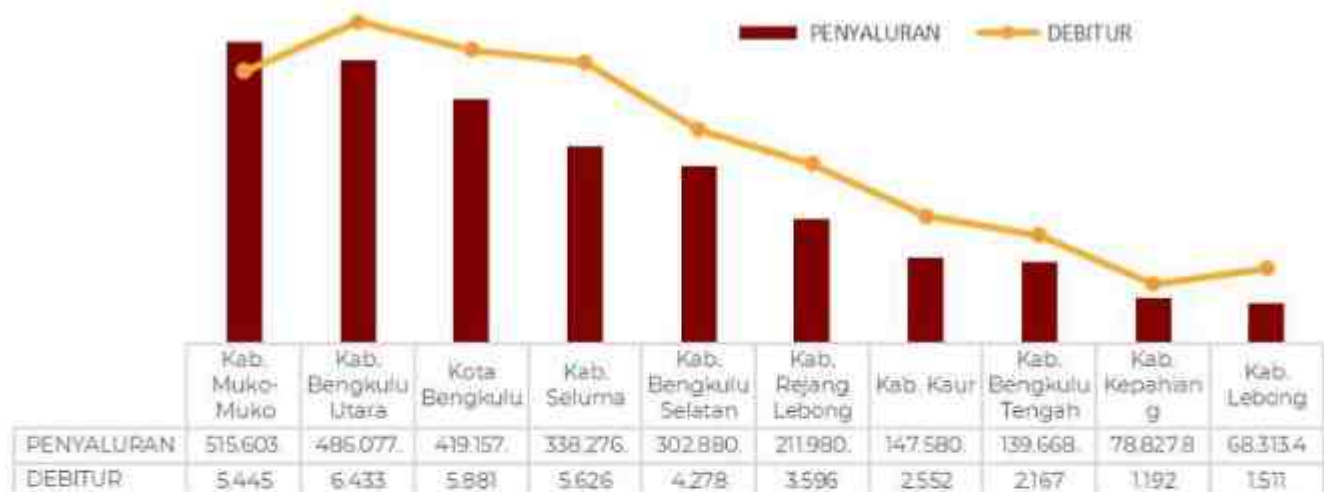
No	Sektor	2023		2024		Growth	
		Jml Debitur	Penyaluran	Jml Debitur	Penyaluran	Jml Debitur	Penyaluran
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	17.173	1.181.109.547.000	24.434	1.699.756.600.000	42,28%	43,91%
2	Perdagangan Besar dan Eceran	9.559	677.166.842.000	9.629	707.490.100.000	0,73%	14,64%
3	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2.217	111.553.500.000	2.190	120.270.600.000	-1,22%	7,81%
4	Industri Pengolahan	1.447	76.233.400.000	1.433	75.122.400.000	-0,97%	-1,46%
5	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	268	33.390.000.000	308	41.759.900.000	14,93%	25,07%
6	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	178	18.332.000.000	179	20.756.000.000	0,56%	13,22%
7	Perikanan	234	14.656.000.000	298	17.682.000.000	27,35%	20,65%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	124	10.052.000.000	162	17.434.000.000	30,65%	73,44%
9	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17	2.400.000.000	24	4.809.000.000	41,18%	100,38%
10	Konstruksi	14	3.244.000.000	12	2.475.000.000	-14,29%	-23,77%
11	Jasa Pendidikan	14	1.375.000.000	12	811.000.000	-14,29%	-41,02%
TOTAL		31.245	2.069.512.289.000	38.681	2.708.366.600.000	23,80%	30,87%

Sumber: SIKP (diolah data per 30 September 2024)

di Bengkulu Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan sektor unggulan, karena sebagian besar penduduk di Bengkulu masih mengandalkan perkebunan sawit dan kopi dan ada

sebagian pertanian padi. Pada sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 43,91% (YoY) dengan nilai penyaluran sebesar Rp1.699 Triliun dari 24.434 debitur.

Grafik 3.2 Penyaluran KUR Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2024



Sumber: SIKP (diolah data per 30 September 2024)

Sebaran penyaluran KUR pada Kabupaten/Kota di Bengkulu terdapat pada 10 Kab/Kota, dimana untuk Kab. Mukomuko merupakan wilayah dengan nilai penyaluran terbesar Rp515,60 Miliar dengan jumlah 5.445 debitur, hal ini sejalan dengan dominasi jenis usaha pertanian/perkebunan di wilayah Mukomuko yang sebagian besar petani sawit. Namun demikian dari sisi jumlah debitur yang terbanyak ada di wilayah Kab. Bengkulu Utara sebanyak 6.433 debitur dan di Bengkulu Utara untuk sektor usahanya juga tidak jauh berbeda dengan wilayah Mukomuko yaitu sektor pertanian dan perkebunan.

2. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) adalah program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha ultra mikro (UMI), yaitu segmen usaha terkecil yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Program ini dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama dalam pembiayaan UMI:





a. Tanpa Agunan (Collateral-Free)

Pembiayaan UMi diberikan tanpa memerlukan jaminan atau agunan dari penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaku usaha ultra mikro yang tidak memiliki aset atau properti untuk digunakan sebagai jaminan agar tetap dapat mengakses pembiayaan.

b. Skema Pembiayaan dengan Proses Sederhana

Proses pengajuan dan persyaratan administrasi untuk pembiayaan UMi dibuat sesederhana mungkin, dengan prosedur yang cepat agar mudah diakses oleh para pelaku usaha ultra mikro. Proses sederhana ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak terhambat dalam mendapatkan pembiayaan akibat prosedur yang rumit.

c. Pembiayaan dengan Plafon Kecil

Plafon pinjaman dalam program UMi relatif kecil, yaitu antara Rp1 juta hingga Rp20 juta. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha ultra mikro, yang pada umumnya membutuhkan modal dalam jumlah kecil untuk mendukung aktivitas usaha sehari-hari atau memperbesar skala usaha mereka secara bertahap.

d. Bunga Ringan dan Cicilan Fleksibel

Suku bunga dan skema cicilan dalam pembiayaan UMi dirancang agar terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro. Pembayaran cicilan yang fleksibel membantu pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu cash flow usaha mereka.

e. Pendampingan dan Pelatihan Usaha

Selain pembiayaan, program UMi juga memberikan dukungan berupa pendampingan dan pelatihan usaha bagi penerima manfaat. Pendampingan ini

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha pelaku ultra mikro sehingga mereka dapat menggunakan dana yang diterima secara optimal untuk mengembangkan usahanya.

f. Inklusi Keuangan dan Kemandirian Ekonomi

Program UMi bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di segmen usaha ultra mikro, khususnya bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan adanya pembiayaan UMi, pelaku usaha ultra mikro didorong untuk mandiri secara ekonomi dan lebih siap untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar di masa depan.

g. Berkelanjutan (Sustainable Financing)

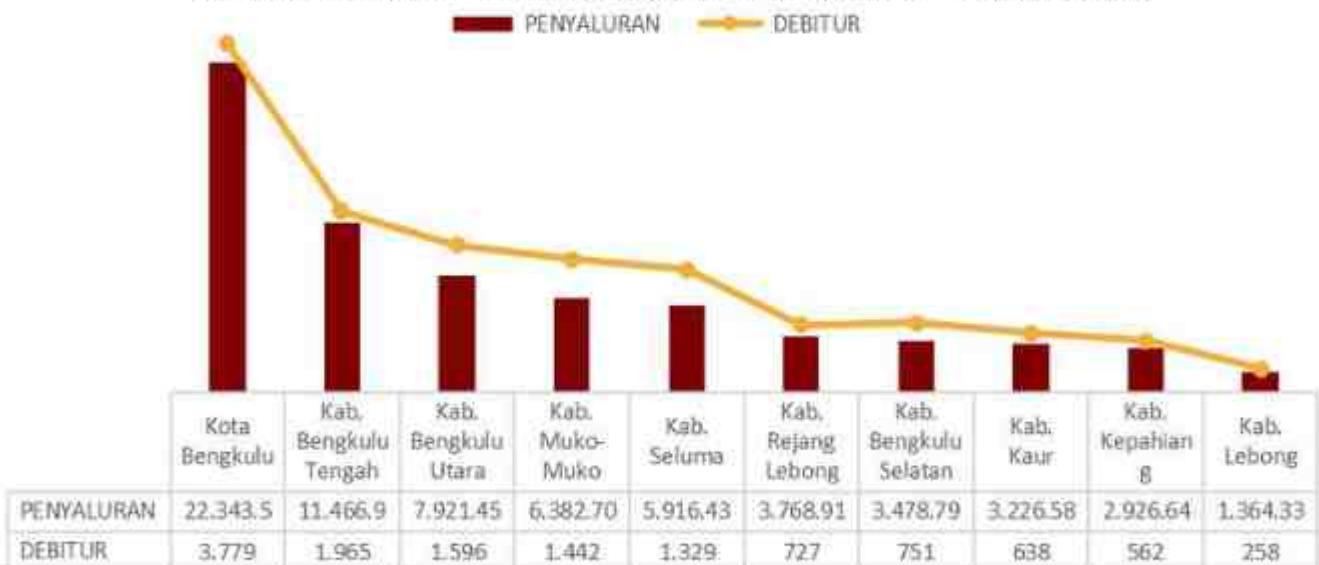
Pembiayaan UMi didesain sebagai pembiayaan berkelanjutan agar dapat terus memberikan manfaat bagi lebih banyak pelaku usaha ultra mikro. Dengan memperhatikan keberlanjutan dana yang digulirkan, program UMi diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang pada masyarakat, terutama di sektor usaha ultra mikro.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, pembiayaan UMi bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha ultra mikro di Indonesia, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam perekonomian lokal dan nasional.

Progress Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu

Penyaluran kredit Ultra Mikro di Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan III tahun 2024 tersebar pada 10 wilayah Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar pada wilayah Kota Bengkulu sebesar Rp22,34 Miliar untuk 3.779 debitur dan untuk penyaluran terendah pada Kab. Lebong dengan nilai Rp1,36 Miliar untuk 258 debitur.

Grafik 3.3 Penyaluran UMi Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2024 (dalam Rupiah)



Sumber: SIKP UMi (diolah data per 30 September 2024)





Tabel 3.3 Penyaluran UMI Provinsi Bengkulu per Kab/Kota tahun 2023-2024 (dalam Rupiah)

No	Sektor	2023		2024		Growth	
		Jml Debitur	Penyaluran	Jml Debitur	Penyaluran	Jml Debitur	Penyaluran
1	Perdagangan Dalam Negeri Beras	13.688	66.710.135.743	12.976	67.829.287.567	-5,20%	3,22%
2	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya	241	791.670.000	25	300.020.000	-89,63%	-62,10%
3	Perdagangan Eceran Brg2 Didominasi Makanan, Minuman & Tembakau	219	741.800.000	17	200.650.000	-92,24%	-72,95%
4	Perdagangan Eceran Melalui Media	141	511.770.000	16	208.080.000	-88,65%	-59,34%
5	Pertanian Padi	8	160.000.000	-	-	-100,00%	-100,00%
6	Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau	1	1.685.000	-	-	-100,00%	-100,00%
7	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih Dari Sekali	-	-	13	258.333.000	100,00%	100,00%
TOTAL		14.298	67.917.060.743	13.047	68.796.370.567	-8,75%	1,29%

Sumber: SIKP UMI (diolah data per 30 September 2024)

Secara keseluruhan progres penyaluran ultra Mikro (UMi) di Bengkulu sampai dengan 30 September 2024 terjadi pertumbuhan sebesar 1,29% dibandingkan tahun sebelumnya, namun terjadi kontraksi dari sisi jumlah debitur yaitu -8,75%. Dan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan dalam negeri Beras sebesar Rp64.83 Miliar untuk 12.976 debitur.

Penurunan jumlah debitur terjadi dikarenakan ada beberapa pelaku usaha kecil/menengah yang beralih ke fasilitas kredit lain seperti KUR, hal ini terjadi karena pelaku usaha tersebut mengalami perkembangan/kemajuan usaha sehingga membutuhkan tambahan kredit modal yang lebih besar.

3. Dukungan Belanja KL dan TKD untuk Pemberdayaan UMKM

a. Dukungan belanja K/L

Dukungan Pemerintah di Kementerian /Lembaga untuk para pelaku UMKM di wilayah

Bengkulu terdapat pada dua K/L yaitu Kementerian Perindustrian dan BPOM dengan nilai alokasi anggaran Rp1.89 Miliar. Pada Kementerian Perindustrian terdapat dua RO dalam mendukung pemberdayaan UMKM dengan alokasi anggaran Rp1.36 Miliar.

Sebagaimana tugas pokoknya pada Kementerian Perindustrian kepada UMKM bahwa dukungan belanjanya untuk pelatihan kepada UMKM serta pendampingan dalam pengembangan produk UMKM, serapan belanja sampai dengan triwulan III-2024 sebesar 76,46% dari pagunya. Sedangkan pada BPOM alokasi belanjanya diperuntukan dalam pendampingan pemenuhan standar edar produk UMKM.

Tabel 3.4 Alokasi Belanja K/L untuk Pemberdayaan UMKM (dalam Rupiah)

No	Kementerian	Pagu	Realisasi	%
1	Kementerian Perindustrian	1.785.967.000	1.087.545.000	60,89%
	Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan	1.360.876.000	1.040.495.000	76,46%
	IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	425.091.000	47.050.000	11,07%
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	111.306.000	79.476.600	71,40%
	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	111.306.000	79.476.600	71,40%
TOTAL		1.897.273.000	1.167.021.600	61,51%

Sumber: SINTESA (diolah data per 30 September 2024)





b. Dukungan belanja TKD

Pada Pemerintah Daerah telah dialokasikan anggaran dalam mendukung pemberdayaan UMKM, dimana pengalokasiannya disalurkan melalui dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang telah ditetapkan keperuntukannya, yaitu: 1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK; dan 2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM.

1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK

Terdapat 5 (lima) Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu yang telah dianggarkan sebesar Rp6,56 Miliar, dengan serapan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2024 sebesar 64,52%. diharapkan pengalokasian belanja dananya dapat digunakan dalam meningkatkan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, dan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersinergi serta berkolaborasi dalam pemberdayaan UMK di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.5 Alokasi Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK (dalam Rupiah)

No	Pemda	Pagu	Realisasi	%
1	Provinsi Bengkulu	4.327.780.000	2.005.696.800	46,34%
2	Kab. Bengkulu Utara	405.983.000	405.983.000	100,00%
3	Kab. Bengkulu Selatan	542.163.000	538.850.500	99,39%
4	Kab. Seluma	415.331.000	414.206.000	99,73%
5	Kab. Kaur	404.106.000	404.106.000	100,00%
6	Kota Bengkulu	471.457.000	468.275.000	99,33%
TOTAL		6.566.820.000	4.237.117.300	64,52%

Sumber: SINTESA (diolah data per 30 September 2024)

Alokasi Belanja terbesar ada di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp4,33 Miliar dengan serapan 46,34%, serapan ini masih belum optimal, dan diharapkan dapat diakselerasi karena peran Pemda Provinsi harus dapat mengkoordinasikan seluruh pemda Kab/Kota di lingkup Bengkulu terutama dalam pemberdayaan UMKM di Bengkulu agar dapat naik kelas.

2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

Disamping pendaan dalam peningkatan kapasitas UMKM juga pada belanja TKD diperuntukan untuk peningkatan kapasitas Kelembagaan sentra IKM, pada wilayah Provinsi Bengkulu terdapat satu Pemerintah Daerah yaitu pada Kab. Bengkulu Utara, dengan alokasi sebesar Rp2,28 Miliar dan telah dibelanjakan secara optimal, sehingga diharapkan untuk sentra-sentra IKM di Kab. Bengkulu Utara dapat meningkat kapasitasnya terutama dalam pemberdayaan para pelaku UMKM agar dapat naik kelas.

Tabel 3.6 Alokasi Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Sentra IKM (dalam Rupiah)

No	Pemda	Pagu	Realisasi	%
1	Kab. Bengkulu Utara	2.286.141.000	2.286.141.000	100,00%
TOTAL		2.286.141.000	2.286.141.000	100,00%

Sumber: SINTESA (diolah data per 30 September 2024)

3.4 Analisis kendala dan kebutuhan Pemberdayaan UMKM dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah

3.4.1 Analisis Kendala Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,

termasuk di Provinsi Bengkulu. Meski demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat perkembangan UMKM serta kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM tersebut sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Berikut adalah analisis kendala dan kebutuhan pemberdayaan UMKM di Bengkulu terutama yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Adapun analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metodologi analisis *Fishbone* atau Diagram Sebab-Akibat, merupakan alat analisis





yang untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan berbagai penyebab yang mendasari suatu masalah atau efek tertentu.

Dari hasil analisis *Fishbone* yang dapat disimpulkan bahwa perkembangan para pelaku UMKM akan terhambat oleh beberapa kondisi, antara lain:

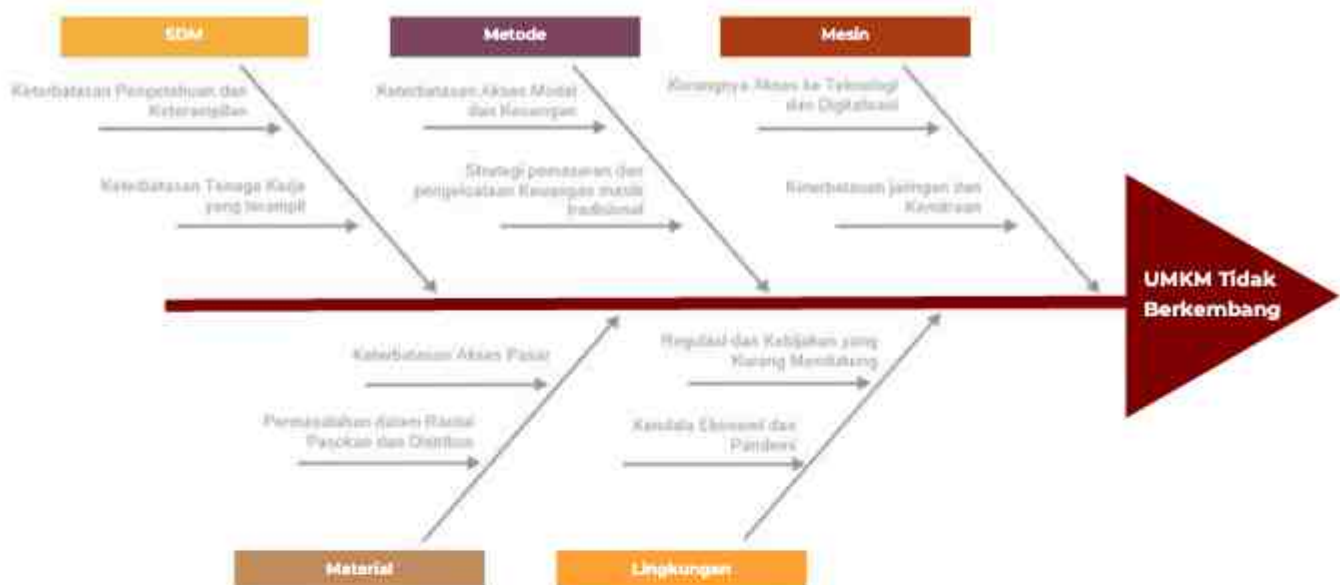
1. **SDM:** Faktor yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, atau tindakan manusia yang terlibat. Kendala SDM dapat menghambat perkembangan UMKM, seperti: Keterbatasan pengetahuan dan Keterampilan para pelaku UMKM; dan keterbatasan jumlah tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh UMKM.
2. **Metode:** Prosedur atau proses yang digunakan dalam pekerjaan. UMKM dapat terhambat dari sisi metodenya, antara lain jika para pelakum UMKM terbatas dalam akses pembiayaan modal/keuangan serta perilaku UMKM dalam menerapkan strategi pemasaran dan tata kelola pembukuannya yang masih sifatnya tradisional.
3. **Mesin:** Peralatan atau teknologi yang digunakan

dalam proses.

UMKM dapat terkendala perkembangannya dalam hal keterbatasan dalam akses teknologi dan digitalisasi karena perkembangan teknologi sangat mendukung perkembangan UMKM, serta keterbatasan jaringan serta kemitraan UMKM dapat menghambat UMKM naik kelas.

4. **Material:** Bahan baku atau material yang digunakan dalam proses. Akses Pasar yang terbatas serta pembatasan distribusi bahan baku para pelaku UMKM juga dapat menghambat berkembangnya UMKM naik kelas.
5. **Lingkungan:** Kondisi eksternal yang memengaruhi proses. Faktor yang tidak bisa dihindari dalam menghambat perkembangan UMKM juga dapat terjadi di lingkungan eksternal, antara lain karena adanya regulasi/kebijakan dari pemerintah yang kurang mendukung. Disamping itu juga karena adanya situasi kondisi ekonomi dan pandemi dapat menghambat perkembangan para pelaku UMKM.

Gambar 3.1 Analisis *Fishbone* terhadap perkembangan para pelaku UMKM di Bengkulu



Sumber: Laporan Monev KUR Semester II Tahun 2024 (diolah)

3.4.2 Dukungan dalam Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Bengkulu

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil - hasil

pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di





Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99 persen. Sisanya, sekitar 0,01 persen atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan tujuan pembangunan Indonesia di masa mendatang antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemupukan permodalan yang didukung prinsip kehidupan seperti pengentasan kemiskinan dengan cara mencari standar minimum kebutuhan pokok, bebas dari keterbelakangan dengan cara memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, DEN dalam menyusun kebijakan strategi ekonomi jangka menengah, antara lain menetapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan cara memelihara kestabilan ekonomi dan membuka lapangan kerja melalui pengembangan UMKM.

1. Pembinaan UMKM oleh Kanwil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tugas Kanwil DJPb dalam pembinaan UMKM meliputi koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan negara, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berikut adalah beberapa tugas utama Kanwil DJPb terkait dengan pembinaan UMKM:

a. Penyaluran Dana Pemerintah:

Mengelola dan menyalurkan berbagai dana bantuan dari Pemerintah Pusat ke UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kanwil DJPb bertanggung jawab untuk memastikan dana tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

b. Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada UMKM. Kanwil DJPb memantau apakah dana yang diterima UMKM digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan (Kolaborasi Kanwil DJPb Prov. Bengkulu dengan Diskop UKM Prov./Kab./Kota Bengkulu).

c. Penyuluhan dan Pelatihan:

Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan

kepada pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan, pengelolaan usaha, serta akses terhadap fasilitas pembiayaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM dalam mengelola usahanya (Kolaborasi Kanwil DJPb Prov. Bengkulu dengan Diskop UKM Prov./Kab./Kota Bengkulu).

c. Fasilitasi Akses Pembiayaan:

Membantu UMKM dalam mendapatkan akses ke fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Kanwil DJPb berperan sebagai mediator antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mempermudah proses pengajuan dan pencairan kredit (Kolaborasi Kanwil DJPb Prov. Bengkulu dengan Diskop UKM Prov./Kab./Kota Bengkulu).

d. Pendampingan dan Bimbingan Teknis:

Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Ini termasuk bantuan dalam hal inovasi produk, standar kualitas, dan sertifikasi (Kolaborasi Kanwil DJPb Prov. Bengkulu dengan Diskop UKM Prov./Kab./Kota Bengkulu).

e. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan:

Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, kementerian terkait, lembaga keuangan, dan instansi lainnya untuk menyinergikan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM.

Melalui tugas-tugas ini, Kanwil DJPb berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional.

2. UMKM Binaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kanwil dan KPPN dalam pemberdayaan UMKM di lingkup wilayahnya, maka Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pada tahun 2024 terdapat 27 unit UMKM binaan, antara lain:

Tabel 3.7 Jumlah UMKM Binaan Lingkup Kanwil DJPb Bengkulu

No	Nama Kantor	Jml UMKM Binaan
1	Kanwil DJPb Bengkulu	19
2	KPPN Bengkulu	2
3	KPPN Curup	2
4	KPPN Manna	2
5	KPPN Mukomuko	2
JUMLAH		27

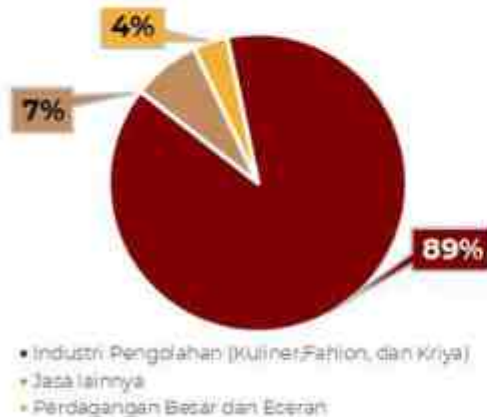
Sumber: Laporan Money KUR Semester II Tahun 2024 (diolah)





Berdasarkan sebaran sektor usaha yang dijalani oleh UMKM binaan Kanwil dan KPPN lingkup Prov. Bengkulu, didominasi oleh sektor Usaha Industri dan Pengolahan (Kuliner, *Fashion*, dan Kriya) sebesar 89% (24 Unit), sedangkan untuk usaha Jasa lainnya sebesar 7% (2 unit) dan Usaha Berdagangan Besar dan Eceran sebesar 4% (1 unit).

Grafik 3.4 Persentase sektor usaha UMKM Binaan Kanwil



Sumber: Laporan Monev KUR Semester II Tahun 2024 (diolah)

3.4.3 Kegiatan Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

1. Rincian Kegiatan Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Profiling UMKM dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Bengkulu kepada 10 UMKM Binaan, masing-masing Kanwil DJPb dan KPPN memiliki 2 UMKM yang dibina untuk naik kelas. *Profiling* UMKM dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan kondisi UMKM. Survei *profiling* UMKM telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten dan kota, antara lain:

- Pada tanggal 10 Maret 2024, KPPN Bengkulu melaksanakan *profiling* UMKM Binaan di Kota Bengkulu kepada 2 UMKM yaitu Rumah Babe dan D'jamuin Aja;
- Pada tanggal 15 Mei 2024, Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Bersama KPPN Mukomuko melaksanakan *profiling* UMKM pada UMKM Binaan yang berlokasi di Kota Mukomuko, yaitu UMKM Dendeng Jantung Pisang 3 Jagoan dan Yuni Kreatif;
- Pada tanggal 14 Juni 2024, Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

bersama KPPN Manna melaksanakan *profiling* UMKM pada UMKM Binaan yang berlokasi di Kota Manna, yaitu UMKM La Terre dan UMKM Kopi Manna RM82;

- Pada tanggal 21 Juni 2024, Tim Pemberdayaan UMKM KPPN Curup melaksanakan *profiling* UMKM pada UMKM Binaan yang berlokasi di Curup, yaitu Kiki Lestari dan Kopi Dusun Cap Sanak Kito;
- Pada tanggal 19-20 Juni 2024, Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu melaksanakan *profiling* UMKM pada UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, yaitu UMKM Warung Damiya, UMKM Pempek Dewi Yul, UMKM Basreng "Aa", dan UMKM Raflesia Keyzee;

2. Hasil *Profiling* UMKM

Dari duabelas UMKM yang dilakukan *profiling*, diperoleh hasil bahwa seluruh UMKM yang diprofilkan akan menerima pembinaan dan pemberdayaan UMKM oleh Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Dari 12 UMKM yang di *profiling*, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Terdapat 5 UMKM Rintisan, antara lain : Warung Damiya, Rumah Babe, D'jamuin Aja, Yuni Kreatif, dan Dendeng Jantung Pisang 3 Jagoan;
- Terdapat 4 UMKM Siap Mandiri, antara lain : Pempek Dewi Yul, Basreng "Aa", Kopi Dusun Cap Sanak Kito, dan Coffe Manna RM82; dan
- Terdapat 1 UMKM Siap Ekspor, yaitu Rafflesia Keyzee.

3. Kebutuhan pemberdayaan UMKM

dilihat secara umum dari hasil survei yang dilakukan, pelaku usaha dalam hal ini UMUM Binaan membutuhkan beberapa bentuk pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan usaha, antara lain :

- peningkatan kemampuan sumber daya melalui pelatihan dalam rangka pencatatan keuangan, pembukuan dan manajemen keuangan;
- pemenuhan kewajiban perpajakan;
- branding* produk dan pengemasan;
- pemanfaatan sosial media sebagai media promosi;
- pemasaran produk baik melalui *marketplace* umum maupun *marketplace* pemerintah; dan
- penggunaan pembiayaan untuk pengembangan usaha.





Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM kepada para pelaku UMKM Binaan. Adapun pelaksanaan pemberdayaan UMKM tersebut antara lain :

1. Pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2024, melaksanakan kegiatan Bazar UMKM yang bertempat di Gedung Trefa Center Kota Bengkulu, dimana pelaksanaan Bazar diikuti oleh 22 peserta UMKM binaan Kanwil, KPPN lingkup Provinsi Bengkulu, Perbankan, dan PNM. Di samping itu terdapat booth layanan dari Perbankan dan Perum BULOG;
2. Pada tanggal 25 Juli 2024, turut serta dalam menghadirkan 9 (sembilan) pelaku UMKM binaan Kemenkeu Satu Bengkulu di kegiatan Bazar UMKM Festival Tabut tahun 2024;
3. Pada tanggal 18 Agustus 2024, mengikutsertakan 3 UMKM Binaan Kemenkeu Satu Bengkulu yaitu Warung Damiya, Rafflesia Keyzee, dan Basreng "Aa" dalam kegiatan *Fun Run Bank Indonesia 2024* dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
4. Pada tanggal 29 Agustus 2024, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan UMKM Binaan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu terkait Sertifikasi Halal, Registrasi HKI, Perpajakan UMKM dan Digipay;
5. Pada tanggal 23 Oktober 2024, melaksanakan pemberdayaan UMKM pada Binaan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota Curup, yaitu UMKM Kiki Lestari;
6. Pada tanggal 1-2 November 2024, melaksanakan kegiatan bazar UMKM yang bertempat di halaman Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, pelaksanaan bazar diikuti oleh 25 peserta UMKM binaan kanwil, KPPN lingkup Provinsi Bengkulu, Perbankan, dan PNM. Disamping itu terdapat booth layanan dari perbankan, Perum BULOG, Layanan SIM Keliling dan Layanan Kesehatan dari BPJS Kesehatan;
7. Pada tanggal 6 November 2024, melaksanakan Pemberdayaan UMKM Bersama UMKM Binaan KPPN Mukomuko di Kota Mukmuko dihadiri oleh 6 UMKM yang sudah terdaftar pada Aplikasi Digipay, dan dilaksanakan survei kepada Dendeng Jantung Pisang 3 Jagoan terkait kenaikan omzet dan kemajuan dalam hal legalitas usaha. Pada UMKM Dendeng Jantung Pisang 3 jagoan mengalami kenaikan omzet yang cukup signifikan yaitu kurang lebih 50%. Dan pada jumlah tenaga kerja pada awal tidak terdapat tenaga kerja dan belum memiliki sertifikat BPOM, pada semester II ini dapat mempekerjakan 7 orang tenaga kerja dan telah mendapatkan sertifikat BPOM.



Profiling UMKM dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Bengkulu kepada 10 UMKM Binaan, masing-masing Kanwil DJPb dan KPPN memiliki 2 UMKM yang dibina untuk naik kelas. Profiling UMKM dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan kondisi UMKM.



BAB IV

ANALISIS TEMATIK

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN
LOCAL TAXING POWER SESUAI UU NO. 1
TAHUN 2022 TENTANG HKPD DAN PP NO.
35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN
UMUM PDRD





Rumah FATMAWATI

Rumah Fatmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang berada di Bengkulu, tepatnya berada di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban. Rumah Fatmawati atau tempat kediaman Fatmawati istri ke-3 Soekarno ini ditetapkan Pemerintah Daerah Bengkulu menjadi aset sejarah. Rumah tersebut dilengkapi berbagai ornamen asli, rumah itu berukuran 92 meter persegi dan dibangun ulang sesuai konstruksi aslinya, yaitu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Perabot yang ada seperti meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit adalah peralatan asli. Menurut sejarah, dengan mesin jahit tadi, Fatmawati sempat membuat bendera Merah Putih, yang dikibarkan pada Proklamasi RI 17 Agustus 1945.

sumber artikel : id.wikipedia.org



0

BAB IV

ANALISIS TEMATIK IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DAN PP NO. 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PDRD

4.1 Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yakni: (1) Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (2) Mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah pembiayaan utang daerah; (3) Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; serta (4) Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah ialah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas penguatan Local Taxing Power merupakan salah satu pilar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Pilar ini menjadi dasar bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam





membayar pajak. Sebagai bentuk pelaksanaan dari pilar dimaksud, pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan untuk menurunkan *administration* dan *compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain.

Beberapa *highlight* pengaturan PDRD dalam UU HKPD antara lain mencakup:

1. Perluasan basis dan objek pajak antara lain:

- a. Pengenaan Opsen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan);
 - b. Pajak rokok pada objek bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
2. Restrukturisasi dan Integrasi Pajak Daerah.
 3. Rasionalisasi jenis retribusi.
 4. Penguatan peran and pengawasan Pemerintah Pusat dalam Evaluasi Raperda dan Perda PDRD serta sinergitas data dan informasi PDRD.

Secara ringkas, Struktur PDRD sesuai UU HKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur PDRD dalam UU HKPD

Ketentuan PDRD dalam UU HKPD mencapai 104 Pasal (> 50%) dari 193 Pasal secara keseluruhan				
Pajak Daerah	Provinsi		Kabupaten	
	1. PKB 2. BBNKB 3. PAB* (New) 4. PBBKB 5. PAP 6. Pajak Rokok 7. Opsen Pajak MBLB (New)		1. PBB-P2 2. PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Listrik, Parkir* (New) 3. BPHTB 4. Pajak MBLB	5. Pajak Reklame 6. PAT 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB (New)
Retribusi Daerah	Jasa Umum		Jasa Usaha	
	1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Kebersihan 3. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 4. Pelayanan Pasar 5. Pengendalian Lalu Lintas		1. Tempat kegiatan usaha, grosir, pertokoan 2. Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan 3. Tempat khusus parkir 4. Tempat penginapan/ pesangrahan/ vila 5. Rumah potong hewan ternak 6. Jasa kapelabuhan 7. Rekreasi, pariwisata, olahraga 8. Penyebarangan orang dan barang di air 9. Penjualan hasil produksi usaha 10. Pemanfaatan (optimalisasi) aset daerah	1. Persetujuan bangunan gedung (PBG) 2. Penggunaan tenaga kerja asing (PTKA) 3. Pengelolaan pertambangan rakyat (new)

Sumber: DJPK, 2024 (diolah)

*Keterangan: PAB dan PBJT adalah jenis pajak baru yang merupakan hasil konsolidasi

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) memuat kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan perda, perkara dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi yang mencakup:

1. Simplifikasi dan integrasi data: memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak Pemerintah Daerah;
2. Akuntabilitas: peningkatan akuntabilitas melalui penyesuaian karakteristik pungutan serta pertanggungjawaban pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP melalui pencatatan/pembukuan dalam rangka mendukung kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Optimalisasi: Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan

pemanfaatan data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan pihak ketiga;

4. Sinergi: sinergi pemungutan pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota melalui opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB.

Analisis tematik pada KFR triwulan III mengkaji implementasi strategi penguatan local taxing power sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum PDRD. Kajian ini terbagi menjadi empat bagian yakni perkembangan penyelesaian peraturan daerah PDRD oleh Pemerintah Daerah, ringkasan rekomendasi hasil evaluasi atas pengaturan dalam peraturan daerah terkait PDRD beserta tindak lanjut Pemerintah Daerah, reviu strategi daerah dalam penguatan *local taxing power*, dan perkembangan kemandirian fiskal daerah realisasi PAD dan *local tax ratio* (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024.





4.2 Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 94 UU No.1 Tentang HKPD bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan demikian, ketersediaan perda PDRD pada setiap daerah menjadi salah satu kunci implementasi PDRD sesuai UU HKPD karena perda PDRD merupakan dasar hukum pemungutan PDRD dalam batas-batas yurisdiksi masing-masing daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan pengaturan PDRD dalam satu perda tersebut, pemerintah daerah akan membutuhkan beberapa perkada turunan dari perda PDRD dimaksud. Beberapa perkada turunan perda PDRD yang dibutuhkan oleh pemda dapat berupa

perkada mengenai PBB dan BPHTB, perkada mengenai reklame, perkada mengenai PKB, BBNKB, dan MBLB yang mencakup pengaturan mengenai opsen atas ketiga pajak tersebut, perkada mengenai PBJT, dan sebagainya.

Selanjutnya Pasal 187 UU No.1 Tahun 2022 Tentang HKPD menegaskan bahwa perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (05 Januari 2022). Dengan batas waktu tersebut, tanggal 5 Januari 2024 menjadi batas terakhir penyelesaian perda PDRD oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penyelesaian penyusunan perda PDRD beserta dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi krusial guna mengantisipasi potential loss PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Progres penyelesaian penyusunan perda PDRD untuk seluruh Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Bengkulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Progres Penyelesaian Penyusunan Perda PDRD Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu

No.	Pemerintah Daerah	Status Penyelesaian Perda PDRD	Implementasi/ Target Waktu Implementasi Perda PDRD	Perkada Turunan Perda PDRD	
				Telah ditetapkan	Masih proses pembahasan
1	Provinsi Bengkulu	Perda Provinsi Bengkulu Nomor 07 tahun 2023	29 Desember 2023	-	1. Perkada terkait Opsen MBLB. 2. Perkada terkait PAB. 3. Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2023 lainnya.
2	Kab. Bengkulu Selatan	Perda Kab. Bengkulu Selatan Nomor 01 tahun 2024	12 Februari 2024	-	1. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Bengkulu Selatan). 2. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
3	Kab. Kaur	Perda Kab. Kaur Nomor 01 tahun 2024	28 Februari 2024	1. Peraturan Bupati Kaur Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Peraturan Bupati Kaur Nomor 32 Tentang Penyelenggaraan Reklame. 3. Peraturan Bupati Kaur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame.	Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
4	Kab. Seluma	Perda Kab. Seluma Nomor 01 Tahun 2024	29 April 2024	-	1. Perkada terkait Optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 2. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
5	Kab. Bengkulu Utara	Perda Kab. Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2023	29 Desember 2023	-	Peraturan Bupati Tentang Tata cara Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 lainnya.
6	Kab. Kepahiang	Perda Kab. Kepahiang Nomor 03 tahun 2024	27 Maret 2024	-	Peraturan Bupati Tentang Tata cara Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2024 lainnya.





No.	Pemerintah Daerah	Status Penyelesaian Perda PDRD	Implementasi/ Target Waktu Implementasi Perda PDRD	Perkada Turunan Perda PDRD	
				Telah ditetapkan	Masih proses pembahasan
7	Kab. Rejang Lebong	Perda Kab. Rejang Lebong Nomor 01 tahun 2024	29 Februari 2024	-	1. Peraturan Bupati Terkait PBB-P2, BPHTB dan Reklame; 2. Peraturan Bupati Terkait Opsen MBLB, Retribusi dan Pajak MBLB dan Opsen; 3. Peraturan Bupati Terkait PB3T; 4. Peraturan Bupati mengenai Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah; 5. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
8	Kab. Lebong	Perda Kab. Lebong Nomor 01 tahun 2024	05 Maret 2024	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase NJOP Yang digunakan Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Perkada terkait Pajak hiburan 2. Perkada terkait Pajak sarang burung walet 3. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
9	Kab. Muko-muko	Perda Kab. Muko-muko Nomor 02 tahun 2024	12 Juni 2024	-	Peraturan Bupati Tentang Tata cara Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2024 lainnya.
10	Kota. Bengkulu	Perda Kota Bengkulu Nomor 01 tahun 2024	13 Januari 2024	-	1. Perkada terkait Pajak Reklame; 2. Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.
11	Kab. Bengkulu Tengah	Perda Kab. Bengkulu Tengah Nomor 1 tahun 2024	25 Maret 2024	-	1. Perkada terkait PB3T atas Jasa Perhotelan; 2. Perkada terkait PB3T atas Makanan dan Minuman; 3. Perkada terkait PB3T atas Tenaga Listrik; 4. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 lainnya.

Sumber: Data Kualitatif Kuesioner (diolah)

Berdasarkan data progres penyelesaian peraturan daerah tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan peraturan daerah PDRD sebelum 5 Januari 2024. Selebihnya, sebanyak sembilan Pemerintah Daerah sisanya menetapkan perda PDRD setelah tanggal 5 Januari 2024, sehingga terjadi ketiadaan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sampai dengan pengaturan PDRD masing-masing daerah diterbitkan.

Akibat dari keterlambatan penerbitan perda PDRD tersebut realisasi PAD s.d. 30 September 2024 mengalami kontraksi 5,67 Persen (yoy), target PAD tahun 2024 sebesar Rp1,8 Triliun terelisasi Rp1,061 Miliar atau mencapai 56,94 Persen. Hal tersebut perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah, karena s.d. saat ini walaupun seluruh Pemerintah Daerah telah menerbitkan pengaturan PDRD, namun perkada turunan pengaturan PDRD masih dalam proses penyelesaian. Perkada turunan tersebut sebagai pengaturan lanjutan atau petunjuk lebih teknis pelaksanaan pengelolaan PDRD di masing-masing wilayah yang berpotensi dapat meningkatkan PAD di wilayah masing-masing.

4.3 Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD beserta tindak lanjut Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat PDRD melakukan evaluasi peraturan kepala daerah terkait PDRD yang telah disusun untuk menguji kesesuaian peraturan daerah tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam UU No.1 tahun 2022 Tentang HKPD dan PP No.35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum PDRD. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan mulai 17 Juli 2024 juga ditembuskan kepada para kepala daerah bersangkutan.

Atas hasil evaluasi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu diminta untuk membuat matriks ringkasan rekomendasi atas hasil evaluasi perda terkait PDRD beserta dengan tindak lanjut (bila ada) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi DJPK tersebut setelah dilakukan konfirmasi dengan Pemerintah Daerah. Hasil konfirmasi terlihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 4.3 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pemda

No	Permasalahan	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut pemda
1	Pemerintah Kab. Rejang Lebong a. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. b. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan batas nilai omzet atau peredaran usaha yang tidak dikenakan Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman. Tujuannya adalah untuk mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM, dengan pengecualian pajak tersebut ditujukan untuk membantu usaha mikro dan kecil. Batas bawah nilai penjualan yang dikenakan PBJT Makanan dan/atau Minuman harus mencerminkan kondisi perekonomian daerah dan tidak terlalu rendah agar tidak membebani usaha mikro dan kecil. c. Ditambahkan ketentuan bahwa penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh penyedia fasilitas, seperti layanan ruang tunggu (lounge) di bandar udara, dikecualikan dari objek PBJT. d. Ditambahkan ketentuan pengecualian konsumsi tenaga listrik yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dari objek pajak, sesuai asas timbal balik. e. Peraturan Bupati mengenai penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan BLUD disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 hari kerja sejak penetapan. f. Perlu kejelasan tentang pelayanan yang dilakukan, karena pelayanan administrasi dan biaya yang dikecualikan dari retribusi jasa umum harus dihapus. g. Pelayanan pendidikan, praktek klinik, penelitian, dan studi banding bukan merupakan pelayanan kesehatan sehingga harus dihapus dari objek retribusi jasa umum. h. Frasa layanan dalam bentuk singkatan atau istilah asing harus diberikan penjelasan dalam struktur tarif untuk memberikan kejelasan kepada wajib retribusi. i. Tarif pelayanan BLUD ditetapkan dalam Perda. Peninjauan kembali atau penambahan layanan dapat diatur lebih lanjut dalam Perkada. j. Besaran tarif retribusi harus ditetapkan dalam satuan angka rupiah dan dicantumkan dalam Perda, contohnya per hari, untuk akuntabilitas dan transparansi. k. Istilah "sewa" disesuaikan menjadi "penggunaan" untuk mencerminkan prinsip retribusi jasa umum yang bersifat non-komersial. l. Tarif dokter pada retribusi jasa umum tidak dibedakan berdasarkan kelas perawatan atau waktu pelayanan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat dan sarana pelayanan kesehatan. m. Pengadaan peti jenazah tidak termasuk objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan, namun dapat menjadi objek retribusi jasa usaha atas penjualan produksi usaha daerah. n. Sewa aula dan kantin bukan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan, namun termasuk retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah dan harus direlokasi. o. Parkir bukan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan, melainkan retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir, dan harus direlokasi. p. Pengelolaan sampah B3 bukan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan, namun termasuk retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan dan harus direlokasi.	Perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan atas Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.	- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong baru mengetahui adanya surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu tertanggal 15 Oktober 2024, dan belum menerima surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda secara resmi baik dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri maupun dari Biro Hukum Provinsi Bengkulu. - Terkait dengan masing - masing Rekomendasi Hasil Evaluasi Ketentuan Retribusi Daerah baik Perubahan maupun Penyesuaian Perda sebagaimana dimaksud telah disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk dimasukkan ke dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah.
2	Provinsi Bengkulu	evaluasi Perda DPRD belum tersedia oleh DPRD	
3	Kab. Bengkulu Selatan		
4	Kab. Kaur		
5	Kab. Seluma		
6	Kab. Bengkulu Utara		
7	Kab. Kepahiang		
8	Kab. Lebong		
9	Kab. Muko-muko		
10	Kota Bengkulu		
11	Kab. Bengkulu Tengah		

Sumber: Laporan ALCo Periode Realisasi 30 September 2024 (diolah)





4.4 Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan Local Taxing Power

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan Karwil DJPb Prov. Bengkulu kepada

Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu, reviu atas strategi penguatan *local taxing power* oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyesuaikan ketentuan PDRD sesuai UU No.1 Tentang HKPD sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Reviu Penguatan Local Taxing Power di Provinsi Bengkulu

No	Pemerintah Daerah	Hasil Reviu
1	Provinsi Bengkulu	Telah ditetapkan Perda terkait PDRD: - Perda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. - Strategi Implementasi: Pemprov Bengkulu telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran implementasi perda PDRD. Rekomendasi: - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD; - Aktif bersinergi untuk melakukan <i>cost sharing</i> dan <i>role sharing</i> serta inovasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota; - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik.
2	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	Perda Kabupaten Rejang Lebong No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Tantangan: - Pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB di wilayah Kabupaten Rejang Lebong; - Kesiapan Aplikasi e-Pendapatan dari Bank Bengkulu terkait pembayaran dan pelaporan pada saat pemungutan opsen pajak daerah; - Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap perubahan/kenaikan tarif pembayaran pajak daerah terkait Opsi PKB, BBNKB dan MBLB. Strategi Implementasi: - Aktif berkoordinasi dengan pihak terkait terutama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perbankan dan samsat terkait implementasi opsen; - Mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan PAD pada Tahun Anggaran 2025; - Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah kepada masyarakat secara rutin melalui berbagai media. Rekomendasi: - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD; - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik; - Segara melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Perda No1 Tahun 2024 dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.
3	Kab. Bengkulu Selatan	Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan, peraturan kepala daerah tentang tata cara pemungutan pajak daerah masih dalam proses penyusunan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024). Tantangan: - Terdapat OPD dan/atau wajib pajak daerah yang belum memahami tentang peraturan daerah terkait PDRD; - Masyarakat yang masih merasa pajak daerah tidak bermanfaat sehingga memicu permasalahan jika dinaikkan besaran pajaknya serta prosedur pajak yang dianggap rumit oleh masyarakat. Strategi Implementasi: - Melakukan sosialisasi perkada No1 Tahun 2024; - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu; - Koordinasi dengan kepolisian (samsat) terkait opsen PKB dan opsen BBNKB; - Koordinasi dengan perbankan untuk penyiapan penyetoran split payment; - Penyiapan Administrasi dan peningkatan kualitas administrasi, digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data; - Peningkatan kapasitas SDM; - Penyiapan strategi komunikasi publik. Rekomendasi: - Menyusun <i>time line</i>, indikator target capaian kinerja, serta <i>unit in charge</i> untuk <i>money</i> progres strategi implementasi; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.
4	Kab. Kaur	Telah ditetapkan Perda terkait PDRD beserta turunannya: - Perda Kaur Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Bupati Kaur Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; - Peraturan Bupati Kaur Nomor 32 Tentang Penyelenggaraan Reklame; - Peraturan Bupati Kaur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Tantangan: - Belum seluruh masyarakat memahami kewajiban membayar pajak; - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak; - Kurangnya jumlah personil dalam pendataan dan penagihan pajak.





No	Pemerintah Daerah	Hasil Reviu
		Strategi implementasi: - Berkoordinasi dengan instansi terkait penerapan perda terkait PDRD; - Melakukan sosialisasi kepada kecamatan dan kepala desa, serta sosialisasi melalui media sosial. Rekomendasi: - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD; - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik.
4	Kab. Seluma	a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. b. Tantangan berupa OPD dan/atau masyarakat yang belum memahami Perda terkait PDRD. Strategi implementasi: - Persiapan layanan samsat keliling, pendataan kendaraan bermotor, razia kendaraan secara rutin; - Peningkatan kualitas SDM. Rekomendasi: - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD; - Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta pihak lainnya dalam rangka kelancaran implementasi opsen PKB, BBNKB, dan MLBB.
5	Kab. Bengkulu Utara	a. Telah ditetapkan perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. b. Tantangan: kesulitan dalam meningkatkan tarif/ketetapan pajak pada masyarakat dan penagihan pajak yang sulit karena rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi implementasi: - Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak kepada masyarakat; - Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal mempermudah pembayaran pajak daerah; - Melakukan MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Arga Makmur dalam hal pendampingan penagihan piutang pajak pada wajib pajak yang sulit bayar. Rekomendasi: - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.
7	Kab. Kepahiang	Telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Tantangan: - Masyarakat yang masih merasa pajak tidak bermanfaat secara langsung sehingga tingkat kepatuhan pajak masih rendah; - Prosedur pajak yang dianggap rumit oleh masyarakat; - Kurangnya SDM di bidang pendapatan dan belum sesuai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan tupoksi yang membidangi pendapatan daerah. Strategi implementasi: penyuluhan dan pemberian reward kepada wajib pajak dan petugas pajak. Rekomendasi: - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD; - Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta pihak lainnya dalam rangka kelancaran implementasi opsen PKB, BBNKB, dan MLBB; - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD.
8	Kab. Lebong	Telah ditetapkan Perda terkait PDRD: - Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase NJOP Yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; - Peraturan Bupati Tentang Tata cara Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 masih dalam tahap penyelesaian. Tantangan: - Penyesuaian pembayaran menunggu kesiapan aplikasi pajak daerah dan aplikasi perbankan; - Masyarakat yang masih merasa pajak tidak bermanfaat secara langsung sehingga tingkat kepatuhan pajak masih rendah; - Prosedur pajak yang dianggap rumit oleh masyarakat; - Masih Kurangnya SDM di bidang pendapatan dan belum sesuai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan tupoksi yang membidangi pendapatan daerah. Strategi Implementasi: - Pengembangan aplikasi pajak daerah dari sisi Pemda, berkoordinasi dengan pihak perbankan; - Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak; - Melaksanakan PKS dengan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Lebong sehingga terjadi sinergitas dalam penerapan kebijakan opsen; - Mengajukan penyesuaian SOTK dan penambahan SDM di bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Rekomendasi: mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.





No	Pemerintah Daerah	Hasil Reviu
9	Kab. Muko-muko	Telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Tantangan: - Kesulitan dalam meningkatkan tarif pajak pada masyarakat; - Penagihan pajak yang sulit karena rendahnya kesadaran masyarakat; Strategi implementasi: - Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk persiapan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025; - Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak kepada masyarakat; - Melakukan MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko untuk pendampingan penagihan piutang pajak; Rekomendasi: - Penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik; - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD; - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD;
10	Kota Bengkulu	Telah ditetapkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Tantangan: - Struktur pajak dan retribusi daerah perlu disempurnakan; - Kurangnya SDM yang memahami regulasi; - Masyarakat yang masih merasa pajak tidak bermanfaat sehingga memicu permasalahan jika dinaikkan pajak; - Prosedur pajak yang dianggap rumit oleh masyarakat. Strategi implementasi: - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu; - Koordinasi dengan Kepolisian (samsat) terkait opsen PKB dan opsen BBNKB; - Peningkatan kapasitas SDM; - Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data; - Penyusunan strategi komunikasi publik; Rekomendasi: mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.
11	Kab. Bengkulu Tengah	Telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkada turunan PDRD tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Tantangan: - Masyarakat yang masih merasa pajak tidak bermanfaat secara langsung sehingga kepatuhan pajak masih lemah; - Masih kurangnya SDM di bidang pendapatan dan belum sesuai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan tupoksi yang membidangi pendapatan daerah. Strategi implementasi: - Pembayaran dengan Qris untuk mempermudah dan meningkatkan Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat yang masih kurang terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Melakukan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik; - Pemberian reward kepada wajib pajak dan petugas pajak daerah, serta OPD Teknis retribusi daerah dalam mencapai target pajak dan retribusi daerah; - Berkoordinasi dengan Instansi-instansi terkait untuk persiapan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025. Rekomendasi: - Mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD; - Peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD;

Sumber: Laporan ALCo Periode Realisasi 30 September 2024 (diolah)

4.5 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan Local Tax Ratio (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024

Bagian ini menyajikan analisis kemandirian fiskal berupa perkembangan realisasi PAD terhadap total pendapatan APBD, perkembangan LTR atau porsi PAD dalam produk domestik regional bruto (PDRB), serta analisis potensi, tantangan, dan strategi optimalisasi PAD-nya pada setiap level Pemerintah Daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

4.5.1 Perkembangan Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Realisasi PAD baik pada Pemda Provinsi Bengkulu maupun PAD konsolidasian pemerintah kabupaten/kota mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2017. Namun demikian, secara umum realisasi PAD Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PAD konsolidasian seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.





Grafik 4.1 **Perkembangan Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kab./Kota Tahun 2017 s.d. September 2024 (dalam Rupiah)**



Sumber: SIKRI (data diolah dengan Cut Off 30 September 2024)

1. Analisis Realisasi PAD di Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2017, total PAD sebesar 1,464 triliun rupiah, yang meningkat secara bertahap kemudian turun pada tahun 2020 pada angka 1,332 triliun rupiah karena dampak pandemi covid-19 kemudian kembali meningkat mulai tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 1,727 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi antara lain kebijakan arah anggaran, penyaluran perlintas, perbaikan infrastruktur, dan inovasi layanan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah se-Propinsi Bengkulu.

Pada tahun 2023 realisasi total PAD mengalami sedikit penurunan, dengan total PAD 2022 sebesar 1,705 triliun rupiah. Sementara itu, per September 2024, realisasi PAD sebesar Rp 628,09 miliar dengan komposisi penerimaan 61,03 Persen berasal dari realisasi PAD Provinsi Bengkulu dan 38,97 Persen berasal dari realisasi PAD Kab/Kota lingkup Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan, Pemerintah provinsi mampu memaksimalkan potensi PAD yang ada. Namun perlu dicatat bahwa sebagian PAD Provinsi nantinya akan dibagi ke Kabupaten/Kota.

2. Potensi Pendapatan Daerah

Sektor-sektor yang berpotensi untuk dilakukan penggalian potensi pajaknya di wilayah Provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian memberikan peran penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama penopang PDRB. Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian,

peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Provinsi Bengkulu memiliki areal pesawahan seluas 62,324 hektar. Dari total tersebut, Kabupaten Seluma merupakan kabupaten memiliki areal sawah terluas, sedangkan Kota Bengkulu memiliki areal sawah sekaligus produksi padi terkecil.

b. Sektor Perkebunan

Selain pertanian, sektor perkebunan juga memegang peranan penting dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dukungan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Sektor perkebunan di Provinsi Bengkulu selain dikelola oleh perusahaan pemerintah, juga dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat. Komoditi perkebunan yang menjadi unggulan di Provinsi Bengkulu yaitu kelapa sawit, karet dan kopi. Daerah penghasil kelapa sawit terbesar berada di Kabupaten Mukomuko, penghasil karet terbesar berada di Kabupaten Kaur, sedangkan penghasil kopi terbesar berada di Kabupaten Kepahiang.

c. Pertambangan dan Industri

Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batu bara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Namun peranan sektor ini dalam PDRB masih relatif rendah yaitu rata-rata berkisar di 3,27 persen. Batubara merupakan hasil tambang unggulan pada sektor pertambangan. Kegiatan eksploitasi tambang





batu bara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu sekitar 55 persen produksi batu bara di Provinsi Bengkulu ditujukan untuk penjualan luar negeri sedangkan sisanya sebesar 45 persen ditujukan untuk penjualan dalam negeri.

d. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar, terutama di perikanan laut, mengingat lokasinya yang menghadap Samudera Hindia. Selain perikanan tangkap, produksi ikan juga berasal dari budidaya. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan, perikanan tangkap laut didominasi oleh Kota

Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko, dengan udang sebagai komoditas utama.

e. Pariwisata dan Budaya

Provinsi Bengkulu memiliki potensi pariwisata terutama wisata sejarah, wisata budaya dan wisata alam. Namun demikian potensi tersebut masih perlu didorong dengan dukungan pengembangan di bidang industri kepariwisataan, destinasi pariwisata dan promosi serta kelembagaan pariwisata.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki tersebut, terdapat beberapa penyelesaian peraturan daerah terkait PDRD yang akan mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, beberapa perda turunan terkait PDRD yang masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Daftar Penyelesaian Perda terkait Potensi PDRD

Pemerintah Daerah	Target waktu penyelesaian	Potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat dikembangkan
Kabupaten Bengkulu Tengah	18 November 2024	PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan Minuman, PBJT atas Tenaga Listrik
Kota Bengkulu	1 November 2024	Pajak Reklame
Kabupaten Rejang Lebong	31 Oktober 2024	Pajak hiburan, Pajak sarang burung walet
Kabupaten Lebong	31 September 2024	Pajak Bumi dan Bangunan
Provinsi Bengkulu	23 Desember 2024	Opsen MBLB dan PAB
Kabupaten Kaur	28 Februari 2025	Retribusi Daerah utk pengusaha ram sawit, Retribusi penjualan hasil peternakan ayam pedaging
Kabupaten Seluma	30 Desember 2024	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Sumber: Laporan ALCo Periode Realisasi 30 September 2024 (diolah)

3. Strategi Optimalisasi PAD

Penguatan local taxing power sesuai Implementasi UU No 1 Tahun 2022 dan PP No 35 Tahun 2023 dapat memberikan peluang untuk memperkuat kapasitas pajak lokal. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan, terutama dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai cara diantaranya:

a) **Revitalisasi sektor unggulan:** Provinsi Bengkulu memiliki potensi ekonomi di sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Optimalisasi pengelolaan sektor-sektor ini melalui peningkatan investasi dan promosi pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah.

b) **Digitalisasi layanan publik dan pajak:**

Meningkatkan digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi akan mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD.

c) **Diversifikasi sumber pendapatan:** Perlu adanya diversifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergali secara optimal, seperti dari aset-aset daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan peran dari sektor non-pajak.

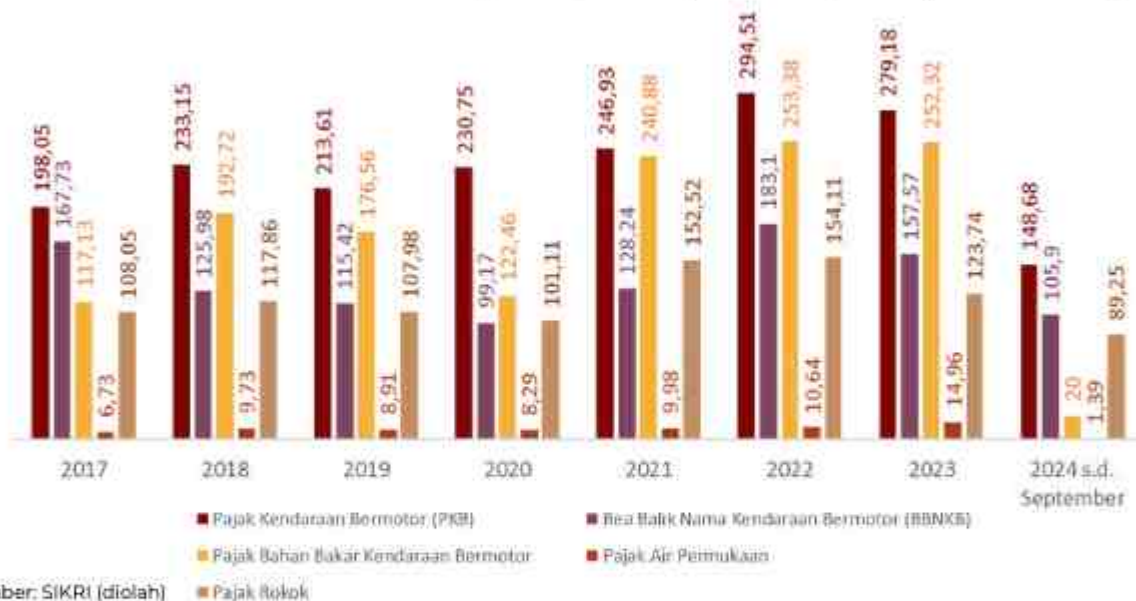
4.5.2 Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota

1. Perkembangan Realisasi Jenis Pajak Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 s.d. September 2024.





Grafik 4.2 **Penerimaan berdasarkan Jenis Pajak Pemprov Bengkulu 2017-Sept 2024 (dalam Miliar Rupiah)**



Berdasarkan data jenis pajak tersebut diatas tahun 2017 hingga September 2024, pajak kendaraan bermotor (PKB) selalu menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu. Penerimaan PKB mencapai puncaknya pada 2022 dengan Rp 294,51 miliar dan tetap tinggi di 2023 sebesar Rp 279,18 miliar. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi Rp 148,68 miliar hingga bulan September, mengindikasikan perlunya strategi baru untuk menjaga stabilitas pendapatan.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga signifikan, meski berfluktuasi. Penerimaan tahun 2017 tercatat Rp 167,73 miliar, menurun menjadi Rp 99,17 miliar di 2020 akibat Covid-19, dan Rp 105,9 miliar hingga September 2024. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh lesunya penjualan kendaraan, menunjukkan perlunya kebijakan insentif untuk menggairahkan pasar.

Data per September 2024 terdapat tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi sebanyak 70.098 unit, tunggakan kendaraan dinas sebanyak 2.058 unit dan tunggakan kendaraan perusahaan sebanyak 8.348 unit. Beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor diantaranya pemberian pembebasan tunggakan pokok dan denda, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, penegakan hukum berupa penyitaan kendaraan bermotor saat pelaksanaan razia kepatuhan PKB, layanan samsat keliling diluar jam kerja kantor, pelaksanaan razia kepatuhan PKB secara rutin, pemberian reward berupa voucher diskon rumah makan/hotel, pelayanan samsat online dsb.

Pada tahun 2024 implementasi opsen PKB dan opsen BBNKB merupakan hal baru amanat UU HKPD dan PP KUPDRD yang memiliki tantangan dalam penerapannya. Menurut DJPK;2024, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, beberapa upaya strategis yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan oleh pemda dalam implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara lain:

- Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah di dukung dengan ketersediaan SDM serta organisasi pengelola PDRD yang efektif dalam optimalisasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Melakukan sinergi (*cost sharing* dan *role sharing*) dan inovasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyiapan tata kelola serta sistem administrasi perpajakan dalam pemungutan opsen termasuk koordinasi dengan pihak kepolisian (Samsat) serta perbankan dalam penyiapan sistem penyetoran dan *split payment*.
- Melakukan strategi perbaikan layanan dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang melibatkan seluruh unit yang terkait.

Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan meningkat seiring dengan meningkatkan kepemilikan kendaraan dan penggunaan bahan bakar, pemungutan jenis pajak ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 jenis pajak ini menurun akibat pembatasan pergerakan orang pada saat pandemi COVID-19, setelah itu pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 mengalami tren peningkatan.





Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal. Dimana

penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50 Persen (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Sejak tahun 2020 tren pajak jenis ini mengalami peningkatan.

2. Perkembangan Realisasi Jenis Pajak Konsolidasi Kabupaten/Kota Tahun 2017 s.d. September 2024.

Tabel 4.6 Penerimaan berdasarkan jenis pajak Pemkab/Pemkot di Bengkulu 2017-Sept 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Pajak Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s.d. September
Pajak Hotel	7,64	9,52	10,48	5,83	10,31	12,14	15,74	9,43
Pajak Restoran	16,46	21,82	24,02	20,62	21,31	26,45	32,47	20,1
Pajak Hiburan	3,08	2,0	2,2	1,34	1,07	2,82	4,0	3,29
Pajak Reklame	2,34	3,8	4,19	3,07	3,93	5,33	5,25	3,12
Pajak Penerangan Jalan	77,69	87,19	95,99	90,7	93,96	106,05	112,37	58,43
Pajak Parkir	1,2	2,8	3,08	2,06	2,54	3,54	4,78	1,75
Pajak Air Tanah	0,44	0,61	0,67	0,47	0,51	0,85	0,99	0,67
Pajak Sarang Burung Walet	0,07	0,09	0,1	0,08	0,13	0,12	0,08	0,03
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,43	8,09	8,91	7,73	10,02	8,51	11,14	3,98
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,13	21,83	24,03	21,72	24,36	25,64	29,2	32,31
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17,45	28,12	30,96	24,05	27,94	35,08	42,92	16,34

Sumber: SIKRI [diolah]

Berdasarkan data konsolidasi kabupaten/kota diatas, pajak hotel mencatat penerimaan tertinggi pada 2023 sebesar Rp15,74 miliar sejak tahun 2017, tren ini terkait dengan perubahan tren wisata sejalan dengan upaya promosi yang lebih kuat dan perbaikan infrastruktur. Pajak Restoran menunjukkan tren positif, naik dari Rp21,31 miliar di 2022 menjadi Rp32,47 miliar di 2023, dan sudah mencapai Rp20,1 miliar hingga September 2024. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di sektor kuliner, didukung kebijakan pajak yang lebih mengakomodasi usaha kecil dan menengah. Pajak penerangan jalan merupakan jenis penerimaan pajak terbesar, hal tersebut karena pemotongan pajak langsung dilakukan PLN setiap pembayaran listrik, trennya akan terus meningkat seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan listrik.

Secara umum realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017. Namun dibalik tren tersebut masih tersimpan potensi penerimaan PBB yang besar, khusus untuk Kota Bengkulu terdapat piutang PBB mencapai Rp119 Miliar (antara news.com). Pemerintah Daerah perlu melakukan

langkah-langkah optimalisasi penerimaan PBB diantaranya program pemutihan denda PBB, kewajiban melampirkan bukti pelunasan PBB untuk mendapatkan layanan pemerintah, kewajiban melampirkan bukti pelunasan PBB untuk pemasangan jaringan baru PLN dsb.

Agar realisasi pendapatan asli daerah dapat direalisasikan sesuai target dan dapat terus mengalami tren peningkatan, Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini kerap ditemui dan menjadi persoalan dalam optimalisasi PAD antara lain:

- a. Perbaiki kualitas data pajak daerah dan wajib pajak yang memberikan kepastian jumlah objek pajaknya. Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisasi untuk melakukan sensus usaha yang dapat dikenai pajak daerah melalui kerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- b. Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada masyarakat serta memberikan penghargaan kepada pembayar pajak, agar keinginan dan





- partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat didorong oleh pemahaman mereka akan pentingnya pajak daerah.
- Penegakan hukum (*law enforcement*) perlu dilakukan dengan tegas. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para penghindar pajak.
 - Melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan mulai dari penyederhanaan prosedur dan sistem serta pengelolaan pajak yang efisien.
 - Meningkatkan kualitas SDM aparat pajak dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan.

3. Perkembangan Realisasi Retribusi Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 s.d. September 2024

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah tingkat Provinsi Bengkulu selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi retribusi konsolidasian seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, perkembangan realisasi retribusi sejak tahun 2017 s.d. September 2024 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 **Penerimaan berdasarkan jenis retribusi Pemrov Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024 (dalam Miliar Rupiah)**

Retribusi Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s.d. September
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,01	0,01	0,01	-	0,04	-	-	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	0,08	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	0,12	0,13	0,11	-	-	0,34	0,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,58	0,96	1,09	1,07	-	-	2,62	0,96
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	-	0,98	1,12	-	3,68	0,11	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1,05	0,3	0,34	0,48	-	-	0,69	0,25
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,32	0,25	0,29	0,29	-	-	0,68	0,25
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,35	0,16	0,18	0,16	-	-	0,47	0,17
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,29	1,29	1,47	0,86	-	3,84	0,31	0,12
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	0,01	0,01	-	0,01	0,03	-	-
Retribusi Izin Perikanan	0,68	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,01	0,01	0,01	0,03	-	-	-	-

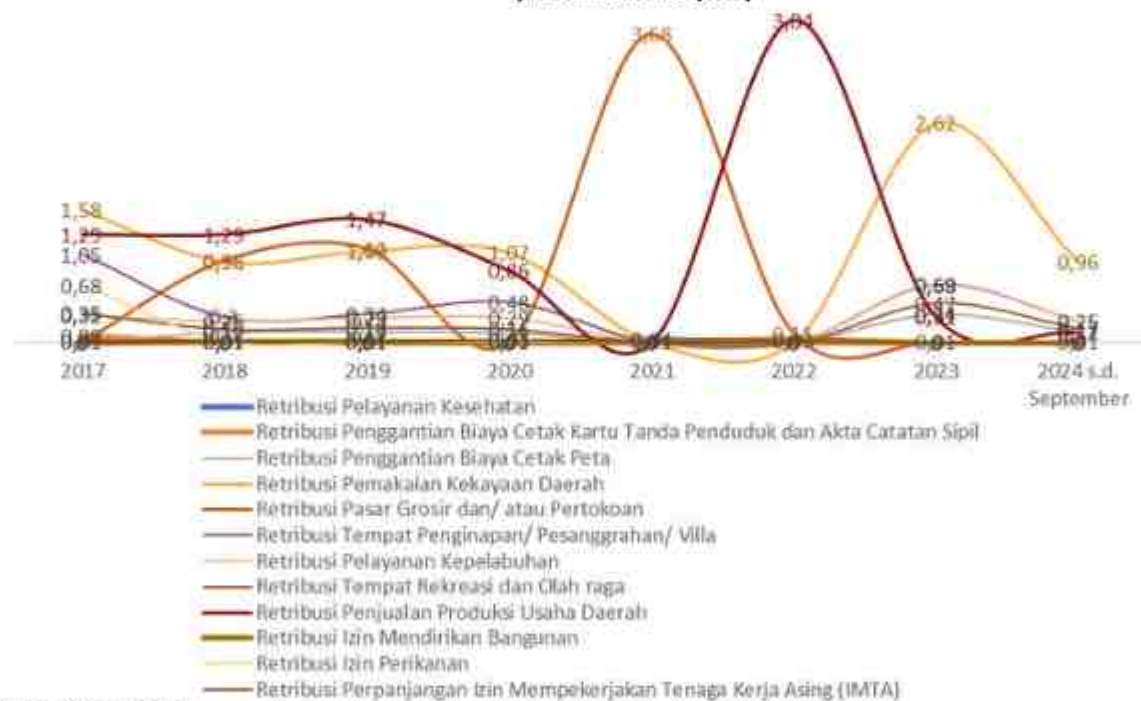
Sumber: SIKRI (diolah)

Realisasi PAD baik pada Pemda Provinsi Bengkulu maupun PAD konsolidasian pemerintah kabupaten/kota mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2017. Namun demikian, secara umum realisasi PAD Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PAD konsolidasian seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.





Grafik 4.3 Tren Penerimaan Berdasarkan Jenis Retribusi Pemprov Bengkulu 2017-September 2024
(dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SIKRI (diolah)

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi dengan realisasi tertinggi per September 2024 dengan realisasi sebesar Rp0,96 miliar. Hal ini menunjukkan tingginya intensitas penggunaan aset milik daerah, seperti lahan, gedung, atau fasilitas umum, untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya optimalisasi aset milik daerah untuk mendanai operasional pemerintah.

Menurut Widiastuti, 2020, untuk mengoptimalkan aset daerah, perlu dilaksanakan program penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset melalui kegiatan:

- Pembentukan tim koordinasi pemanfaatan aset daerah;
 - Inventarisasi aset yang sudah tidak optimal, pembentukan satgas inventarisasi/validasi aset daerah;
 - Kegiatan kajian untuk mendapatkan landasan rasional dan objektif pencapaian kinerja pemberdayaan aset;
 - Pembentukan satgas pemberdayaan/revitalisasi aset daerah;
 - Monev rutin untuk meningkatkan PAD dari kontribusi aset daerah.
4. Perkembangan Realisasi Retribusi Konsolidasi Kabupaten/Kota Tahun 2017 s.d. September 2024.

Tabel 4.8 Penerimaan berdasarkan jenis retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Retribusi Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s.d. September
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,83	9,44	9,52	5,53	24,61	0,31	4,28	1,88
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,53	0,92	0,93	1,23	0,02	0,91	1,23	0,54
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,54	3,65	3,68	4,2	0,02	4,67	4,55	2
Retribusi Pelayanan Pasar	3,46	1,41	1,42	2,14	-	1,28	1,76	0,78
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,66	0,74	0,74	0,77	0,02	1,01	0,92	0,4
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,14	0,04	0,04	0,05	-	0,04	0,06	0,03
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,08	0,03	0,03	0,05	-	0,02	0,04	0,02
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	0,13	0,13	0,03	-	0,08	0,36	0,16





Retribusi Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s.d. September
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,01	0,27	0,28	0,36	-	0,37	0,27	0,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,82	1,04	1,05	1,45	0,02	0,55	1,8	0,79
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,28	2,95	2,97	0,01	4,56	4,64	1,64	0,72
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	0,01	-	-	-	-
Retribusi Terminal	0,25	0,01	0,01	0,02	-	-	0,02	0,01
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,34	0,16	0,16	0,24	-	-	0,35	0,15
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,07	0,18	0,18	0,39	-	-	0,28	0,12
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,36	0,21	0,21	0,31	-	0,19	0,27	0,12
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,22	0,14	0,14	0,17	-	0,04	0,32	0,14
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Kab/Kota	0,32	1,25	1,27	0,13	-	3,85	0,64	0,28
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5,41	4,2	4,24	3,89	3,66	4,01	3,89	1,71
Retribusi Izin Gangguan	2,35	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	0,17	0,01	0,01	0,01	-	0,03	0,02	0,01
Retribusi Izin Perikanan	0,03	0,2	0,21	0,05	-	-	0,71	0,31
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,22	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	0,33	0,33	1,2	-	-	-	-

Sumber: SIKRI (diolah)

Grafik 4.4 Tren Penerimaan berdasarkan Jenis Retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-September 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SIKRI (diolah)

Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum s.d. September 2024 sebesar Rp2 Miliar, merupakan retribusi terbesar yang diterima oleh kabupaten/kota. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan pajak parkir diantaranya terdapat

juru parkir liar, juru parkir yang tidak menyetorkan hasil pungutan parkir, titik parkir ilegal dsb. Untuk mengatasi tantangan tersebut diharapkan Pemerintah Daerah agar rutin mengevaluasi kinerja juru parkir resmi, menindak tegas juru parkir liar,





kemudian melakukan modernisasi pengelolaan parkir dengan penerapan kartu parkir berlangganan dsb.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah kabupaten/kota, s.d. September 2024 penerimaan retribusi pelayanan pasar telah mencapai 0,78 Miliar. Berdasarkan tren sejak tahun 2017 retribusi ini mengalami tren penurunan, tantangan terbesar berasal dari pasar modern yang menawarkan ruangan berpendingin dan bersih. Dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan pasar, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah revitalisasi pengelolaan pasar di antaranya pengelolaan tarif retribusi pasar yang terjangkau dan modern, sarana dan prasarana pasar yang memadai seperti kebersihan, kios permanen, lahan parkir, tersedianya toilet/MCK dsb.

Menurut Bake, dkk;2022, strategi Pemerintah Daerah dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah:

- Intensifikasi yang dilakukan melalui perbaikan regulasi yang terkait dengan perizinan berupa peraturan daerah yang selaras dengan undang-undang terkait, memaksimalkan objek retribusi yang telah ada, melakukan perbaikan kualitas pelayanan retribusi dan pelayanan publik terkait retribusi, meningkatkan intensitas pengawasan dalam proses pemungutan dan pengelolaan retribusi, pendekatan efisiensi biaya melalui perbaikan sistem dan model pemungutan

retribusi, peningkatan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi serta pemahaman metode kerja, minimalisasi biaya operasional melalui penggunaan teknologi.

- Ekstensifikasi, dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan pendataan untuk perluasan objek retribusi baru.
- Membangun kesadaran pembayaran retribusi melalui penyuluhan kepada warga dan masyarakat luas, pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban wajib retribusi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak.

4.5.3 Perkembangan LTR Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Local Taxing Power (LTR) di daerah dapat dilihat melalui dua indikator utama yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak di daerah, yakni tingkat penerimaan pajak di daerah tersebut (PAD) dibandingkan dengan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah tersebut. Lebih jauh makna *local taxing power* ialah sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dari masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup penetapan jenis pajak, tarif pajak, serta prosedur pemungutannya, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah tersebut. Perkembangan *local taxing power* sejak tahun 2017 s.d. September 2024 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Perkembangan LTR Pemerintah Prov. Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu 2017-2024 (dalam Miliar Rupiah)

ADHB	PDRB Provinsi	Pajak Daerah - Prov	LTR (%)	PDRB Kab/Kota	Pajak Daerah - Kab Kota	LTR (%)
2017	60.657,68	597,69	0,985	41.339,74	155,93	0,377
2018	66.402,99	679,44	1,023	45.124,06	185,86	0,412
2019	72.098,24	622,48	0,863	48.891,01	204,62	0,419
2020	73.305,27	561,78	0,766	49.865,9	177,68	0,356
2021	79.602,64	778,55	0,978	54.632,83	196,06	0,359
2022	90.111,95	895,74	0,994	61.498,8	226,53	0,368
2023	96.551,38	827,78	0,857	65.146,85	258,95	0,397
2024 s.d. TW. II	26.500.000	410,26	0,002	data belum tersedia	149,45	

Sumber: SIKRI (diolah)





Grafik 4.5 Tren LTR Pemerintah Prov. Bengkulu dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu 2017-2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SIKRI (diolah)

*LTR Kab./Kota Tahun 2024 belum release

Secara keseluruhan, LTR Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 s.d. tahun 2024. Pada tahun 2018, LTR provinsi mencapai puncak di 1,023 Persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 0,766 Persen pada 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, persentase LTR mulai naik kembali, namun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 0,857 Persen. Data untuk tahun 2024 yang hanya sebesar 0,002 Persen masih terbatas hingga Triwulan II, sehingga belum bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan keseluruhan tren tahun tersebut. Oleh karena itu, persentase ini masih berpotensi berubah dan tidak bisa dianggap sebagai penurunan yang signifikan.

Tren LTR di kabupaten/kota cenderung lebih stabil dibandingkan provinsi. Dari 0,377 Persen pada tahun 2017, LTR kabupaten/kota mengalami peningkatan kecil hingga mencapai 0,419 Persen pada tahun 2019, kemudian sedikit turun menjadi 0,356 Persen pada tahun 2020. Setelah itu, persentase LTR kabupaten/kota bergerak stabil di kisaran 0,35 Persen -0,40 Persen hingga tahun 2023. Namun, data PDRB kab./kota untuk tahun 2024 belum tersedia sehingga LTR untuk tahun 2024 belum dapat dihitung. Dari data terlihat bahwa LTR di Provinsi Bengkulu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memungut pajak. Namun, tren menurun pada tahun-tahun terakhir menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas pajak daerah, khususnya di tingkat provinsi.

Perubahan LTR akibat pengaruh kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023 belum terlihat menonjol. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat *local taxing power* dan

meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB. Namun, tren pada tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan bahwa hasil dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya terefleksi dalam peningkatan LTR di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah.

Menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terdapat setidaknya lima tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan *local taxing power*:

- Perencanaan pendapatan yang masih rendah, masih ada daerah yang menyusun perencanaan target PDRD berdasarkan tren realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kondisi perekonomian dan analisis potensi PDRD di daerahnya.
- Kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang kurang, terutama dari sisi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil survei, masih banyak pemda yang tidak memiliki juru sita dan petugas pajak. Masih terdapat ketimpangan ekonomi antar daerah, salah satu faktor penyebabnya ialah kondisi infrastruktur sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pada kuartal I tahun 2024 57,7 Persen PDB nasional berada di pulau Jawa, sedangkan wilayah Papua hanya 2,62 Persen.
- Kurangnya kepatuhan wajib pajak, karena peningkatan jumlah objek pajak tidak sebanding dengan penerimaan pajak. Sebagai contoh Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor saat ini baru 51,99 Persen.
- Belum semua Pemerintah Daerah menerapkan elektronifikasi transaksi pemda, berdasarkan





hasil asesmen indeks elektronifikasi transaksi pemda pada semester I tahun 2024 menunjukkan 480 pemda atau 87,9 Persen pemda berada dalam level digital.

Selanjutnya, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa strategi untuk meningkatkan *local taxing power*:

- a. Dukungan perangkat kebijakan yang tertuang dalam perda terkait PDRD yang selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023, terdapat dua hal penting yakni simplifikasi dan rasionalisasi. Simplifikasi harapannya menekan *administration cost*, sedangkan rasionalisasi perda PDRD disusun dengan memperhatikan potensi-potensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada di daerahnya.
- b. Dukungan sumber daya manusia di daerah, kondisi saat ini jumlah pejabat fungsional yang terkait langsung dengan PDRD masih sangat terbatas. Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi SDM-nya.
- c. Dukungan Infrastruktur teknologi informasi, sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik.

4.6 Analisis Pengaruh *Good Governance Practices* terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Local Taxing Power*) di Provinsi Bengkulu

Penelitian ini dilakukan oleh Januar Sulaeman, Muhamad Agnansah Herliananda, Raditya Yudhan Kustanto sesuai surat tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen Kemenkeu Nomor ST-623/SJ.5/2024 hal penugasan untuk mengikuti rangkaian kegiatan *secondment* penguatan fungsi *Regional Chief Economist* (RCE) Triwulan III tahun 2024 pada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Dengan ringkasan penelitian sebagai berikut:

4.6.1 Latar belakang

1. Rendahnya *local taxing power* Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu;
2. Rendahnya rasio kemandirian fiskal Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu;
3. Rendahnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu;
4. Implementasi *good governance* di pemerintahan

5. Provinsi Bengkulu masih belum optimal. Berdasarkan data Kementerian PAN dan RB tahun 2024, Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai reformasi birokrasi di rentang 60 – 70 dengan kategori Baik (B). Meskipun masuk kategori baik, predikat tersebut relatif lebih rendah dibanding mayoritas provinsi di Pulau Sumatera seperti Provinsi NAD, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berpredikat Sangat Baik;
6. Masih banyak temuan-temuan BPK yang berulang atas pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja. Jumlah temuan tersebut justru cenderung meningkat dari 210 temuan di tahun 2019, menjadi 267 temuan di tahun 2022;
7. Masih tingginya tingkat korupsi di Provinsi Bengkulu.

4.6.2 Landasan teori

1. Agency teori

Ketika prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, pemerintah secara tidak langsung telah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintahan telah dijalankan dengan baik. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketika kepercayaan kepada pemerintah naik, mereka akan lebih suka rela membayar pajak karena terdapat keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat maksimal dari pajak yang telah dibayarkan.

2. New Public Management Theory (NPM)

Teori NPM melandasi bagaimana praktik-praktik pemerintahan yang baik perlu untuk diimplementasikan guna pencapaian visi dan misi suatu organisasi.

3. Praktik pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Institute of Governance Studies (IGS) mendefinisikan *Good Governance* sebagai cara lembaga-lembaga publik menjalankan wewenang mereka untuk mengelola sumber daya publik dan urusan publik. UNDP (1997) mengemukakan bahwa dalam konsep *Good Governance* terdapat prinsip-prinsip yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta mengikuti supremasi hukum.

Dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu dan ketersediaan data di lapangan dimensi *good governance* yang diadopsi dalam penelitian ini terdiri atas prinsip efektivitas dan manajemen SILPA, akuntabilitas dan transparansi



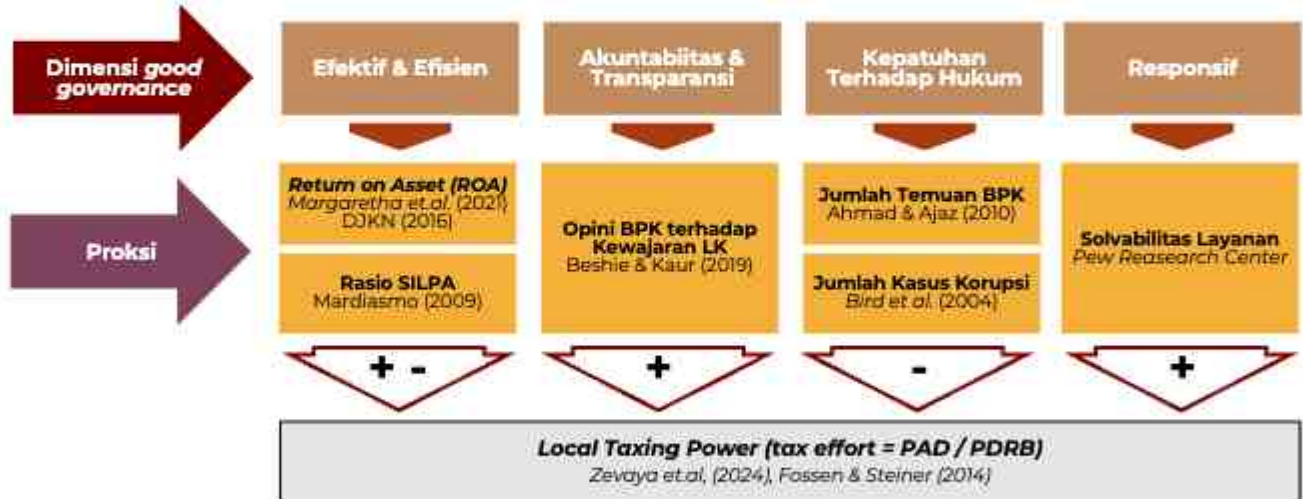


yang diwakili oleh opini BPK atas kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan

yang diwakili oleh jumlah temuan BPK dan jumlah kasus korupsi, serta responsifitas yang diwakili oleh solvabilitas.

4.6.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 4.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Presentasi Secondee (diolah)

4.6.4 Metode Penelitian

Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh *good governance* terhadap *local taxing power* dilihat dari besaran nilai variabel-variabel yang dijadikan proksi, baik untuk mewakili *good governance* maupun *local taxing power*. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan regresi data panel pada tahun 2019 s.d. tahun 2022. Dengan menggunakan berbagai proksi untuk menilai *good governance* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya serta memasukkan variabel kontrol berupa jumlah populasi, pertumbuhan PDRB, dan indeks kapasitas fiskal daerah, maka persamaan ekonometrika yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh *good governance* terhadap *local taxing power* adalah sebagai berikut:

$$LTP(Y_{it}) = \alpha + \beta_1 ROA_{it} - \beta_2 SILPA_{it} + \beta_3 AUDIT_{it} - \beta_4 Korupsi_{it} - \beta_5 Temuan_{it} + \beta_6 SOLVA_{it} + \beta_7 POP_{it} + \beta_8 GrowthPDB_{it} + \beta_9 IKFD_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

LTP	: Local Taxing Power
ROA	: Return on Asset
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
AUDIT	: Opini BPK atas Laporan Keuangan
Temuan	: Jumlah temuan atas SPI
Korupsi	: Jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri
SOLVA	: Solvabilitas Layanan

Growth PDRB	: Laju pertumbuhan PDRB
POP	: Jumlah populasi
IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
α	: koefisien konstanta persamaan regresi
$\beta_1 - \beta_9$	: koefisien variabel independen persamaan regresi
ϵ_{it}	: error term persamaan regresi

Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi *good governance* dan kondisi *local taxing power* di Provinsi Bengkulu yang tidak dapat dijelaskan oleh angka dalam analisis kuantitatif. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dapat merepresentasikan tata kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu yaitu Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

4.6.5 Hasil Penelitian

Tabel 4.10 Hasil Summary Interpretasi

Vary.	Var x	Koefisien β	Arah Hubungan	Level Signifikansi		
				1 %	5 %	>10% (tidak signifikan)
Local Taxing Power (LTP)	ROA	0,8340	+	✓		
	SILPA	0,0456	-	✓		
	SOLVA	0,4520	+	✓		
	AUDIT	0,0458	+		✓	
	KORUPSI	0,0039	+			✓
	TEMUAN	0,0017	-			✓

Sumber: Secondee





Data dalam Tabel 11 tersebut dapat dinotasikan sesuai model penelitian, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} LTP(Y_{it}) = & -6,914 + 0,834 ROA_{it} - 0,0456 SILPA_{it} \\ & + 0,00458 AUDIT_{it} \\ & + 0,0039 Korupsi_{it} \\ & - 0,0017 Temuan_{it} + 0,4520 SOLVA_{it} \\ & - 0,170 POP_{it} + 0,0219 GrowthPDB_{it} \\ & + 0,0243 IKFD_{it} + \epsilon_{it} \end{aligned}$$

1. Variabel ROA berkorelasi positif signifikan 1% sebesar 0,834. Artinya, setiap kenaikan 1% variabel ROA meningkatkan 0,00834 persentase poin (pp) variabel LTP. Selanjutnya, variabel Rasio SILPA menunjukkan hubungan negatif signifikan 1% sebesar 0,0456, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel Rasio SILPA akan menurunkan 0,00046 pp variabel LTP. Variabel ROA dan Rasio SILPA merupakan proksi dari indikator efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, menandakan semakin efektif dan efisien pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah, maka akan meningkatkan *local taxing power*.
2. Koefisien variabel Solvabilitas Layanan (SOLVA) sebesar 0,452 diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 1% solvabilitas layanan akan meningkatkan variabel LTP sebesar 0,00452 pp. Solvabilitas layanan mencerminkan kemampuan pemerintah merespon masyarakat melalui pemberian pelayanan dengan mengandalkan aset yang dimiliki, baik aset lancar maupun tetap. Semakin tinggi solvabilitas layanan, semakin responsif pelayanan publik yang diberikan.
3. Variabel Opini WTP yang merupakan proksi dari Akuntabilitas dan Transparansi berhubungan positif pada tingkat signifikan 5%. Perubahan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan daerah dari WDP ke WTP akan menaikkan 0,046 pp variabel LTP. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perubahan WDP ke WTP menandakan semakin transparan dan akuntabelnya Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan *local taxing power*.
4. Indikator *good governance* berupa kepatuhan mengikuti aturan — *Rule Adherence* — yang diproksikan oleh jumlah temuan BPK atas lemahnya SPI dan jumlah kasus korupsi, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap *local taxing power*. Berdasarkan kajian dan hasil wawancara, terdapat dua hal yang diduga dapat menjelaskan mengapa kedua hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi *local taxing power*. Pertama, sampai dengan saat ini Pemda masih sangat bergantung pada penerimaan perpajakan yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan

pembayaran atas pemakaian layanan tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Besarnya pembayaran PPJ tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah kasus korupsi atau jumlah temuan BPK di daerahnya. Kedua, fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan *agency problem theory*. Sesuai teori tersebut, terdapat kesenjangan (gap) informasi antara wajib pajak (prinsipal) dan pemerintah (agent) yang memungkinkan prinsipal sebagai pembayar pajak tidak memperoleh informasi yang cukup memadai atas kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh agen (pemerintah), sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan terkait pembayaran pajak berdasarkan informasi yang tepat.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, tantangan yang dihadapi Pemda terkait implementasi UU HKPD antara lain:
 - a. Kekhawatiran dari Pemda bahwa dengan implementasi Opsen[1]—seperti Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)—akan menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan beban wajib pajak daerah.
 - b. Sumber Daya Manusia yang ada di Pemda saat ini (*existing*), belum memadai secara kualitas dan kuantitas.
 - c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemda untuk pemungutan pajak belum memadai, meliputi gedung operasional, infrastruktur teknologi pengolahan data, dan kendaraan operasional.

4.6.6 Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahannya. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator *good governance* yang cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya.
2. Hasil temuan penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa *good governance* yang diwakili oleh pengelolaan aset pemerintah (ROA) dan manajemen SILPA sebagai representasi efektivitas dan efisiensi, opini BPK atas kewajaran laporan keuangan sebagai representasi akuntabilitas dan transparansi, dan solvabilitas layanan sebagai representasi responsivitas menyebabkan semakin kuat/lemahnya *Local Taxing Power*. Sementara itu, jumlah temuan BPK atas SPI dan jumlah kasus korupsi sebagai representasi kepatuhan aturan (*rule adherence*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Local Taxing Power*. Penyebab hubungan tidak signifikan tersebut karena Pemerintah Daerah





memiliki ketergantungan atas penerimaan pajak yang sifatnya low effort dan tingkat kesadaran informasi masyarakat terhadap kinerja masyarakat yang relatif rendah.

3. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan yang besar dalam implementasi *Good Governance* untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tantangan tersebut meliputi kurang memadainya proses bisnis dan SDM, penatausahaan aset yang belum optimal, pengelolaan anggaran yang kurang fleksibel dan belum sesuai peruntukan, ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tinggi, serta proses pelaporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
4. Pemerintah Daerah telah berproses dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut atas Implementasi UU HKPD dan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun masih terdapat tantangan dalam implementasi tersebut, yaitu (a) terdapat kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bahwa implementasi UU HKPD akan menurunkan penerimaan daerah; (b) belum memadainya SDM dan sarana prasarana dalam mendukung pemungutan pajak.

4.6.7 Rekomendasi

1. Dalam rangka manajemen besaran SILPA yang lebih baik, Pemerintah Daerah perlu lebih cermat dalam merencanakan penganggaran, terutama kegiatan/program yang besaran dananya bersumber dari

Pemerintah Pusat dan telah ditentukan peruntukannya, misalnya DAU-Earmark. Di samping itu, dalam penentuan DAU-Earmark, Pemerintah Pusat perlu lebih mempertimbangkan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah agar besarnya SILPA yang tidak terserap karena kekhususan suatu daerah dapat diminimalisasi;

2. Dalam rangka manajemen aset yang lebih baik, Pemerintah Pusat—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri—perlu mempercepat penyempurnaan dan implementasi modul-modul dalam SIPD. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu membuat suatu mekanisme agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa mencairkan anggaran sebelum mereka melakukan inventarisasi atas aset yang dimiliki;
3. Untuk memotivasi pencapaian kinerja yang lebih maksimal dalam pelaporan keuangan, pembuat kebijakan perlu menyediakan mekanisme *pay for performance* yang memadai bagi para pegawai yang terkait dalam pencapaian kinerja pelaporan keuangan. Misalnya pemberian bonus dan penghargaan dalam bentuk non tunai atas prestasi pencapaian Laporan Keuangan pemerintah dengan opini WTP;
4. Pemerintah Daerah bersama dengan otoritas terkait (misalnya BPK, ICW, dan Ombudsman) perlu memberikan sosialisasi secara reguler kepada masyarakat luas dan media yang bervariasi terkait capaian kinerja dan kewajiban atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.



Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun.

-Soekarno (Presiden pertama RI)-



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI





Tugu THOMAS PARR

Tugu Thomas Parr adalah sebuah monumen yang terletak di Bengkulu, Bengkulu, Indonesia dan didedikasikan kepada Thomas Parr, Residen Inggris di Bengkulu yang terbunuh pada 1807. Dibangun setahun setelah kematiannya, bangunan tersebut dianggap sebagai cagar budaya Tugu Thomas Parr terletak di Jalan Ahmad Yani, di subdistrik Kampung Cina di Kota Bengkulu, Bengkulu. Tempat tersebut tidak jauh dari pusat kotanya dan mudah diakses. Monumen tersebut berjarak sekitar 170 meter (560 ft) dari tenggara Benteng Marlborough, bekas tempat pertahanan Inggris di wilayah tersebut. Tempat tersebut aslinya berada di dekat bangunan-bangunan yang dibangun pemerintahan Perusahaan Hindia Timur dan dewan pemerintahan Inggris. Namun, wilayah tersebut kemudian menjadi tempat komersial, dengan beberapa toko dan sebuah kantor pos yang terletak di dekat tugu tersebut.

sumber artikel : id.wikipedia.org



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 1 sampai bab 4, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan dan dijadikan catatan penting dalam Kajian Fiskal Regional triwulan III tahun 2024 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Kinerja Indikator Perekonomian dan Kesejahteraan

1. Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024 Tetap Tumbuh Positif 4,57 persen (y-o-y), namun Apabila dilihat Pendekatan q-to-q Mengalami Kontraksi Sebesar 2,56 Persen

Pertumbuhan ekonomi secara y-o-y tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas organisasi kebudayaan selama pelaksanaan festival tabut yang meningkatkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja infrastruktur publik juga memperkuat sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat. Namun, berdasarkan pendekatan q-to-q mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen. Kontraksi ini disumbang dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar minus 12,45 persen yang disebabkan oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat setelah momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar minus 8,66 persen akibat perlambatan belanja pemerintah pada sejumlah lembaga, seperti Kementerian PUPR, KPU dan Bawaslu karena tahapan Pilkada yang baru berjalan serta adanya kendala teknis, seperti izin material pada proyek jalan Enggano. PK-P diprediksi meningkat di Triwulan IV seiring pelaksanaan Pilkada serentak dan penyelesaian proyek-proyek fisik pemerintah, namun akan sedikit tertahan oleh kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Nilai nominal PDRB Provinsi Bengkulu mencapai Rp25,82 triliun (ADHB) dan sebesar Rp13,55 triliun (ADHK tahun 2010). Secara spasial PDRB Bengkulu berkontribusi sebesar 2,18 persen terhadap PDRB regional Sumatera (terendah se-Sumatera). Dari sisi PDRB berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga (PK-RT) menjadi komponen penyumbang terbesar sebesar 59,82 persen sebagai akibat

peningkatan aktivitas organisasi kebudayaan selama pelaksanaan festival tabut dan persiapan memasuki tahun ajaran baru sekolah diawal bulan Juli. Sementara dari sisi PDRB berdasarkan lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,91 persen dengan produksi unggulan padi, kelapa sawit, karet, dan kopi.

2. Perkembangan Inflasi Daerah, pada Bulan September 2024, Tingkat Inflasi dari Tahun ke Tahun (y-o-y) Provinsi Bengkulu Sebesar 1,48 Persen

Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan inflasi pada Kota Bengkulu dan Kabupaten Muko-Muko. Tingkat Inflasi ini terjadi karena kenaikan indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,56 persen, penyumbang utama inflasi pada kelompok ini ialah sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,29 persen dan beras sebesar 0,13 persen. **Sedangkan secara month to month (m-to-m) pada bulan September 2024 Provinsi Bengkulu mengalami deflasi sebesar 0,28 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Juni 2024 sebesar 0,38 persen.** Deflasi pada September 2024 didorong oleh menurunnya harga komoditas makanan, minuman dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,30 persen, adapun komoditas penyumbang deflasi antara lain cabai merah tomat, cabai rawit dan wortel yang sedang musim panen di sejumlah daerah.

3. Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor

Neraca perdagangan pada bulan September 2024 mengalami **surplus** sebesar USD12,64 juta, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 19,43 persen (yoy) bila dibandingkan September 2023 sebesar USD10,58 juta. **Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu hanya ditopang oleh nilai ekspor, hal ini dikarenakan sejak September 2021 hingga September 2024, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu.**

Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan September 2024 yaitu batubara sebesar US\$10,18 juta (80,55 persen), karet sebesar US\$1,22 juta (9,65 persen), cangkang sawit sebesar US\$0,85 juta (6,70 persen), lintah sebesar US\$2,21 ribu (0,02 persen), dan





komoditas lainnya sebesar US\$3.90 ribu (3,08 persen). Ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu masih terbatas untuk komoditas curah kering, sedangkan komoditas curah basah seperti CPO yang merupakan komoditas utama Bengkulu masih dilakukan melalui pelabuhan di luar Provinsi Bengkulu karena keterbatasan Pelabuhan Pulau Baai terutama seringnya terjadi pendangkalan.

4. Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu secara umum mulai membaik

- Tingkat Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 13,56 persen (281,36 ribu jiwa) menurun 0,48 persen dibanding Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen (288,46 ribu jiwa) namun masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,03 persen.** Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 masih menjadi tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh.
- Rasio Gini Maret 2024 (0,342) meningkat sebesar 0,009 persen poin dari Rasio Gini Maret 2023 (0,333).** Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat, namun masih tergolong kedalam ketimpangan rendah atau terjadi pemerataan ekonomi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 turun 0,31 persen poin menjadi 3,11 persen dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,42 persen.** Angka ini bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yang berada pada angka 4,91 persen, maka nilai TPT Provinsi Bengkulu berada lebih baik sebesar 1,80 persen.
- NTP Provinsi Bengkulu September 2024 sebesar 190,15 atau naik 2,68 persen (mtm) dibanding NTP bulan Agustus 2024 senilai 185,19 persen.** Jika dibandingkan dengan nilai NTP nasional pada bulan September 2024 yang berada di angka 120,30, maka NTP Provinsi Bengkulu berada di atas nilai NTP nasional, lebih tinggi sebesar 69,85 persen poin. Kenaikan NTP dikarenakan oleh kenaikan pada indeks harga hasil produksi pertanian serta indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga mengalami penurunan. Namun sejalan dengan deflasi yang terjadi pada beberapa produk hortikultura, subsektor Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) mengalami kontraksi sebesar 11,22 persen.
- NTN Provinsi Bengkulu berada diangka 109,24, mengalami peningkatan sebesar 1,43 persen

(mtm) dan tumbuh negatif sebesar 1,36 persen (yoy). Angka NTN ini masih berada diatas NTN nasional yang berada diangka 101,98, didorong oleh letak geografis Bengkulu yang strategis berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Kinerja Fiskal Regional Provinsi Bengkulu

1. Kinerja APBN Sisi Pendapatan Mengalami Kenaikan Sebesar 6,8 Persen (yoy). Sementara Kinerja APBN Sisi Belanja Naik Sebesar 11,4 Persen

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN sampai dengan akhir Triwulan III 2024 sebesar Rp2.464,58 miliar atau 73,95 persen dari estimasi pendapatan yang ditargetkan. Kinerja ini naik 6,8 persen dibandingkan Triwulan III TA 2023. Seluruh komponen pendapatan negara mengalami kenaikan. Kinerja pendapatan perpajakan naik 7,5 persen sedangkan PNBPN naik 3,5 persen.

Kontribusi terbesar penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu ada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 27,91 persen dan pertumbuhan signifikan sebesar 64,65 persen (yoy). Pertumbuhan ini mengindikasikan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi di Bengkulu, didorong oleh perbaikan ekonomi daerah pasca pandemi. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang kontribusi sebesar 24,94 persen, dengan pertumbuhan yang kuat sebesar 14,54 persen (yoy). Hal ini menunjukkan pentingnya peran realisasi belanja APBN dan APBD di Bengkulu.

Kinerja PNBPN di Bengkulu didorong oleh komponen Pendapatan BLU, yang terealisasi sebesar Rp240,04 miliar atau 104,55 persen dari target. Hal ini menunjukkan optimalisasi pada berbagai layanan publik yang disediakan di Bengkulu serta kecenderungan meningkatnya pendapatan BLU secara musiman pada triwulan III berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru pada BLU Sektor Pendidikan yaitu Universitas Bengkulu, Poltekkes Bengkulu, dan UIN Fatmawati Soekarno.

Dari sisi pengeluaran, belanja APBN hingga akhir triwulan III 2024 terealisasi sebesar Rp.11.692,21 miliar atau 69,74 persen dari pagu, naik sebesar 11,4 persen dibandingkan Triwulan III 2023. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.564,09 miliar naik sebesar 11,3 persen sementara belanja TKD sebesar 8.128,12 miliar naik sebesar 11,5 persen (yoy). Kinerja belanja negara yang positif tersebut tercermin dalam pertumbuhan





dan kontribusi sektor administrasi pemerintahan dalam pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan perpajakan.

2. Kinerja APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda) Sisi Pendapatan Mengalami Kenaikan Sebesar 13,90 Persen (yoy), Sementara Sisi Belanja juga Mengalami Kenaikan Sebesar 6,9 Persen (yoy)

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Bengkulu (konsolidasi semua pemda) hingga akhir triwulan III 2024 tercatat Rp9.168,39 miliar, naik 13,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) konsolidasi mengalami kontraksi sebesar 5,67 persen dari Rp1.121,97 miliar tahun 2023 menjadi Rp1.061,8 miliar tahun 2024, faktor utama penyebab kontraksi PAD tersebut ialah terlambatnya sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dalam membuat peraturan turunan terhadap Perda PDRD sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Realisasi belanja APBD Provinsi Bengkulu (konsolidasi semua pemda) naik sebesar 6,9 persen dibandingkan triwulan III Tahun 2023 dengan terealisasi sebesar Rp8.031,3 miliar. Realisasi belanja operasi sebesar Rp5.958,61 miliar mengalami peningkatan dari Triwulan III-2023 yang sebesar Rp5.510,54 miliar, dengan pertumbuhan 8,13 persen (yoy). **Secara proporsi, belanja pegawai masih mendominasi dari keseluruhan belanja operasi dengan porsi 62,90 persen senilai Rp3.747,81 miliar.** Realisasi belanja modal mencapai Rp802,67 miliar lebih kecil dibandingkan triwulan III tahun 2023 sebesar Rp807,59 miliar, mengalami Kontraksi sebesar 0,61 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. **Belanja modal memiliki proporsi hanya sebesar 9,99 persen dari total Belanja Daerah.** Realisasi belanja tidak terduga mencapai Rp619,2 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan III tahun 2023 yang mencapai Rp982,73 juta atau mengalami kontraksi sebesar 38,71 persen. Realisasi Belanja Transfer sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp1.269,41 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen (yoy) dibandingkan triwulan III tahun 2023. Seluruh Pemda di Provinsi Bengkulu belum memenuhi ketentuan porsi belanja daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yaitu **porsi belanja belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja modal minimal 40 persen dari pagu belanja daerah.**

Pengembangan Ekonomi Daerah: Pemberdayaan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Provinsi Bengkulu memainkan peran penting dalam perekonomian daerah. UMKM berkontribusi dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan UMKM untuk menjaga dan meningkatkan peran penting UMKM dalam perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Bengkulu antara lain: (1) keterbatasan akses modal dan keuangan, kurangnya akses ke teknologi dan digitalisasi, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, (3) permasalahan dalam rantai pasokan dan distribusi, (4) keterbatasan akses pasar, (5) regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung, serta (6) kendala ekonomi dan pandemi.

Strategi pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui pendekatan yang holistik, mencakup dukungan dalam hal keuangan, keterampilan, teknologi, dan akses pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memberdayakan UMKM antara lain: (1) peningkatan akses terhadap modal, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, (2) digitalisasi dan adopsi teknologi, (3) akses pasar yang lebih luas, penguatan jaringan dan kolaborasi, (4) optimalisasi regulasi dan dukungan pemerintah, (5) pengembangan kualitas produk dan inovasi, dan (6) pendampingan bisnis dan mentorship.

Dukungan Pemerintah di Kementerian/Lembaga untuk para pelaku UMKM di wilayah Bengkulu terdapat pada dua K/L yaitu Kementerian Perindustrian dan BPOM dengan nilai alokasi anggaran Rp1.89 Miliar. Pada Kementerian Perindustrian dukungan belanjanya untuk pelatihan kepada UMKM serta pendampingan dalam pengembangan produk UMKM, sedangkan pada BPOM alokasi belanjanya diperuntukan untuk pendampingan pemenuhan standar edar produk UMKM. Secara keseluruhan realisasi anggaran dukungan belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp1,16 Miliar atau 61,51 persen.

Dukungan belanja TKD, telah dialokasikan anggaran dalam mendukung pemberdayaan UMKM, yaitu: (1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK; dan





(2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM. Alokasi dana peningkatan koperasi dan UMK terdapat pada lima pemda kabupaten/kota dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp6,56 Miliar, dengan serapan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2024 Rp4,23 Miliar atau sebesar 64,52 persen. Alokasi dana penguatan kapasitas Kelembagaan sentra IKM, pada wilayah Provinsi Bengkulu terdapat pada Kab. Bengkulu Utara, dengan alokasi sebesar Rp2,28 Miliar dan telah dibelanjakan secara optimal atau sebesar 100 persen.

Dukungan pembinaan UMKM oleh Kanwil DJPb Bengkulu, pada tahun 2024 terdapat 27 unit UMKM binaan. Berdasarkan hasil profiling yang telah dilakukan kepada 12 UMKM binaan dapat diklasifikasikan bahwa terdapat lima UMKM rintisan, antara lain: Warung Damiya, Rumah Babe, D'Jamuin Aja, Yuni Kreatif, dan Dendeng Jantung Pisang 3 Jagoan, terdapat empat UMKM siap mandiri, antara lain: Pempek Dewi Yul, Basreng "Aa", Kopi Dusun Cap Sanak Kito, dan Coffe Manna RM82, terdapat satu UMKM siap ekspor, yaitu Rafflesia Keyzee.

Analisis Tematik: Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD

1. Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah

Batas waktu penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai amanah UU tentang HKPD adalah tanggal 5 Januari 2024. Namun hanya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah menetapkan perda PDRD sebelum 5 Januari 2024. Selebihnya, sebanyak sembilan Pemerintah Daerah sisanya menetapkan perda PDRD setelah tanggal 5 Januari 2024, sehingga terjadi ketiadaan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sampai dengan pengaturan PDRD masing-masing daerah diterbitkan. Akibat dari keterlambatan penerbitan perda PDRD tersebut realisasi PAD s.d. 30 September 2024 mengalami kontraksi 5,67 persen (yoy), target PAD tahun 2024 sebesar Rp1,8 Triliun terelisasi Rp1,061 Miliar atau mencapai 56,94 persen. Hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan hasil monitoring sampai saat ini seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) turunan PDRD sebagai kelengkapan regulasi beberapa jenis PDRD

yang akan diterapkan mulai tahun 2025 dan sebagian besar masih dalam proses penyelesaian.

2. Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD beserta tindak lanjut Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat PDRD melakukan evaluasi peraturan kepala daerah terkait PDRD yang telah disusun, per tanggal 30 September 2024 hanya Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong yang telah selesai dievaluasi. Hasil evaluasi ketentuan perkada terkait PDRD tersebut telah disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk dimasukkan ke dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah.

3. Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan Local Taxing Power

Terdapat beberapa tantangan dalam penyesuaian ketentuan PDRD sesuai UU Nomor 1 Tentang HKPD, diantaranya pelaksanaan opsen PKB, BBNKB, dan MLBB, kesiapan aplikasi perbankan, pemahaman dan kepatuhan masyarakat dan kekurangan jumlah SDM pengelola PDRD.

4. Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan Local Tax Ratio (LTR) sejak 2017 s.d. September 2024

Realisasi PAD baik pada Pemda Provinsi Bengkulu maupun PAD konsolidasian pemerintah kabupaten/kota mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2017, namun rasio kemandirian fiskal dan *local taxing power* tergolong masih rendah. Per 30 September 2024 *Local Tax Ratio* (LTR) Provinsi Bengkulu untuk pendapatan asli daerah berada di level 0,67 persen sedangkan untuk pendapatan pemerintah pusat berada di level 2,69 persen dan secara konsolidasian sebesar 3,37 persen. Sementara rasio kemandirian fiskal Provinsi Bengkulu berada di level 11,58 persen (sangat rendah). Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan **local taxing power** sesuai Implementasi salah satu pilar UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.





5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan guna perbaikan kinerja ekonomi dan fiskal di Provinsi Bengkulu:

1. **Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Instansi Pemerintah di Bengkulu baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu mendorong konsumsi regional (rumah tangga maupun pemerintah), peningkatan aktivitas dunia, dan stabilitas perekonomian melalui sinergi dengan seluruh stakeholders**

Aktivitas perekonomian masyarakat masih perlu terus didorong sebagaimana sebelum pandemi. Investasi di sektor riil masih perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah perlu terus ditingkatkan agar perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh secara inklusif dan akseleratif. Pemerintah harus tetap optimis untuk meningkatkan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut setidaknya terdapat 3 kebijakan yang harus dilakukan, yaitu: **peningkatan konsumsi regional** melalui percepatan realisasi belanja pemerintah, **peningkatan aktivitas dunia usaha** melalui kemudahan izin berusaha, proaktif menyebarkan program KUR dan Pembiayaan UMI, promosi peluang investasi daerah serta **upaya menjaga stabilitas ekonomi yang harus dilaksanakan secara simultan melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan institusi terkait** melalui FKPKN, TPID, TPAKD, Tim Percepatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM, dan sebagainya.

2. **Dalam rangka implementasi transformasi ekonomi, Bengkulu perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri pengolahan**

Jumlah Penduduk miskin mencapai 13,56 persen sementara TPT hanya sebesar 3,11 perse, hal tersebut menandakan sebagian masyarakat bekerja tetapi dengan tingkat upah yang rendah. Sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor informal terutama di sektor pertanian dan perkebunan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani terdapat dua hal yang perlu dilakukan yaitu: (1) meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi pertanian; dan (2) pembangunan industri hilirisasi pengolahan produk unggulan pertanian dan perkebunan untuk membuka lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih baik,

seperti; pengelolah CPO menjadi minyak goreng, pengolahan gabah menjadi beras, pengolahan kopi, karet, dan lain-lain). Hilirisasi juga dapat meningkatkan permintaan hasil pertanian dan perkebunan dengan harga yang lebih stabil sehingga tidak tergantung pada permintaan dari luar daerah. Hilirisasi juga dapat memotong biaya distribusi sehingga harga bisa lebih kompetitif. Melalui hilirisasi industri pertanian dan perkebunan diharapkan angka kemiskinan dapat turun lebih cepat dan ketahanan ekonomi di Bengkulu juga lebih baik.

3. **Revitalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai**

Pelayanan ekspor oleh PT. Pelindo masih relatif lama serta masih belum memadainya Infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai untuk ekspor curah cair dan seringnya terjadi pendangkalan, mengakibatkan perusahaan penghasil CPO mengalihkan eksportasinya ke pelabuhan lain di pulau Sumatera terutama Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Pendangkalan juga menyebabkan ekspor cangkang kernel sawit tertunda dan baru terealisasi di bulan September 2024 sehingga menimbulkan kontraksi yang cukup dalam pada penerimaan Bea Keluar s.d. triwulan III Tahun 2024. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan revitalisasi dan optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai melalui: (1) Melengkapi infrastruktur yang memadai agar kegiatan ekspor dapat berjalan dengan optimal seperti peningkatan daya tampung tangki curah cair, penambahan dermaga, dan pembangunan kawasan industri di kawasan Pelabuhan; serta (2) mengatasi terjadinya pendangkalan Pelabuhan yang selalu berulang setiap tahun melalui pendekatan yang lebih komprehensif termasuk penerapan riset dan teknologi.

Skema pembiayaan revitalisasi dan optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai dapat bersumber dari PT Pelindo, kontribusi badan usaha, pemerintah, dan/atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Melalui peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai, dan saat ini juga telah didukung oleh implementasi (*National Logistic Ecosystem* (NLE), diharapkan kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Baai dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara lebih akseleratif.

4. **Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Percepatan Penyelesaian Regulasi dan Koordinasi terkait Impelemenditasi Perda PDRD sesuai UU HKPD**





Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mengakselerasi penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang diperlukan untuk penerapan secara penuh Perda PDRD sesuai ketentuan UU HKPD. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya keterlambatan pemungutan PDRD pada awal tahun 2024. BPKAD atau BAPENDA bersama Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus aktif mengawal penyelesaian regulasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta koordinasi penyalpan sistem dengan Perbankan.

5. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu lebih mengintensifkan penerimaan perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan meningkatkan local taxing power

Mengingat masih rendahnya rasio kemandirian fiskal dan rendahnya *local taxing power*, Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu agar terus menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah sesuai keunggulan masing-masing Pemda. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan, terutama dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai cara diantaranya:

- Revitalisasi sektor unggulan:** Provinsi Bengkulu memiliki potensi ekonomi di sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Optimalisasi pengelolaan sektor-sektor ini melalui peningkatan investasi dan promosi pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- Digitalisasi layanan publik dan pajak:** Meningkatkan digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi akan mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD.
- Diversifikasi sumber pendapatan:** Perlu adanya diversifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergali secara optimal, seperti dari aset-aset daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan peran dari sektor non-pajak.
- Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu perlu terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahannya,** hal tersebut terlihat dari beberapa indikator *good governance* yang cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hasil temuan penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa *good governance* yang diwakili oleh pengelolaan aset pemerintah (ROA) dan

manajemen SILPA sebagai representasi efektivitas dan efisiensi, opini BPK atas kewajaran laporan keuangan sebagai representasi akuntabilitas dan transparansi, dan solvabilitas layanan sebagai representasi responsivitas menyebabkan semakin kuatnya *Local Taxing Power*.

Adapun strategi untuk memperkuat *local taxing power* antara lain:

- 1) penggunaan infrastruktur teknologi informasi sehingga tata kelola pengelolaan PDRD dapat dijaga dengan baik,
- 2) aktif berkoordinasi dengan pihak terkait terutama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perbankan dan samsat terkait implementasi opsen,
- 3) sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah kepada masyarakat secara rutin melalui berbagai media,
- 4) peningkatan ketersediaan SDM dan kompetensi SDM pengelola PDRD,
- 5) melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta
- 6) mendorong penyelesaian perda turunan terkait PDRD.

6. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu terus mendorong dan mengintensifkan kinerja ekspor komoditi khas daerah

Untuk meningkatkan penerimaan dari bidang ekspor di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah perlu terus mendorong ekspor komoditas unggulan Bengkulu oleh para pelaku UMKM seperti: kopi, kepiting, lintah, dan lain-lain. Kemenkeu Satu melalui DJBC dapat melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM yang ingin atau memiliki potensi untuk melakukan ekspor produknya. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi juga perlu mempercepat realisasi peningkatan fungsi pelabuhan Pulau Bai melalui kerja sama dengan investor dalam dan/atau luar negeri.

7. Pengendalian Deflasi

Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut perlu mendapatkan respon yang serius dari pemerintah agar tidak berdampak semakin parah terhadap petani hortikultura. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. TPIP dan TPID perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terkait fenomena deflasi yang sudah berlangsung selama empat bulan berturut-turut yang utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas hortikultura, untuk





- mengidentifikasi faktor penyebab dan menentukan strategi pengendalian yang sesuai.
- Pemerintah dapat menerapkan kebijakan intervensi harga dan intervensi pasar berupa penentuan harga minimum komoditas produk hortikultura dari petani dan melakukan pembelian langsung komoditas hortikultura dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi pendapatan petani. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar dan mencegah penurunan harga yang merugikan petani, sekaligus menjaga ketersediaan (stok) saat terjadi lonjakan permintaan seperti momen hari besar keagamaan atau tahun baru.
 - Dalam rangka intervensi pengendalian harga dan stok, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait seperti koperasi petani atau memberikan penugasan kepada lembaga/BUMN yang bergerak di bidang logistik seperti Perum Bulog untuk melaksanakan pembelian, penyimpanan, dan distribusi komoditas hortikultura. Apabila terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan tingkat deflasi yang lebih dalam, pemerintah perlu menyiapkan skema penguatan daya beli masyarakat.
 - Pemerintah perlu mendorong hilirisasi produk pertanian hortikultura baik skala industri maupun rumah tangga, seperti: pengolahan cabe menjadi saos atau sambal dalam kemasan, dan lain-lain. Dengan demikian pada saat panen raya, hasil pertanian hortikultura dapat diserap oleh industri bukan hanya rumah tangga sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran tetap bisa dijaga dan harga komoditas lebih terkendali.

8. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah

Bengkulu memiliki potensi ekonomi yang luar biasa meliputi potensi sumber daya alam, wisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Seluruh potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah tentunya tidak dapat bekerja sendiri tetapi harus melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Tim Percepatan Investasi Daerah dan Pemberdayaan UMKM perlu terus mempromosikan potensi investasi, menciptakan kemudahan investasi, menciptakan kemudahan investasi, memperbaiki akses, dan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan.

Selain itu, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait harus aktif mempromosikan dan mengkoordinasikan investasi di bidang hilirisasi pertanian/perkebunan ini, termasuk penerbitan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perbaikan infrastruktur konektivitas, kemudahan perizinan berinvestasi, serta kebijakan *tax holiday* bagi pelaku usaha baru.

Salah satu kendala masuknya investasi di Provinsi Bengkulu adalah sebagian besar pemda belum memiliki RDTR. Karena penyusunan RDTR membutuhkan biaya yang cukup besar, diperlukan intervensi kebijakan fiskal terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal yang masih sangat rendah dalam bentuk Transfer ke Daerah maupun penugasan kepada K/L terkait.

Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik.

-Sri Mulyani-





Daftar Pustaka

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi OMSPANTKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd>.

Aplikasi SIKD, <https://sikd.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKP-UMi, <https://sikp.umi.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi Simtrada, <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>.

Aplikasi Sintesa, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/v3>.

Aplikasi SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia) diakses pada 1 November 2024.

Antaranews.com (2024, 19 September). 9 Cara Bengkulu Kendalikan Inflasi 2024. Diakses pada 9 November 2024, dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/367771/9-cara-bengkulu-kendalikan-inflasi-2024>.

Antaranews.com (2024, 28 Februari). Bengkulu Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024. Diakses pada 9 November 2024, dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/334737/bengkulu-targetkan-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-pada-2024>.

Antaranews.com (2024, 25 Agustus). BI: Sawit dan Kopi Tumpuan Ekonomi Bengkulu Triwulan III 2024. Diakses pada 9 November 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/4285507/bi-sawit-dan-kopi-tumpuan-ekonomi-bengkulu-triwulan-iii-2024>.

Bapenda.jabarprov.go.id. (2024, 1 November). Pajak Rokok. Diakses pada 1 November 2024, dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/>.

Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 65/11/17/Th. XXIII, 5 November 2024 – PDRB Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 54/10/17/Th. XXVI, 1 Oktober 2024 – Inflasi Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 61/11/17/Th. XVI, 1 November 2024 – Ekspor Impor Provinsi Bengkulu Triwulan III 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 – Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio Provinsi Bengkulu Maret 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 83/11/Th. XXXVII, 5 November 2024 – Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bengkulu Agustus 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 55/10/Th. XVIII, 1 Oktober 2024 – Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Bengkulu September 2024.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK) triwulan III-2024.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) *audited* triwulan IV-2023.





Daftar Pustaka

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) *audited* triwulan IV-2023.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *audited* triwulan IV-2023.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2023. Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023. Jakarta.

Efriyanto, Rozi dkk (2023). "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu". Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan.

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan ALCo Regional Bengkulu Periode Realisasi s.d. Juli, Agustus, September 2024.

Media Defis Edisi XXXVII- Tahun 2024. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pilar Kemandirian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah". DJPK Kemenkeu.

Menteri Keuangan. 2022. Program Sinergi Pemberdayaan UMKM. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.01/2022, Jakarta.

News.ddtc.co.id. (2024, 22 Juli). Piutang PBB Tembus Rp119 Miliar, Pemkot Beri Pemutihan Hingga Desember. Diakses pada 1 November 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804181/piutang-pbb-tembus-rp119-miliar-pemkot-beri-pemutihan-hingga-desember>.

News.ddtc.co.id. (2024, 10 Oktober). Tingkatkan *Local Taxing Power*, Kemenkeu Beberkan Lima Tantangannya. Diakses pada 1 November 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806101/tingkatkan-local-taxing-power-kemenkeu-beberkan-lima-tantangannya>.

RRI.co.id. (2024, 4 September). Samsat Maksimalkan Program Kerja Tingkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan. Diakses pada 1 November 2024 dari <https://www.rri.co.id/daerah/952519/samsat-maksimalkan-program-kerja-tingkatkan-pembayaran-pajak-kendaraan>.

Setneg. (2023, 16 Agustus). Upaya Membangun Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Diakses pada 31 Oktober 2024, dari <https://www.setneg.go.id/>.

Sulaeman, J., Herliananda, A. M., Kustanto, Y. R. (2024). Laporan Kegiatan *Secondment* Provinsi Bengkulu. 42-74.

Susanto, Eddy. (2024, 24 Juli). Press Release Realisasi Semester I Apbn 2024: Responsif Terhadap Dinamika Perekonomian Antisipatif Terhadap Berbagai Tantangan, Dan Suportif Terhadap Agenda Pembangunan Nasional. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-berita/36125/SIARAN-PERS-KEMENTERIAN-KEUANGAN-NOMOR-SP-30KLI2024.html>.

Susena, Karona Cahya (2018). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. Ekombis Review Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.

Widiastuti, Wiwin dkk (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemberdayaan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.





**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**



Jl. Adam Malik (d.h. Jl. P Natadirja no. 271) Km. 8, Kota Bengkulu
38225

Telp : 0736 - 345237, 343082

Fax : 0736 - 345311

Email : djpbngkulu@gmail.com

Instagram : [djpbngkulu](https://www.instagram.com/djpbngkulu)

Twitter : [djpbngkulu](https://twitter.com/djpbngkulu)

Youtube : [Kanwil DJPb Prov Bengkulu](https://www.youtube.com/KanwilDJPbProvBengkulu)

www.djpbngkulu.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU**